
KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 dapat disusun dan diselesaikan.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Demikian dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung dengan harapan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 5 Agustus 2021

WALI KOTA BANDUNG

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-7
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021	I-8
1.5 Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan	I-9
1.5.1 Maksud	I-9
1.5.2 Tujuan	I-9
1.5.3 Dasar Pertimbangan	I-10
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2020	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II	II-1
2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	II-97
A. Faktor Pendukung	II-97
B. Faktor Penghambat	II-97
C. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya	II-98
BAB III GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Perubahan Asumsi Keuangan Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global	III-1
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional	III-3
3.1.3 Kondisi Ekonomi Jawa Barat	III-6
3.1.4 Kondisi Ekonomi Kota Bandung	III-16
3.2 Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah	III-23
3.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-23

3.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-24
3.3	Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III-25
3.3.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.3.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-27
3.3.2	Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-29
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-4
4.1.1	Telaahan Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-5
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-7
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bandung.....	IV-12
4.2	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021.....	IV-15
4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi	IV-17
4.2.2	Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021	IV-22
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1	Pagu Indikatif Pendanaan Daerah	V-1
5.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD 2021	V-5
BAB VI	PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kota Bandung	II-2
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Belanja Per Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	II-93
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia, Uni Eropa dan Amerika pada Tahun 2020.....	III-1
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Disandingkan dengan Nasional Tahun 2022-2023.....	III-11
Tabel 3.3	Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2016-2020	III-22
Tabel 3.4	Rincian Kebijakan Pendapatan pada APBD Tahun 2021, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021	III-26
Tabel 3.5	Rincian Kebijakan Belanja pada APBD Tahun 2021, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021	III-27
Tabel 3.6	Rincian Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Bandung pada APBD Tahun 2021, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021.....	III-29
Tabel 4.1	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-6
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	IV-9
Tabel 4.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021.....	IV-12
Tabel 4.4	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Nasional	IV-20
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs	IV-20
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.....	IV-22
Tabel 4.7	Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2021.....	IV-23
Tabel 4.8	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	IV-26
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021	V-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Realisasi Belanja pada Perangkat Daerah Non Kecamatan	II-95
Grafik 2.2	Persentase Realisasi Belanja pada Kecamatan	II-96
Grafik 3.1	Fluktuasi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Maret 2015 – September 2020	III-11
Grafik 3.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2016-2020	III-16
Grafik 3.3	Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2020.....	III-17
Grafik 3.4	LPE Kota Bandung Tahun 2020 menurut Lapangan Usaha..	III-17
Grafik 3.5	Diagram Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester 1.....	III-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Sektor UMKM Terdampak COVID-19.....	III-13
Gambar 3.2	Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan Dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%)	III-14
Gambar 3.3	Persentase Pekerja/Buruh yang Di_PHK Dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%)	III-15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bandung 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun ketiga kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali kota Bandung terpilih periode tahun 2018-2023. Berbagai rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan target yang akan dicapai pada tahun 2021 menjadi sangat krusial sebagai pondasi dalam mewujudkan Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan memiliki peranan strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni (semester satu) menunjukkan adanya perubahan anggaran program dan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan dengan melakukan perubahan RKPD Tahun 2021. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD pada tahun berjalan dan menjadi pedoman penyusunan bagi perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021. Perubahan RKPD Tahun 2021 diikuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) Tahun 2021 sebagai dasar perubahan APBD Tahun 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan perubahan RKPD dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 dilakukan untuk merespon perkembangan situasi sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12);
31. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 28);
32. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 9);
34. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

36. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71/KU.01.06.08/BPKAD Tentang Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2021;

37. Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, mengacu pada RPJPD 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, dan RPJMN tahun 2020-2024.

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 mengacu dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, substansi Perubahan RKPD Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat Nasional, dokumen perencanaan tingkat Provinsi, serta memperhatikan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota terdekat.

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan pagu indikatif dengan mempertimbangkan sumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penjabaran hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2021 sampai dengan triwulan II, serta permasalahan pembangunan daerah.
2. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan dana untuk tahun yang direncanakan;

3. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program dengan orientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan;
4. Rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2021

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penyusunan perubahan RKPD tahun 2021, yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen perubahan RKPD, maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2021 sampai dengan triwulan II, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang perubahan asumsi keuangan daerah, kebijakan dan kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi nasional, kondisi perekonomian Jawa Barat, kondisi perekonomian Kota Bandung, asumsi dasar kebijakan keuangan daerah, serta perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB 6 PENUTUP

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari perubahan RKPD tahun 2021.

1.5 MAKSUD, TUJUAN, DAN DASAR PERTIMBANGAN

1.5.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, dengan memadukan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.5.2 Tujuan

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2021. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 adalah:

1. Tersusunnya perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Tersusunnya acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. Tersusunnya acuan Perubahan Kedua atas Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2021, sebagai dasar dari penyusunan

Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2021;

4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5.3 Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila:
 - a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau;
 - b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni (semester satu) menunjukkan adanya perubahan anggaran program dan kegiatan pada seluruh Perangkat Daerah yang perlu disesuaikan. Selain itu, rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah baru terserap sebesar 28,26%.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dampaknya, dengan substansi yang diamanatkan sebagai berikut:
 - Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah

- Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa dari besaran paling sedikit 25% penggunaannya diarahkan penggunaannya, **termasuk tidak terbatas** pada :
 - a. Perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20%;
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi paling tinggi 15%.
 - Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19
 - Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa dukungan pendanaan dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk :
 - a. Dukungan Pelaksanaan vaksinasi Covid-19
 - b. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19
 - Pasal 9 ayat (3) dijelaskan dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit 8% dari alokasi DAU.
 - Pasal 13 ayat (5) dijelaskan bahwa dalam hal pada Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa DID dan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 pada Rekening Kas Umum Daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali dalam APBD Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan perencanaan diimplementasikan secara konsisten sehingga dapat diperhitungkan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan dimasa yang akan datang, maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.

Evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan Triwulan II mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2021 dan realisasi capaian kinerja misi RPJMD tahun kedua sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
Kota Bandung

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		
1.01		Urusan Pendidikan																		
1	1.01.1.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	395.540.489.662.187	-	-	100,00%	1.177.596.241.985	54%	445.321.014.891	54,00	37,82	54%	445.321.014.891	54%	11,259%	Dinas Pendidikan		
2	1.01.1.01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar Kesesetaraan Angka putus sekolah SD Angka putus sekolah SMP	100% 100% 0,01% 0,02%	1.225.775.266.050,35	-	-	100% 100% 0,01% 0,02%	564.613.612.444	- - - -	4.373.610.830	- - - -	37,82	-	4.373.610.830	- - - -	-	Dinas Pendidikan		
3	1.01.1.01.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah kurikulum lokal yang dikembangkan	2	2.105.492.250	-	-	2	839.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan		
4	1.01.1.01.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	53,35%	582.428.762.900	-	-	53.35%	152.428.762.900	-	31.995.835.070	-	20,99	-	31.995.835.070	-	-	Dinas Pendidikan		
1.02		Urusan Kesehatan																		
1	1.02.1.02.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Kesehatan	-	-	-	-	100%	826.009.773.117,00	0%	304.010.161.165,00	0,00%	36,80%	0,00%	304.010.161.165,00	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun	
2	1.02.1.02.01.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	100%	533.787.726.286,00	0%	65.278.926.601,00	0,00%	12,23%	0,00%	65.278.926.601,00	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan	Pengukuran dilakukan pada akhir tahun	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
3	1.02.1.02. 01.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	79,23%	40.552.573.000,0 0	0%	12.604.214.56 9,00	0,00%	31,08%	0,00%	12.604.214.56 9,00	0,00%	0,00 %	Dinas Kesehatan	Pengukur an dilakukan pada akhir tahun	
4	1.02.1.02. 01.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	-	-	-	-	100%	317.609.000,00	0%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00 %	Dinas Kesehatan	Pengukur an dilakukan pada akhir tahun	
5	1.02.1.02. 01.05	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kelurahan Siaga Aktif Purnama & Mandiri	-	-	-	-	25,80%	1.044.969.600,00	0%	86.359.802,00	0,00%	8,26%	0,00%	86.359.802,00	0,00%	0,00 %	Dinas Kesehatan	Pengukur an dilakukan pada akhir tahun	
	1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	1.03.1.03. 01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	22.859.383.564	-	-	100%	22.859.383.564	19,89%	23.411.357.80 2	-	102,41	19,89%	23.411.357.80 2	19,89%	102,4 1%	Dinas Pekerjaan Umum		
2	1.03.1.03. 01.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	60 menit	59.267.241.080	-	-	60 menit	59.267.241.080	50 menit	2.464.959.622	-	4,16	50 menit	2.464.959.622	127,04 %	4,16 %	Dinas Pekerjaan Umum		
3	1.03.1.03. 01.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang drainase dalam kondisi baik	8000 m1	42.783.389.193	-	-	8000 m1	42.783.389.193	68832 m1	5.264.836.402	-	12,31	68832 m1	5.264.836.402	860,40 %	12,31 %	Dinas Pekerjaan Umum		
4	1.03.1.03. 01.04	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	95%	113.865.576.770	-	-	95%	113.865.576.770	91,87%	17.017.122.146	-	14,94	91,87%	17.017.122.14 6	96,71%	14,94 %	Dinas Pekerjaan Umum		
5	1.03.1.03. 01.05	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Jumlah PJU dalam kondisi baik	2500 titik	41.156.660.782	-	-	2500 titik	41.156.660.782	4222 titik	4.092.203.128	-	9,94	4222 titik	4.092.203.128	168,88 %	9,94 %	Dinas Pekerjaan Umum		
6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kota	100	65.575.268.454	-	-	100	50.422.233.976	50	20.917.617.33 1	-	41,48	50	20.917.617.33 1	50	31,90 %	Dinas Penataan Ruang		
7		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota yang tersusun tepat waktu	100	19.881.819.100	-	-	33	4.572.227.010	-	52.118.250	-	1,14	-	52.118.250	-	0,26 %	Dinas Penataan Ruang		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5x100%	12	13								
			Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	80		-		78		78,44				78,44		78,44				
8		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Dokumen Rencana Pemanfaatan Ruang dan Arsitektur	100	8.704.287.350	-	-	100	3.680.527.300	100	305.599.950		8,30	100	305.599.950	100	3,51 %	Dinas Penataan Ruang		
9		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan Dan	Persentase Wilayah Kota Bandung yang terdata RTH private	41	4.244.660.200	-	-	18	3.316.377.500	0	0		0,00	0	0	0	0	Dinas Penataan Ruang		
10		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Areal Pemakaman yang Tertata	35	19.034.684.900	-	-	33	7.503.409.781	16,5	2.335.674.500	50,00	31,13	16,5	2.335.674.500	16,5	12,27 %	Dinas Penataan Ruang		
	1.04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1	1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85.5 Nilai	71.736.539.607	84.44 Nilai	16.796.971.941	-	-	-	-	-	-	85.35 Nilai	16.796.971.941	99,82	23,41	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Belum Tercapai	
2	1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85.5 Nilai	98.426.636.663	84.44 Nilai	30.324.659.906	-	-	-	-	-	-	85.35 Nilai	30.324.659.906	99,82	30,81	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Belum Tercapai	
3	1.04.1.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85.5 Nilai	1.830.227.660	84.44 Nilai	675.062.300	-	-	-	-	-	-	85.35 Nilai	675.062.300	99,82	36,88	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	Belum dilakukan pengukuran	
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85.5 Nilai	170.170.000	84.44 Nilai	162.277.500	-	-	-	-	-	-	85.35 Nilai	162.277.500	99,82	95,36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85,5 Nilai	297.711.900 54.225.000.000	84,44 Nilai	47.998.500 -	-	-	-	-	-	-	85,35 Nilai	47.998.500 -	99,82	16,12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
			Cakupan pelayanan administrasi	100%		-		-	-	-	-	-	100%	15.225.135.061		-	28,08	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
7		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	70,52 %	5.806.780.020	80,73 %	3.735.931.348	-	-	-	-	-	-	80,73%	3.735.931.348	97,53	64,34	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
8		Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	70,52 %	7.000.000.000	80,73 %	5.736.363.687	-	-	-	-	-	-	80,73%	5.736.363.687	97,53	81,95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
9		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	70,52 %	3.742.923.000	80,73 %	3.657.455.000	-	-	-	-	-	-	80,73%	3.657.455.000	97,53	97,72	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
10		Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	70,52 %	425.768.864.000	80,73 %	44.875.523.646	-	-	-	-	-	-	80,73%	44.875.523.646	97,53	10,54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
11		Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	2,16%	326.498.593.571	2,94%	35.136.573.439	-	-	-	-	-	-	2,94%	35.136.573.439	125,76	10,76	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
12		Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	2,16%	79.844.008.178	2,94%	29.527.792.770	-	-	-	-	-	-	2,94%	29.527.792.770	125,76	36,98	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
13		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase luasan kawasan kumuh	2,16%	17.006.780.868			2,76%	15.518.134.880		2.851.612.050			2,94%	2.851.612.050		16,77	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
14		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase luasan kawasan kumuh	2,16%	11.000.000.000			2,76%	7.302.933.380									Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
15		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luasan kawasan kumuh	2,16%	11.338.747.750			2,76%	7.133.516.960		98.554.875			2,94%	98.554.875,00		0,87	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
16		Program Pengembangan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh	2,16%	5.186.058.835			2,76%	3.282.286.350	2,94%	717.232.915			2,94%	717.232.915		13,83	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
17		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase luasan kawasan kumuh	2,16%	11.538.775.280			2,76%	11.749.297.001	2,94%	2.492.674.141			2,94%	2.492.674.141		21,60	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
18		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	83,01%	171.612.499.828			80,93%	104.600.864.590	80,73%	39.453.228.325			80,73%	39.453.228.325	99,75	22,99	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	
19		Program Penyelenggaraan Prasarana	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman	4,74%	91.278.868.747	6,77%	23.305.247.274							6,77%	23.305.247.274	96,41	25,53	Perumahan dan Kawasan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Sarana dan Utilitas	yang didukung dengan PSU																Permukima, Pertanahan dan Pertamanan	
20		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase luasan RTH	13,20 %	288.656.936.616			12,286%	126.653.688.632	12,25 6%	49.790.496.12 0			12,256%	49.790.496.12 0	92,85	17,25	Perumahan dan Kawasan Permukima, Pertanahan dan Pertamanan		
21		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luasan RTH	12,23 %	87.701.095.479	12,25 %	129.912.150.43 0							12,248%	129.912.150.4 30	100,12	148,1 3	Perumahan dan Kawasan Permukima, Pertanahan dan Pertamanan		
22		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase proses penyelesaian masalah pertanahan	100%	2.500.000.000	-	-	100%	1.496.700.000	100%	230.792.500	-	-	100%	230.792.500	100,00	9,23	Perumahan dan Kawasan Permukima, Pertanahan dan Pertamanan		
23		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase penerbitan izin pemanfaatan tanah	-	4.976.284.522	-	-	0,003%	3.455.753.140	-	1.204.875.500	-	-	-	1.204.875.500		24,21	Perumahan dan Kawasan Permukima, Pertanahan dan Pertamanan		
24		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	58,18 %	131.335.766.884	50,34 %	22.056.562.507	-	-	-	-	-	-	47,89%	22.056.562.50 7	82,52	16,79	Perumahan dan Kawasan Permukima, Pertanahan dan Pertamanan		
25		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	58,18 %	136.148.561.732	50,34 %	42.672.531.158	-	-	-	-	-	-	47,89%	42.672.531.15 8	82,52	84,51	Perumahan dan Kawasan Permukima, Pertanahan dan Pertamanan		
	1.05	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		
1	1.05.1.05. 01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	68.892.692.467	-	-	100%	56.936.109.477	50%	24.647.987.84 3		-	50%	24.647.987.84 3	50%	35,78 %	Satuan Polisi Pamong Praja		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1.05.1.05. 01.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Pertahun	4%	26.076.173.281	-	-	100%	23.750.556.430	50%	7.692.535.600		-	50%	7.692.535.600	50%	29,50 %	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.06	Urusan Sosial																	
1	1.06.1.06. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	36.064.765.367	100%	8.697.681.425	100%	9.372.287.480	100%	3.195.510.143	100,00	34,10	100%	11.893.191.56 8	100	32,98	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
2	1.06.1.06. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	731.258.437	100%	150.436.000	100%	803.534.780	-	196.689.400	100,00	24,48	100%	347.125.400	100	47,47	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
3	1.06.1.06. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	621.161.336	100%	117.700.000	100%	56.100.000	100%	-	100,00	-	100%	117.700.000	100	18,95	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
4	1.06.1.06. 01.24	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	100%	7.190.900.300	100%	1.385.516.750	100%	1.327.955.200	100%	274.482.150	100,00	20,67	100%	1.659.998.900	100	23,08	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
5	1.06.1.06. 01.25	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	2200 Orang	7.979.624.318	217 Orang	1.075.920.250	-	-	-	-	-	-	217 Orang	1.075.920.250	9,86	13,48	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
6	1.06.1.06. 01.26	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	100%	19.594.746.160	100%	629.410.050	100%	4.963.249.707	100%	280.705.040	100,00	5,66	100%	910.115.090	100	4,64	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
7	1.06.1.06. 01.27	Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Cakupan Data Warga Miskin Yang terverifikasi dan valid	100%	4.219.782.000	100%	935.502.000	-	-	-	-	-	-	100%	935.502.000	100	22,17	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
8	1.06.1.06. 01.28	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	72,000 keluarga	10.788.763.861	56.646 Keluarga	1.959.535.785	54.308 Keluarga	4.381.994.178	61.523 Keluarga	-	113,29	-	61,523 Keluarga	1.959.535.785	84,72	18,16	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
9	1.06.1.06. 01.29	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	100%	59.440.531.841	100%	7.371.541.475	100%	8.973.450.329	100%	1.770.381.480	100,00	19,73	100%	9.141.922.955	100	15,38	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
10	1.06.1.06. 01.30	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah anak dan Lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	100%	1.683.301.750	100%	843.056.000	-	-	-	-	-	-	100%	843.056.000	100	50,08	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
11	1.06.1.06. 01.31	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks- Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang memperoleh Pemenuhan Rehabilitasi sosial dasar	100%	2.173.201.100	100%	1.749.197.750	-	-	-	-	-	-	100%	1.749.197.750	100	80,49	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
12	1.06.1.06. 01.32	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	6.697.391.042	80,77 %	1.237.139.850	80%	402.217.000	80%	-	0,00	-	80%	1.237.139.850	80	18,47	Dinas Sosial dan Penanggulan gan Kemiskinan	
13	1.06.4.05. 10.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	111.797.700	100,00	93.453.500	-	-	-	-	-	-	100	93.453.500	109,1	83,59	Kecamatan Cicendo	
14	1.06.4.05. 12.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial	54,54 %	6.314.868.204	100%	1.965.128.680	54.54 %	274.039.960	47%	57.864.100	86.16 %	21,12	100	2.022.992.780	185,19	32,04	Kecamatan Coblong	
15	1.06.4.05. 15.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	320.510.000	100	303.484.500	0%	-	-	-	-	-	100,00	303.484.500	109,1	94,69	Kecamatan Cibeunying Kidul	
16	1.06.4.05. 16.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggara an	100%	690.045.020	100%	374.701.993	-	-	-	-	-	-	100%	374.701.993	100%	54,30	Kecamatan Cibeunying Kaler	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			kesejahteraan sosial																	
17	1.06.4.05.17.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial	91,66 %	565.255.000	95,24 %	502.228.000	-	-	-	-	-	-	95	502.228.000	104,4	88,85	Kecamatan Astanaanyar		
18	1.06.4.05.18.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial	92%	186.239.000	100,00%	161.771.000	-	-	-	-	-	-	100	161.771.000	108,7	86,86	Kecamatan Bojongloa Kaer		
19	1.06.4.05.21.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	745.100.600	100,00%	710.427.387	92%	819.610.660	-	-	0	-	92%	710.427.387	91,66%	95,35	Kecamatan Bandung Kulon		
20	1.06.4.05.22.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial	100%	452.975.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	Kecamatan Regol		
21	1.06.4.05.23.24	Program Perlindungan Sosial Bencana			-		-	100%	4.578.459.000	28%	39.545.000	28%	0,86	28	39.545.000	-	-	Kecamatan Lengkong		
22	1.06.4.05.23.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	93%	2.430.144.274	100,00%	571.382.000	100%	529.826.000	45%	135.602.000	45%	25,59	100%	706.984.000	99,86%	29,09	Kecamatan Lengkong		
23	1.06.4.05.24.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam	20,00 %	650.603.500	20,00%	591.174.443	-	-	-	-	-	-	20,00%	591.174.443	100,00%	90,87	Kecamatan Batununggal		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			penyelenggaraan kesejahteraan sosial																	
24	1.06.4.05.25.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	- persentase Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	415.818.990	100,00%	409.013.585	-	-	-	-	-	-	91,66%	409.013.585	100%	98,36	Kecamatan Ujungberung		
25	1.06.4.05.26.28	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	562.753.800	50,00 %	-	-	-	-	-	-	-	50	-	100	-	Kecamatan Kiaracondong		
26	1.06.4.05.27.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	421.322.000	96,00 %	404.049.000	-	-	-	-	-	-	96	404.049.000	105,49	95,90	Kecamatan Arcamanik		
27	1.06.4.05.28.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	-	91,66 %	88.785.000	0	-	-	-	-	-	0,9166	88.785.000	1,01	1,00	Kecamatan Cibiru		
28	1.06.4.05.29.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	58.882.600	100,00%	1.149.726.856.634	50%	502.541.500	0	21.550.000	0	4,29	0	1.149.748.406.634	100%	1.952.611,48	Kecamatan Antapani		
29	1.06.4.05.30.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan	91,66 %	404.234.900		383.788.685	-	464.438.000		-	-	-	0	383.788.685	0	94,94	Kecamatan Rancasari		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			kesejahteraan sosial																	
30	1.06.4.05. 31.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	277.693.736	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	109,89	-	Kecamatan Buahbatu		
31	1.06.4.05. 34.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-	-	25,00 %	47.855.000	-	-	0	-	-	-	0,25	47.855.000	-	-	Kecamatan Panyileukan		
32	1.06.4.05. 35.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	93.720.000	100,00%	75.613.750	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	100,00%	74.788.750	109,10%	79,8	Kecamatan Cinambo		
			Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %		100%		0,00%		0		-		100		109,89				
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
	2.01	Urusan Tenaga Kerja																		
1	2.01.2.01. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 laporan	15.250.454.728	12 laporan	2.817.530.752		3.438.815.483		454.532.100	-	13,22	70,00 %	2.817.530.752	583,33	18,48	Dinas Tenaga Kerja		
2	2.01.2.01. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	12 laporan	35.779.177.896	12 laporan	13.020.234.584		11.343.914.200		135.240.000	-	1,19	12	13.020.234.584	100	36,39	Dinas Tenaga Kerja		
3	2.01.2.01. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	1 laporan	761.407.727	1 laporan	106.932.100		-		-	-	-	1	-	100	-	Dinas Tenaga Kerja		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
4	2.01.2.01. 01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkatkan kompetisinya		8.836.945.772	200 orang	1.924.009.875		1.992.540.510		23.585.100	-	1,18	42731798 80	4.053.247.003	-	45,87	Dinas Tenaga Kerja		
5	2.01.2.01. 01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan		22.927.767.292	45,55 %	4.053.247.003		5.373.781.101		468.886.355	-	8,73	45	-	-	0	Dinas Tenaga Kerja		
			Calon wirausaha baru yang dilatih			700 orang						-		700		-				
6	2.01.2.01. 01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase Kasus yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)		12.518.415.209	58,46 %	2.383.320.331		2.384.939.350		-	-	-	58	2.383.320.331	-	19,04	Dinas Tenaga Kerja		
	2.02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
1	2.02.2.02. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-Layanan Administrasi Perkantoran Bulanan	100%	18.371.496.253	100%	3.808.691.362	100%	4.848.088.536	100%	348.080.732	100%	7,18	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pemberdaya an Masyarakat		
2	2.02.2.02. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Aparatur yang dipelihara dan ditingkatkan	100%	5.256.516.479	100%	830.724.367	100%	200.363.522	100%	-	100%	-	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pemberdaya an Masyarakat		
3	2.02.2.02. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-Jumlah Jenis Pakaian yang diadakan untuk peningkatan disiplin Aparatur	100%	190.307.274	100%	34.386.000	100%	49.775.000	100%	-	100%	-	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pemberdaya an Masyarakat		
4	2.02.2.02. 01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100%	677.313.481	100%	90.651.000	100%	140.595.400	100%	93.375.000	100%	66,41	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pemberdaya an Masyarakat		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
5	2.02.2.02. 01.19	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	- Persentase Kelurahan Layak Anak	100%	7.881.076.445	59,60 %	1.521.570.787	68,87%	1.133.751.992	58,28 %	54.710.000	85%	4,83	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pemberdaya an Masyarakat		
6	2.02.2.02. 01.21	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik	100%	7.894.856.956	16,95 %	1.759.174.550	30,50%	1.022.176.476	16,95 %	39.244.800	56%	3,84	100%	1.798.419.350	40%	22,78	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pemberdaya an Masyarakat		
7	2.02.2.02. 01.22	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan		100%	3.572.587.574	100,00%	724.941.750	100%	606.148.850	100%	42.250.000	100%	6,97	100%	-	40%	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindunga n Anak dan Pemberdaya an Masyarakat		
	2.03	Urusan Pangan																		
1	2.03.2.03. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	16.703.169.680	75,75 -	3.662.816.965	83 -	4.037.334.709	0	353.212.248	0	8,75	75,75%	4.016.029.213	75,75%	24,04	Dinas Pangan dan Pertanian		
2	2.03.2.03. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	71.141.918.222	75,75 -	15.850.845.621	83 -	12.919.296.060	0	17.436.000	0	0,14	75,75%	15.868.281.621	75,75%	22,31	Dinas Pangan dan Pertanian		
3	2.03.2.03. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	480.178.099	75,75 -	103.785.000	83 -	120.062.250	0	-	0	-	75,75%	103.785.000	75,75%	21,61	Dinas Pangan dan Pertanian		
4	2.03.2.03. 01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	960.356.197	75,75 -	120.382.500	83 -	198.275.000	0	250.000	0	0,13	75,75%	120.632.500	75,75%	12,56	Dinas Pangan dan Pertanian		
5	2.03.2.03. 01.15	Program Ketahanan Pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,30 ton	10.790.226.385	85,08 Nilai	2.069.213.378	3,51875	1.900.676.300	0	220.120.890	0	11,58	85,08 ton	4.016.029.213	100,93%	37,22	Dinas Pangan dan Pertanian		
			- Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	80 ton		103,45 ton		80 ton		0		103,45 ton	129,31%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
6	2.03.2.03. 01.19	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	- Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	95%	12.943.624.086	99,77 %	2.701.339.350	92%	2.992.885.475	0	255.567.442	0	8,54	99,77%	2.956.906.792	105,02%	22,84	Dinas Pangan dan Pertanian		
7	2.03.2.03. 01.21	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan diberdayakan	57 Ke- lompok	10.250.417.383	47 Kelom- pok	467.964.080	48 Kelompo- k	1.834.948.900	0	26.100.000	0	1,42	47 kelompok	494.064.080	82,46%	4,82	Dinas Pangan dan Pertanian		
8	2.03.2.03. 01.24	Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	1.785.985.206	100,00%	-	83 -	142.236.300	0	-	0	-	100,00%	-	100,00%	-	Dinas Pangan dan Pertanian		
	2.04	Urusan Pertanahan																		
1	2.04.1.04. 01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luasan RTH	12,23 %	736.699.408.925	12,22 %	57.732.049.070	0,01%	107.304.374.657	0,00%	-	12,22%	-	12,22%	57.732.049.070	100%	7,84	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Pertanahan dan Pertamanan		
2	2.04.1.04. 01.24		Persentase RTH Yang Berkualitas	58,18 %	183.480.608.872	47,33 %	16.029.050.757	50,31%	35.512.115.118	47,33%	-	47,33%	-	47,33%	16.029.050.757	81%	8,74	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman , Pertanahan dan Pertamanan		
	2.05	Urusan Lingkungan Hidup																		
1	2.05.2.05. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	14.206.440.283	93.60 %	3.025.946.377	100%	6.215.655.420	20%	2.820.000	20	0,05	113.60%	3.028.766.377	113,60%	21,32	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
2	2.05.2.05. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	1.972.814.771	84.82 %	827.740.889	100%	4.141.541.564	0%	-	0	-	84.82%	827.740.889	84.82%	41,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
3	2.05.2.05. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	339.896.684	69.24 %	48.514.400	100%	60.500.000	0%	-	0	-	69.24 %	48.514.400	69.24%	14,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
4	2.05.2.05. 01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.454.808.249	75.27 %	188.117.000	100%	276.600.000	0%	-	0	-	75.27 %	188.117.000	75.27%	12,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	2.05.2.05. 01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	679.644.573	39,77 %	48.054.000	100%	205.840.000	0,00 poin	14.700.000	0	7,14	39,77 %	48.054.000	39,77%	7,07	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
6	2.05.2.05. 01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	206,65 3 ton	945.113.294.452	14,56 %	72.841.733.386	130.735 ton	121.678.676.380	-	5.239.853.848	0	4,31	15%	72.841.733.386	7,26	7,71	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
7	2.05.2.05. 01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	67,60 %	21.547.379.244	17,61 %	3.671.786.750	28,99%	4.934.969.716	0	-	0	-	17,61%	3.671.786.750	25,37	17,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
8	2.05.2.05. 01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase Penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung	0,00%	449.907.100	0%	433.462.000	-	-	-	-	-	-	0%	433.462.000	0%	96,34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
9	2.05.2.05. 01.27	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100,00%	2.959.735.350	100%	2.889.171.200	-	-	-	-	0	100%	2.889.171.200	100%	97,62	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
			Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	12,50 %		-		-	-	0	12,50%								
10	2.05.2.05. 01.28	Program Penataan Lingkungan	Persentase dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen kebijakan lingkungan yang ditindaklanjuti	30,00 %	1.812.542.200	30%	1.430.132.036	-	-	-	-	0	30%	1.430.132.036	30%	78,9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan dokumen lingkungan	75 poin		-		-	-	0	0								
11	2.05.2.05. 01.29	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1,50%	449.999.800	1,50%	589.778.400	-	-	-	-	-	1,50%	589.778.400	100%	131,06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
12	2.05.2.05. 01.30	Program Pengendalian	Indeks Kualitas Air	32 poin	999.999.703	49,70 %	792.478.420	-	-	-	-	-	49,70%	792.478.420	153,12	79,25	Dinas Lingkungan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pencemaran dan Perusakan Air																	Hidup dan Kebersihan	
13	2.05.2.05. 01.31	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara	65 poin	1.049.678.916	69,79	923.752.003	-	-	-	-	-	-	69,79	923.752.003	45,36%	88,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
14	2.05.2.05. 01.32	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0,93%	3.289.979.749	0,1%	635.015.183	0,51%	-	-	-	-	-	0,1%	635.015.183	11%	19,30	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
15	2.05.2.05. 01.33	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33,49 %	12.186.479.338	-	-	100%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
16	2.05.2.05. 01.34	Program Pencegahan dampak lingkungan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	100%	7.329.594.455	-	-	1,16 poin	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
17	2.05.2.05. 01.36	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	43,48 %	5.954.130.339	-	-	41,30%	-	-	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
18	2.05.2.05. 01.37	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO2	0,43 poin	6.064.742.206	-	-	59,01 poin	-	-	73.500.000	0	-	0	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
	2.06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
1	2.06.2.06. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	9.701.701.171	100%	9.322.706.024	100%	7.185.862.330	100%	843.630.182	100%	11,74	200%	10.166.336.20 6	200%	104,79	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil		
2	2.06.2.06. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Peningkatan Sarana dan	100%	1.280.088.960	100%	1.370.535.010	100%	702.754.330	100%	238.986.000	100%	34,01	200%	1.609.521.010	200%	125,74	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil		
3	2.06.2.06. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	122.341.601	100%	58.080.000	100%	52.250.000	100%	-	100%	-	200%	58.080.000	200%	47,47	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil		
4	2.06.2.06. 01.05	Program Peningkatan	- Cakupan Peningkatan	100%	178.114.978	100%	235.048.000	100%	22.400.000	100%	7.400.000	100%	33,04	200%	242.448.000	200%	136,1 2	Dinas Kependuduk		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur																an dan Pencatatan Sipil	
5	2.06.2.06.01.21	Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	- Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	75%	2.922.323.898	-	-	60%	10.007.283.529	60,47%	2.715.137.000	100,78%	27,13	60%	10.007.283.529	80%	342,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6	2.06.2.06.01.22	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96,50 %	1.986.880.000	-	-	97,25%	730.254.000	95,60%	474.729.538	98,30%	65,01	97,25%	730.254.000	101%	36,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
7	2.06.4.05.07.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80,50 Nilai	6.109.027.021	80,60 Nilai	1.809.958.200	80 Nilai	1.117.354.907	80,81 Nilai	199.805.850	0	17,88	80	2.009.764.050	100	32,90	Kecamatan Sukasari		
8	2.06.4.05.08.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	5.626.132.470	82,6%	872.173.150	-	925.932.000	0	17.637.500	-	1,90	82	889.810.650	100%	15,82	Kecamatan Cidadak		
9	2.06.4.05.09.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	7.692.537.109		1.513.216.000	76.50 Nilai	1.504.581.600		176.600.000	0	11,74	0	1.513.216.000	100%	19,67	Kecamatan Sukajadi		
10	2.06.4.05.10.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	85	11.913.248.900	85,86	1.905.138.850	0%	2.065.901.000	0	213.050.000	-	10,31	85,86	2.118.188.850	100	17,78	Kecamatan Cicendo		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	78 Nilai		78,64		79 Nilai		0		100,82%	100%							
11	2.06.4.05.11.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,5	8.308.440.120		1.785.062.100	81,5	1.776.447.500		-	0	-	0	1.785.062.100	0	21,48	Kecamatan Andir		
12	2.06.4.05.12.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	85 Nilai	15.087.937.007	87,15 Nilai	11.654.315.000	82 Nilai	3.398.666.900	-	331.885.000	-	9,77	87	11.986.200.000	102,35	79,44	Kecamatan Coblong		
13	2.06.4.05.13.20	Program Pengadministrasi Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	6.327.704.053	77,45	1.016.839.500	78	971.074.000	-	45.979.000	-	4,73	77,45	1.062.818.500	3,90%	16,80	Kecamatan Bandung Wetan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Kependudukan dan Pemerintahan	terhadap pelayanan publik																	
14	2.06.4.05.14.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	2.796.120.857	78,64	1.070.610.000	79 Nilai	1.077.360.000		59.907.128	0	5,56	1,0082	1.070.610.000	1,01	38,29	Kecamatan Sumur Bandung		
15	2.06.4.05.15.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	16.596.717.678	0,8656	2.643.914.600	84,34	2.664.252.000		169.325.750	0,00	6,36	6,01	2.813.240.350	7,69	16,95	Kecamatan Cibeunying Kidul		
16	2.06.4.05.16.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81	9.242.179.617	86,56	1.721.268.220	81	1.797.285.000	0	190.881.250	0%	10,62	86,56	1.912.149.470	106,86 %	20,69	Kecamatan Cibeunying Kaler		
17	2.06.4.05.17.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	83 Nilai	9.234.183.047	84,08 nilai	1.398.510.050	82,25 nilai	1.483.958.500	83,24 Nilai	5.662.500	83,24 Nilai	0,38	83,24 Nilai	1.404.172.550	100,29	15,21	Kecamatan Astanaanyar		
18	2.06.4.05.18.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	11.354.984.247	81 nilai	1.803.187.200	83,7 Nilai	1.723.088.000		219.500.000	0	12,74	81	2.022.687.200	100%	17,81	Kecamatan Bojongloa Kaler		
19	2.06.4.05.19.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,2 Angka	7.692.537.109		901.480.540	80,20 Nilai	540.373.500	80,65 Nilai	-	-	-	0	901.480.540	0	11,72	Kecamatan Bojongloa Kidul		
20	2.06.4.05.20.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	82 Angka	2.823.072.642	82,53	1.731.156.000	84	1.734.038.000		-	0	-	82,53	1.731.156.000	100,65	61,32	Kecamatan Babakan Ciparay		
21	2.06.4.05.21.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	82 nilai	12.416.938.704	82,60 nilai	2.232.524.266	81 Nilai	2.422.465.000	-	263.982.500	0	10,90	81 Nilai	2.496.506.766	98,78%	20,11	Kecamatan Bandung Kulon		
22	2.06.4.05.22.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,55 %	10.029.283.722	83,48 nilai	1.752.709.000	80	1.951.239.200		139.405.500	0	7,14	83	1.892.114.500	100%	18,87	Kecamatan Regol		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		dan Pemerintahan																		
23	2.06.4.05.23.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	80,66	9.730.437.393	82,11 Nilai	2.122.363.200	100%	2.097.978.300	37%	528.955.000	37%	25,21	2,11 Nilai	2.651.318.200	100%	27,25	Kecamatan Lengkung		
24	2.06.4.05.24.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,00	14.419.952.830	82,33	2.586.110.942	100,00	2.608.619.800	0,00	289.705.000	0,00%	11,11	82,33	2.875.815.942	101,64 %	19,94	Kecamatan Batununggal		
25	2.06.4.05.25.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	83,5 Nilai	8.619.346.610	85,96 nilai	1.511.922.500	83,2	1.555.673.700		204.138.800	0	13,12	85,96 nilai	1.716.061.300	100%	19,91	Kecamatan Ujungberung		
26	2.06.4.05.27.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81 Nilai	6.991.234.327	80,87 Nilai	1.376.457.618		1.406.977.250		143.020.000	-	10,17	80	1.519.477.618	100%	21,73	Kecamatan Arcamanik		
27	2.06.4.05.28.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	2.206.017.946	81,77	1.436.684.000	82,21	1.475.764.600		-	0	-	81,77	1.436.684.000	104,83	65,13	Kecamatan Cibiru		
28	2.06.4.05.29.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80,00	9.234.797.814	83,61 %	614.205.733.418	80	1.691.596.000	83,29	114.300.000	104,11%	6,76	83,61	614.320.033.418	105%	6.652 ,23	Kecamatan Antapani		
29	2.06.4.05.30.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	84	8.526.638.223		1.986.029.225	81	1.785.600.000		-	0	-	0	1.986.029.225	0	23,29	Kecamatan Rancasari		
30	2.06.4.05.31.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	8.205.156.689	79,41 nilai	1.704.154.617	80 nilai	1.778.774.600		120.925.000	0	6,8	79	1.825.079.617	100%	22,24	Kecamatan Buahbatu		
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	55%		66,00 %							-	66	120					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
31	2.06.4.05.32.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,2 %	1.530.663.842	88,78	998.205.000	84	1.025.779.400		-	0	-	88,78	998.205.000	109,33	65,21	Kecamatan Bandung Kidul		
32	2.06.4.05.33.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	84,10	2.571.610.370	84,51	1.744.212.400	83,50	1.654.546.350		-	0	-	84	85	100	-	Kecamatan Gedebage		
33	2.06.4.05.34.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	-	-	78,00	48.994.700	83,4	911.825.000	83,71	-	0	-	78	65.257.700	-	-	Kecamatan Panyileukan		
34	2.06.4.05.35.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78,00 %	3.148.470.898	84,16 Nilai	564.278.500	100,00%	597.528.500	0,00	40.874.750	0,00%	6,84	84	605.153.250	107,69	19,22	Kecamatan Cinambo		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78,00 %		100%		100,00%		0		0		100		128,21				
35	2.06.4.05.36.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,2 Angka	7.692.537.109		901.480.540	81	1.691.154.000	81,07	-	100,08 %	-	0	901.480.540	0	11,72	Kecamatan d		
	2.07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
1	2.07.2.02.01.23	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhan Hak Lanjut Usia	- Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	85%	5.158.377.287	19%	1.370.485.310	19%	965.998.525	19%	110.901.750	100%	11,48	38%	1.481.387.060	40%	28,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	2.07.2.02.01.24	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	- Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	100%	6.475.314.979	42%	1.249.282.837	56%	998.745.593	56%	152.350.000	100%	15,25	98%	1.401.632.837	40%	21,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
3	2.07.2.02.01.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	28%	9.846.836.121	20%	3.120.795.704	2%	2.359.324.654	0%	-	0%	-	20%	3.120.795.704	20%	31,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan,		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		dan Partisipasi Masyarakat	pembangunan, melalui swadaya murni masyarakat																Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
4	2.07.4.05.07.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,40 %	7.600.000.000	100%	7.127.031.472	79%	5.199.999.998	45,60%	316.722.600	0	6,09	100	7.443.754.072	125	97,94	Kecamatan Sukasari		
5	2.07.4.05.07.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	4.836.625.623		-	75%	1.736.546.395	59,62%	248.262.400	0	14,30	0	248.262.400	0	5,13	Kecamatan Sukasari		
6	2.07.4.05.08.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	65,5%	25.757.879.148	100%	3.676.838.378		4.523.190.730	0,00%	155.810.220	-	3,44	100	3.832.648.598	100%	14,88	Kecamatan Cidadap		
7	2.07.4.05.08.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	56%	5.000.887.334	100%	699.453.880		1.423.108.500	0,00%	173.467.350	-	12,19	100	872.921.230	100%	17,46	Kecamatan Cidadap		
8	2.07.4.05.09.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	72%	41.087.008.138		6.330.999.886	70,50%	7.624.961.220		281.747.210	0	3,70	0	6.330.999.886	100%	15,41	Kecamatan Sukajadi		
9	2.07.4.05.09.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.450.000.000		-	70,50%	1.884.434.600		218.821.360	0	11,61	0	-	100%	-	Kecamatan Sukajadi		
10	2.07.4.05.10.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	54,54 %	694.145.800	54,54	643.141.050	-	-	-	-	-	-	54	643.141.050	99,01	92,65	Kecamatan Cicendo		
11	2.07.4.05.10.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	69,00 %	50.053.814.151	-	6.995.603.312		8.785.066.396	0	137.915.450	-	1,57	0	7.133.518.762	0	14,25	Kecamatan Cicendo		
			Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80%		97,86 %		24,87%			0		154,64%		100%					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
12	2.07.4.05.10.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan	80%	5.080.487.541	96,98 %	1.220.273.650	25%	845.099.500		257.558.500	0	30,48	0,00%	1.477.832.150	100%	29,09	Kecamatan Cicendo	
								0%		0		-	0,00		-				
13	2.07.4.05.11.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	0,765	48.775.469.451		6.882.769.000	76,10%	8.422.683.831		-	0	-	0	6.882.769.000	0	14,11	Kecamatan Andir	
14	2.07.4.05.11.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,72	16.383.751.641		-	70,00%	2.122.995.000		-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Andir	
15	2.07.4.05.12.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	57.728.149.497	100%	17.400.588.278	100%	11.171.239.140	47%	450.056.050	47%	4,03	100	17.850.644.328	100	30,92	Kecamatan Coblong	
16	2.07.4.05.13.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	67,50 %	28.647.210.591	67,63 %	3.628.627.539	65,25%	5.319.562.346	-	74.474.000	-	1,40	68%	3.703.101.539	100,19%	12,93	Kecamatan Bandung Wetan	
17	2.07.4.05.13.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	77,75 %	2.102.530.732	67,63 %	2.061.792.052	20%	1.385.680.820	-	144.824.640	-	10,45	68%	2.206.616.692	86,98%	104,95	Kecamatan Bandung Wetan	
18	2.07.4.05.14.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80%	31.270.220.240	100%	4.353.974.504		5.825.000.001		503.607.580	-	8,65	100	-	125	0	Kecamatan Sumur Bandung	
			Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%				24,87%			0		1,5464		1,55				
19	2.07.4.05.14.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.080.487.541	0%	2.440.547.300		845.099.500		257.558.500	-	30,48	0	-	0	0	Kecamatan Sumur Bandung	
			Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan	100%				25%			0		100		100				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5x100%	12	13									
			pengecahan tindak pidana																		
20	2.07.4.05. 15.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	629.351.042	100	628.950.900	0%	-	0	-	-	-	100,00	628.950.900	100	99,94	Kecamatan Cibeunying Kidul			
21	2.07.4.05. 15.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	65.7%	72.901.417.831	100	10.286.621.930	75%	12.636.916.300		141.859.700	0,00	1,12	100,00	10.428.481.63 0	152,21	14,30	Kecamatan Cibeunying Kidul			
22	2.07.4.05. 15.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan			-		-	16,67%	2.794.118.920		260.818.500	0	9,33	0	-	-	-	Kecamatan Cibeunying Kidul			
23	2.07.4.05. 16.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	78%	1.838.044.679	100%	575.324.822	-	-	-	-	-	-	100%	575.324.822	128%	31,30	Kecamatan Cibeunying Kaler			
24	2.07.4.05. 16.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	82%	39.016.112.303	100%	5.203.044.768	81%	6.601.659.590	0%	271.178.765	0%	4,11	100%	5.474.223.533	122%	14,03	Kecamatan Cibeunying Kaler			
			- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,75 %		82,33 %		20,00%		5,00%		25,00%				87,33%			108,15%		
25	2.07.4.05. 16.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	77%	12.765.722.582	0%	-	75%	1.828.351.104	0%	292.112.500	0%	15,98	0%	292.112.500	0%	2,29	Kecamatan Cibeunying Kaler			
			- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80,00 %		0,00%		20%		5%		25,00%				5,00%			6,25%		
26	2.07.4.05. 17.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	276.330.000	21 Unit	252.936.900	1 Unit	207.548.000	-	7.425.000	0	3,58	21	252.936.900	2100	91,53	Kecamatan Astanaanyar			
			Persentase Partisipasi Lembaga	100%		100,00%		100%		-		0				100			100		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13								
			Kemasyarakatan dalam Pembangunan																	
27	2.07.4.05.17.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	79%	43.186.372.207	75,00 %	5.173.254.806	79%	7.664.506.480	-	182.287.800	0	2,38	75	5.355.542.606	94,94	12,40	Kecamatan Astanaanyar		
28	2.07.4.05.17.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.973.468.925		-		1.948.964.900	100%	247.930.400	100%	12,72	100%	247.930.400	100%	4,15	Kecamatan Astanaanyar		
29	2.07.4.05.18.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan		563.265.052	100,00%	535.868.900		-		-	0	100	535.868.900	-	95,14	Kecamatan Bojongloa Kaler			
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/kecamatan			4 unit						-	4		-					
30	2.07.4.05.18.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	86%	38.477.763.309	64,79 %	5.819.313.100	50%	7.359.099.740		528.813.120	0	7,19	64	6.348.126.220	100%	16,50	Kecamatan Bojongloa Kaler		
31	2.07.4.05.18.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	7.033.209.501	100,00%	-	75%	1.934.895.690		258.899.400	0	13,38	100	258.899.400	100%	3,68	Kecamatan Bojongloa Kaler		
32	2.07.4.05.19.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	41.087.008.138		5.976.437.892	90%	7.300.000.000	30%	-	33,36 %	-	0	5.976.437.892	0	14,55	Kecamatan Bojongloa Kidul		
33	2.07.4.05.19.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	87%	5.450.000.000		-	80%	2.380.345.400	35%	-	43,65 %	-	0	-	0	-	Kecamatan Bojongloa Kidul		
34	2.07.4.05.20.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan	82,50 %	9.200.000.000	50%	6.164.348.613	79,00%	8.583.468.675		-	0	-	0,9231	6.164.348.613	1,13	67,00	Kecamatan Babakan Ciparay		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			lembaga kemasyarakatan																	
35	2.07.4.05. 20.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan	100%	3.998.488.307	51,53 %	-	50%	2.533.627.580	-	-	0	-	0,5153	-	0,52	-	Kecamatan Babakan Ciparay		
36	2.07.4.05. 21.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	80%	190.317.400	80,00 %	70.965.000	-	-	-	-	-	-	80	-	0,00%	-	Kecamatan Bandung Kulon		
37	2.07.4.05. 21.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	90%	37.320.436.659	83,17 %	6.524.459.311	83,5%	10.638.542.532	-	588.234.600	0	5,53	83,5%	7.112.693.911	92,78%	19,06	Kecamatan Bandung Kulon		
38	2.07.4.05. 21.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	8.337.692.159	100,00%	1.781.389.124	100%	2.855.563.500	-	400.303.771	0	14,02	100%	2.181.692.895	100,00%	26,17	Kecamatan Bandung Kulon		
39	2.07.4.05. 22.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	75	91.958.500	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	133,33	-	Kecamatan Regol		
40	2.07.4.05. 22.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80%	52.651.117.615	93,83%	7.548.928.721		9.234.767.640		161.115.500	-	1,74	93	7.710.044.221	100%	14,64	Kecamatan Regol		
41	2.07.4.05. 22.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	57%	4.762.643.653	100,00%	-		2.138.243.400		361.318.000	-	16,90	100	361.318.000	100%	7,59	Kecamatan Regol		
42	2.07.4.05. 23.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan		1.153.964.683	4 Unit	264.922.300		122.289.000		5.000.000	-	4,09	4	-	-	0	Kecamatan Lengkong		
			Persentase partisipasi lembaga	100%		100,00%		100%		47%		47%		100%		100%				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			kemasyarakatan dalam pembangunan																
43	2.07.4.05.23.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	47.356.992.751	70,11 %	8.424.704.952	100%	4.298.348.917	28%	533.054.850	28%	12,40	70%	8.957.759.802	70%	18,92	Kecamatan Lengkong	
44	2.07.4.05.24.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	-Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	20,00 %	261.692.000	20,00 %	235.388.000		-		-	-	-	20,00%	235.388.000	100,00%	89,95	Kecamatan Batununggal	
45	2.07.4.05.25.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	75%	73.205.000	120,00%	70.965.000	-	-		-	0	0	75%	70.965.000	100%	96,94	Kecamatan Ujungberung	
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	15 LKK		18 LKK		-		-		15 LKK		100%					
46	2.07.4.05.25.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Unggul	85%	49.694.125.106	98,90 %	6.940.069.938	80%	8.489.467.150		161.033.750	0	1,90	75%	7.101.103.688	100%	14,29	Kecamatan Ujungberung	
47	2.07.4.05.25.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50%	3.525.116.286	100,00%	-	40%	1.652.807.430		219.054.000	0	13,25	N/A	219.054.000	0	6,21	Kecamatan Ujungberung	
48	2.07.4.05.26.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	439.967.000	50,00 %	-		-		-	0	0	50	-	100	0	Kecamatan Kiaracondong	
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/kecamatan	1 Unit		3Unit				-		3		300					
49	2.07.4.05.26.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	81,00 %	69.722.239.416	100,00%	9.433.296.653	80,25%	12.420.653.164		84.660.800	0	0,68	100	9.517.957.453	100%	13,65	Kecamatan Kiaracondong	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
50	2.07.4.05. 26.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	78,00 %	11.613.992.004	84,71%	-	50,00%	2.732.237.720		198.743.040	0	7,27	84	198.743.040	100%	1,71	Kecamatan Kiaracandong	
51	2.07.4.05. 27.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		179.996.528	100,00%	-		-		-	-	-	100	-	-	-	Kecamatan Arcamanik	
52	2.07.4.05. 27.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,20 %	42.938.069.086	97,95 %	6.073.122.723		7.574.616.066		508.049.700	-	6,71	97	6.581.172.423	100%	15,33	Kecamatan Arcamanik	
53	2.07.4.05. 27.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.587.481.410	0,00%	-		2.855.563.500		255.642.000	-	8,95	0	-	100%	-	Kecamatan Arcamanik	
54	2.07.4.05. 28.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	-	50%	496.099.300	0	-		-	-	-	0,5	496.099.300	1	1,00	Kecamatan Cibiru	
55	2.07.4.05. 28.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	94%	10.992.825.415	62,12 %	6.391.785.978	87,35	7.760.001.059		-	0	-	0,6212	6.391.785.978	0,66	58,15	Kecamatan Cibiru	
56	2.07.4.05. 28.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	1.195.739.574	0	-	50	1.973.059.750		-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Cibiru	
57	2.07.4.05. 29.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	472.448.200	4 Unit	300.815.221.20 4	70%	135.832.200	50%	5.400.000	71,43%	3,98	1 Unit	300.820.621.2 04	100%	63.672,72	Kecamatan Antapani	
58	2.07.4.05. 29.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,20 %	45.991.229.414	88,49 %	158.601.614.55 1	50%	8.738.464.540	32,33	534.599.903	64,66	6,12	121	159.136.214.4 54	11034%	346,01	Kecamatan Antapani	
59	2.07.4.05. 29.28	Program Peningkatan Peran	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat	80%	4.687.806.297	100,00%	-	50%	-	0%	-	-	-	100	-	125	-	Kecamatan Antapani	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan																	
60	2.07.4.05. 30.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	79%	41.909.944.682		6.320.946.634	50%	7.031.886.899		-	0	-	0	6.320.946.634	0	15,08	Kecamatan Rancasari		
61	2.07.4.05. 30.27	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU)	-		-	157.523.360		-	287.273.011		-	-	-	0	157.523.360	-	-	Kecamatan Rancasari		
62	2.07.4.05. 30.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50%	9.852.754.484		-	20%	-		-	0	-	0	-	0	-	Kecamatan Rancasari		
63	2.07.4.05. 31.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80%	33.062.826.543	75,00 %	6.479.219.874	80 angka	8.074.941.445		239.208.250	0	2,96	75	6.718.428.124	100%	20,32	Kecamatan Buarbatu		
64	2.07.4.05. 31.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80%	5.829.253.039	100,00%	-		1.575.808.800		268.294.000	-	17,03	100	268.294.000	100%	4,6	Kecamatan Buarbatu		
			Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	50%		100,00%		0		0		0%		0,00%		0				
65	2.07.4.05. 32.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	82,50 %	9.200.000.000	100%	4.362.976.279	79,00%	5.376.405.100		-	0	-	100	4.362.976.279	121,95	47,42	Kecamatan Bandung Kidul		
66	2.07.4.05. 32.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan	80%	1.560.828.512	96,76 %	1.012.696.975	50%	1.687.224.450		-	0	-	96.76%	1.012.696.975	120,95	64,88	Kecamatan Bandung Kidul		
67	2.07.4.05. 33.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80,00 %	9.600.000.000	64,88 %	5.025.641.785	50%	6.303.602.560		-	0	-	64	1	80	-	Kecamatan Gedebage		
68	2.07.4.05. 33.28	Program Peningkatan	Persentase Peran Kelembagaan,	75%	2.098.169.500	75%	1.933.883.068	75%	1.196.573.800		-	0	-	75	1	100	-	Kecamatan Gedebage		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan																	
69	2.07.4.05.34.22	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	84,07 %	4.432.528.700	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Panyileukan		
70	2.07.4.05.34.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	75%	273.644.000	-	-	0	-	-	-	0,75	273.644.000	-	-	Kecamatan Panyileukan		
71	2.07.4.05.34.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan		-	-	24%	-	50,00%	5.824.676.380	-	28.752.700	-	0,49	-	-	-	-	Kecamatan Panyileukan		
72	2.07.4.05.34.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Unggul	-	-	-	-	4 Kelurahan	1.617.261.400	-	38.750.000	0	2,40	7 4%	38.750.000	-	-	Kecamatan Panyileukan		
73	2.07.4.05.35.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan / kecamatan	1 unit	397.488.800	1 unit	358.150.414	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	1	358.150.414	100	90,1	Kecamatan Cinambo		
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan / kecamatan	100,00%			100%		0,00%		0			-	100		100			
74	2.07.4.05.35.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemnberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,20 %	24.488.332.580	88,93 %	3.309.337.740	100,00%	4.235.956.360	0,00	36.770.600	0,00%	0,87	88,93%	3.346.108.340	110,89%	13,66	Kecamatan Cinambo		
			Tingkat Pemnberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,20 %			85,17 %		100,00%		0		0		0,8517		1,06			
75	2.07.4.05.35.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	80,00 %	3.830.338.761	0,00%	-	100,00%	1.445.963.700	0	210.109.250	0	14,53	0	-	0	0	Kecamatan Cinambo		
			Persentase peran kelembagaan	80,00 %			0,00%		100,00%		0,00		0,00%		0,00%		0,00%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
			dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan																	
76	2.07.4.05. 36.26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	41.087.008.138		5.976.437.892	77%	7.811.752.170	-	-	-	-	0	5.976.437.892	0	14,55	Kecamatan Mandalajati		
77	2.07.4.05. 36.28	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan, masyarakat, dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	87%	5.450.000.000		-	75%	1.480.912.400	-	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Mandalajati		
	2.08	Usuran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
1	2.08.2.08. 01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	17.872.870.513	20%	3.748.377.774	20%	2.552.828.258	5%	374.984.506	25%	14,69	25%	4.123.362.280	25%	23,07	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	2.08.2.08. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	4.279.041.839	20%	912.375.650	20%	1.215.739.700	5%	180.990.000	25%	14,89	25%	1.093.365.650	25%	25,55	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana		
3	2.08.2.08. 01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	568.802.370	20%	127.480.000	20%	221.250.000	5%	-	25%	-	25%	127.480.000	25%	22,41	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana		
4	2.08.2.08. 01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	100%	607.463.156	20%	136.450.000	20%	172.064.000	5%	115.660.900	25%	67,22	25%	252.110.900	25%	41,50	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana		
5	2.08.2.08. 01.08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi	100%	626.193.640	20%	130.052.967	20%	148.428.000	5%	-	25%	-	25%	130.052.967	25%	20,77	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana		
6	2.08.2.08. 01.15	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB Aktif	74,5%	32.411.345.291	75,28 %	3.350.140.800	73%	5.102.136.200	75%	-	103%	-	150%	3.350.140.800	201,87%	10,34	Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	2.08.2.08.01.27	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu	100%	3.809.998.248	100,00%	505.392.800	100%	633.550.000	100%	-	100%	-	200%	505.392.800	200,00%	13,26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
8	2.08.2.08.01.28	Program Promosi Keluarga Berencana	- Jumlah peserta KB Baru- Jumlah Kampung KB Aktif	- 3040 Pasangan Akseptor- 58 kampung KB	3.423.987.040	3,062 Pasangan ; 20 Kampung KB	783.682.980	2625 Pasangan Akseptor , 31 Kampung KB Aktif	2.234.848.000	Pasangan Akseptor 656, 8 Kampung KB Aktif	359.349.000	0,25% Pasangan Akseptor, 0,26% Kampung KB Aktif	16,08	3	1.143.031.980	-	33,38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	2.08.2.08.01.29	Program Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok tribina aktif	86,26 %	3.592.937.930	71,07 %	787.699.000	75%	1.847.020.800	72%	285.344.450	97%	15,45	143%	1.073.043.450	200,77%	29,87	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.09		Urusan Perhubungan																		
1	2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	41.019.302.682	92,50 %	6.561.526.300	100%	7.757.992.599	17,50%	-	17	-	92,50%	6.561.526.300	92,50%	16,00	Dinas Perhubungan		
2	2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana-Prasarana Aparatur	100%	39.935.521.5s00	100%	6.861.429.538	100%	6.188.453.470	4,17%	-	4	-	100%	6.861.429.538	100,00%	17,18	Dinas Perhubungan		
2.16		Urusan Komunikasi dan Informatika																		
1	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	17.956.963.776	20%	4.989.197.853	100,00%	3.168.149.090	50%	1.223.560.218	50	38,62	70	6.212.758.071	70	34,60	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi Masyarakat	100%	16.627.848.062	100,00 %	4.623.211.420	100,00%	1.765.514.800	50%	676.458.564	25	38,32	150	5.299.669.984	150	31,87	Dinas Komunikasi dan Informatika		
3	2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Berbasis E-Government	73%	105.961.941.100	-	23.972.707.945	70%	29.370.161.074	35%	5.526.255.510	50	18,82	35	29.498.963.455	48	27,84	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.17		Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah																		
1	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	14.273.758.495	0	0	100,00	14.273.758.495	50%	5.229.257.885	50	36,64	50	5.229.257.885	50	36,64	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
2	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	190 Koperasi	1.331.608.200	0	0	190 Koperasi	1.331.608.200	75	272.258.000	39,47	20,45	75	272.258.000	39,47	20,45	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
3	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	110 Koperasi	386.709.400	0	0	110 Koperasi	386.709.400	50	99.666.000	45,45	25,77	50	99.666.000	45,45	25,77	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
4	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	60%	2.211.696.650	0	0	60%	2.211.696.650	60	142.593.700	100	6,45	60	142.593.700	100	6,45	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
5	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	40 Koperasi	2.942.174.990	0	0	40 Koperasi	2.942.174.990	15	183.140.000	37,5	6,22	15	183.140.000	37,5	6,22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
6	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	240 UM	3.519.043.100	0	0	240 UM	3.519.043.100	110	188.585.000	45,83	5,36	110	188.585.000	45,83	5,36	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
7	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang nilai omzetnya meningkat	3,2%	5.769.867.650	0	0	3,2%	5.769.867.650	2	952.379.000	50	16,51	2	952.379.000	50	16,51	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
			Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15 %		100,00%		0,00%		0		-		100		116,28				
	2.18	Usuran Penanaman Modal																		
1	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,25	29.602.223.372	80,43	20.466.137.239	80,21	24.464.647.415	81,99	10.514.880.846	102,22	42,98	81,47	30.981.018.085	101,52	1,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	2.18.	Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	7,25 Triliun	900.744.933	18,263	1.907.972.610	6,1 Triliun	744.417.300	6,3	121.921.800	103,28	16,38%	24,563	2.029.894.410	338,80	2,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
3	2.18.	Program Pengembangan	Realisasi Investasi	7,25 Triliun	389.317.500	18,263	1.133.429.560	6,1 Triliun	321.750.000	6,3	-	-	0%	24,563	1.133.429.560	-	2,91	Dinas Penanaman		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Iklm Penanaman Modal	PMDN/PMA (LKPM)																Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	2.18.	Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Ketaatan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM	50%	531.012.130	200 Perusa haan	498.177.752	30%	438.853.000	7,5	-	-	0%	200 Perusaha an	498.177.752	-	0,94	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
5	2.18.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,25	1.047.183.500	80,43	3.437.101.500	80,21	951.985.000	81,99	287.170.000	102,22	30,17%	81,47	3.724.271.500	101,52	3,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
6	2.18.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,25	3.035.345.500	80,43	731.657.500	80,21	2.508.550.000	81,99	199.844.600	102,22	7,97%	81,47	931.502.100	101,52	0,31			
	2.19	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga																		
1	2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	100%	18.995.570.633	32%	5.670.794.986	-	-	32%	5.670.794.986	-	-	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
2	2.19.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-	-	-	0,042%	18.408.759.550	0,003 5%	846.504.825	-	-	0,0035%	846.504.825	-	-	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
3	2.19.	Proram Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	-	-	-	67.036.202.507	22%	-	-	-	22%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
4	2.19.	Proram Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	-	-	-	-	494.702.000	-	1.275.790.000	-	-	-	1.275.790.000	-	-	Dinas Pemuda dan Olah Raga		
	2.20	Urusan Statistik																		
1	2.20.2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Layanan Data dan Informasi	75%	3.652.988.513	-	2.176.737.450	55%	445.997.300	27,5%	181.696.800	50	40,74	27,5	2.358.434.250	37	64,56	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2.21	Urusan Persandian																		
1	2.21.2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Cakupan Persentase Persandian dan Aplikasi yang	100%	1.150.000.000	-	96.730.258	100%	105.700.000	100	31.242.000	100	29,56	100	127.972.258	100	11,13	Dinas Komunikasi dan Informatika		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pengamanan Informasi	Terkendali dan Aman																	
Urusan Kebudayaan																				
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.200	81.681.528.858	-		400	26.179.977.198	100	5.229.018.205	200	9.271.93 8.387	200	9.271.938.387	16.67%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
2		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	4.00	20.469.259.200	-		1.05	6.560.660.000	-	-	-	145.875. 000	-	145.875.000	0%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
3		Program Pembinaan Sejarah	Persentase data dan informasi sejarah yang dapat diakses	60	1.161.700.800	-		20	372.340.000	-	-	-	21.400.0 00	-	21.400.000	0%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
4		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya memenuhi kriteria pemajuan	4.00	6.379.392.240	-		1.05	2.044.677.000	-	--	-	98.200.0 00	-	98.200.000	0%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
5		PROGRAM PENGEMBANGA N KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian memenuhi kriteria pemanfaatan	8.10%	5.813.691.000	-		13.79	1.863.362.500	-		-	10.400.0 00	-	10.400.000	0%		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
Urusan Perpustakaan																				
1	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	61.116.563.079	0	0	100%	18.592.218.453	25%	4.912.312.678	50%	7.601.86 5.498	50%	12.514.178.17 6	50%	20.48 %	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan		
2	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pemustaka Pertahun	7.00	10.907.960.585	0	0	6.01	2.301.789.060	0.46	37.950.000	0.46	37.950.0 00	0.46	75.900.000	6.57%	69.58 %	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan		
3	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno	100%	364.109.103	0	0	100%	110.002.750	50%	0	50%	0	50%	0	0%	0%	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan		
Urusan Kearsipan																				
1	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Prosentase Perangkat Daerah yang Tidak Dilakukan Pengawasan Kearsipan	100%	3.082.629.414	0	0	100%	931.307.980	50%	263.728.700	50%	263.728. 700	50%	527.457.400	50%	1711. 06%	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan		
2	2.24.03	Program Perlindungan	Cakupan Kegiatan	100%	895.967.118	0	0	100%	270.684.930	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	Dinas Perpustakaa		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5x100%		12	13	
		dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip																n dan Kearsipan	
3	2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Nilai Kualitas Pelayanan Kearsipan	84%	448.358.698	0		83.50	135.455.800	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
3		Urusan Pilihan																		
3.01		Urusan Kelautan dan Perikanan																		
1	3.01.2.03. 01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	- Tingkat Konsumsi Ikan	38,02 kg/kap /th	5.640.158.722	40,23 kg/ka pita/th n -	1.150.720.712	37,97	1.263.199.613	0	70.914.510	0	5,61	40,23 kg/kapita /thn -	1.061.493.669	105,81%	18,82	Dinas Pangan dan Pertanian		
			- Produksi Ikan Hias	1.422. 000 ekor		1.823. 200 ekor		1272000 ekor		-		0		1.823.200 ekor		128,21%				
			- Produksi Ikan Konsumsi	2.972 ton		2.981, 27 ton		2970.5 ton				0		2.981,27 ton		100,31%				
2	3.01.2.03. 01.26	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	120 orang	2.232.814.686	240 Orang	307.072.820	270 orang	409.476.770	0	10.420.850	0	2,54	240 Orang	317.493.670	200,00%	14,22	Dinas Pangan dan Pertanian		
3.02		Urusan Pariwisata																		
1		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Brand Awareness Pariwisata	3.81	12.792.000.000			3.60	4.100.000.000	-	-	-	387.780. 000	-	387.780.000	0		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek daya tarik wisata memenuhi standar pariwisata	35	19.002.198.646			35	6.090.448.284	-	-	-	197.885. 000	-	197.885.000	0		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
3		PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekraf meningkat daya saing	10.19	4.037.764.274			4.15	1.294.155.216	-	-	-	10.050.0 00	-	10.050.000	0		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
4		PROGRAM PENGEMBANGA N EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Aktivasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif	12	16.276.684.944			8	5.216.886.200	-	-	-	633.166. 340	-	633.166.340	0		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
5		PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER	Persentase SDM pariwisata dan	10.19	17.333.331.600			4.15	5.555.555.000	-	-	-	314.474. 050	-	314.474.050	0		Dinas Kebudayaan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	ekraf meningkat daya saing																dan Pariwisata	
	3.03	Urusan Pertanian																		
1	3.03.2.03.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	- Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	68,64 kw/ha	9.789.573.464	240 Orang	1.702.821.678	11000 Pohon	2.000.502.164	0	30.470.800	0	1,52	240 Orang	1.733.292.478	99,18%	17,71	Dinas Pangan dan Pertanian		
			- Produktivitas Padi			10.000 Pohon		68.22.00				0		10.000 Pohon		-				
			- Produksi Tanaman Hias			237.000 Pohon		161864 Pohon				0		37.000 Pohon		-				
			- Produksi Tanaman Sayuran			68,08 kw/ha		278400 Pohon				0		68,08 kw/ha		-				
			- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan			155.485 Pohon		270 orang				0		155.485 Pohon		-				
			- Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	68,64 kw/ha		53.869 pohon		11000 Pohon		0		0		53.869 pohon		99,19%				
			- Produktivitas Padi			68,083 kw/ha		68,22 kw/ha				0		68,083 kw/ha		-				
			- Produksi Tanaman Hias			412.144 pohon		161864 Pohon				0		12.144 pohon		-				
			- Produksi Tanaman Sayuran			813.880 pohon		278400 Pohon				0		813.880 pohon		-				
			- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan			102 orang		270 orang				0		102 orang		-				
2	3.03.2.03.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			-	100%	12.000.000		12.000.000	0	-	-	0	100%	12.000.000	-	0	Dinas Pangan dan Pertanian		
						100%				0		-		100%		-				
3	3.03.2.03.01.25	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase kualitas bahan baku tembakau	100%	1.685.466.019	100,00 %	-		300.000.100	0	-	-	0	100%	-	100%	0	Dinas Pangan dan Pertanian		
			Persentase kualitas bahan baku tembakau	100%						0		-		0		0,00%				
4	3.03.2.03.01.27	Program Peningkatan	- Populasi Ternak Domba	39.849 ekor	3.458.857.269	36.793 ekor	656.322.895	37829 ekor	585.484.197	0	-	0	0	36.756 ekor	656.322.895	92,24%	18,98			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Produksi Peternakan	- Populasi Ternak Domba	39.849 ekor		36.756 ekor		37829 ekor		0		0		36.756 ekor		92,24%		Dinas Pangan dan Pertanian	
5	3.03.2.03. 01.28	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	120 orang	2.262.767.995	240 Orang	317.087.129	270 orang	411.626.900	0	-	0	0	240 Orang	317.087.129	200,00%	14,01	Dinas Pangan dan Pertanian	
			- Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	120 orang		85 orang		270 orang		0		0		85 Orang		70,83%			
6	3.03.2.03. 01.29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	- Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	7 Kejadia n	5.254.386.618	0 kasus	1.037.087.669	7 kasus	1.045.003.125	0	24.406.000	0	2,34	0 kasus	1.037.087.669	0%	19,74	Dinas Pangan dan Pertanian	
			- Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	7 Kejadia n		7 kasus		7 kasus		0		0		7 kasus		100,00 %			
Urusan Perdagangan																			
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Keadaan Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	100 %	18.917.067.408	25%	4.562.230.926	50 %	6.988.33 7.950	50%	6.988.337.950	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustria n	
2		Program PengembanganE kspor	Nilai Ekspor	n/a	n/a	n/a	n/a	US\$ 91.28 Juta	4.448.979.700	US\$ 76.72 Juta	74.357.500	US\$ 74.357.5 00	US\$ 168 Juta	US\$ 168 Juta	74.357.500			Dinas Perdagangan dan Perindustria n	
3		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan yang meningkat daya saingnya	n/a	n/a	n/a	n/a	75,79%	2.041.913.790	71,61 %	503.548.000	71,61 %	503.548. 000	71,61%	503.548.000			Dinas Perdagangan dan Perindustria n	
4		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	n/a	n/a	n/a	n/a	15%	6.789.810.380	9,24%	187.125.000	9,24%	187.125. 000	9,24%	187.125.000			Dinas Perdagangan dan Perindustria n	
5		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang melakukan pemasaran online	n/a	n/a	n/a	n/a	600 Pelaku Usaha	433.975.000	0%	0	0	0	0	0			Dinas Perdagangan dan Perindustria n	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
6		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan kepatuhan terhadap aturan	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	52.140.000	0%	0	0%	0	0%	0			Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
7		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah alat UTTP yang terstandarisasi	n/a	n/a	n/a	n/a	121.000 alat UTTP	1.238.806.830	27.510 Alat UTTP	282.785.619	51.148 Alat UTTP	282.785.619	51.148 Alat UTTP	282.785.619			Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
3.07		Urusan Perindustrian																		
1	3.07.3.06.01.15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku IKM non sentra industri yang meningkat daya saingnya	n/a	n/a	n/a	n/a	55%	6.584.786.530	53.57%	419.771.185	-	-	53.57%	419.771.185	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
			Persentase pelaku IKM pada sentra industri yang meningkat daya saingnya	n/a	n/a	n/a	n/a	30%		16.49%		-	-	16.49%		-	-			
1		Urusan Transmigrasi																		
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi (orang)	600	838.480.052	12000	75.526.800		137.194.044	-	-	-	0	12000	-	2000	0	Dinas Tenaga Kerja		
			Jumlah Masyarakat yang Diberikan Penyuluhan Bertransmigrasi			120 orang						-		120		-				
4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																		
4.01		Urusan Perencanaan																		
1	4.01.4.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21.296.065.513		3.387.079.364	100%	4.150.415.285		229.918.689	0	5,54	0	3.616.998.053	0%	16,98	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		
2	4.01.4.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	10.107.452.951		1.559.324.847	100%	2.007.743.867		148.263.942	0	7,38	0	1.707.588.789	0%	16,89	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan		
3	4.01.4.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	1.143.895.011		-	100%	86.212.500		77.708.400	0	90,14	0	77.708.400	0%	6,79	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
4	4.01.4.01. 01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.188.901.627		194.860.000	100%	316.690.000		3.600.000	0	1,14	0	198.460.000	0%	16,69		Pengembang an	
5	4.01.4.01. 01.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sasaran RPJMD yang di Cascade	100%	30.346.855.764	100%	4.105.194.889	50%	5.115.094.200		138.278.000	0	2,7	100%	4.243.472.889	100%	13,98	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an		
			Persentase perangkat daerah yang memiliki perencanaan kinerja terukur	100%		100%		50%				0		100%		100%				
			Persentase rata- rata penyusunan dokumen tepat waktu	100%		100%		N.A				-		100%		100%				
6	4.01.4.01. 01.28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	100%	1.939.656.866	100%	361.373.750	100%	161.680.000	0%	-	0	-	100%	361.373.750	100%	18,63		Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an	
7	4.01.4.01. 01.29	Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	2.526.065.207	100%	546.576.450	100%	501.536.180		108.508.500	0	21,64	100%	655.084.950	100%	25,93		Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an	
8	4.01.4.01. 01.30	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	100%	2.316.993.512	100%	370.749.792	100%	407.137.328	0%	-	0	-	100%	370.749.792	100%	16,00		Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an	
9	4.01.4.05. 10.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	49.791.500	100,00	49.106.750	-	-	-	-	-	-	100	49.106.750	100	98,62		Kecamatan Cicendo	
10	4.01.4.05. 12.31	Program Perencanaan	persentase dokumen	100%	52.452.000	100%	50.268.500	100%	66.419.200	41%	28.609.100	41%	43,07	100	78.877.600	100	150,38		Kecamatan Coblolong	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pembangunan Daerah	perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu																	
11	5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	9.568.500	100%	9.265.750		-		-	-	-	100	-	100	-	Kecamatan Sumur Bandung		
12	4.01.4.05.15.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	46.493.067	100	37.621.800		-		-	-	100,00	37.621.800	100	80,92		Kecamatan Cibeunying Kidul		
13	4.01.4.05.16.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	44.827.000	100%	44.827.000	-	-		-	-	100%	44.827.000	100%	100,00		Kecamatan Cibeunying Kaler		
14	4.01.4.05.17.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	36.983.233	100,00%	31.981.350		-		-	-	100	-	100	-		Kecamatan Astananyar		
15	4.01.4.05.18.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	45.066.000	100,00%	39.003.500		-		-	-	100	-	400	-		Kecamatan Bojongloa Kaler		
16	4.01.4.05.21.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	143.579.647	100,00%	30.851.550	100%	39.136.460		-	0	-	100%	30.851.550	100,00%	21,49		Kecamatan Bandung Kulon	
17	4.01.4.05.22.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	56.341.000	100,00%	-		-		-	-	100	-	100	-		Kecamatan Regol		
18	4.01.4.05.23.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	66.890.372	100,00%	59.366.372	100%	103.341.000	100%	30.861.100	100%	29,86	100%	90.227.472	100%	134,89		Kecamatan Lengkong	
19	4.01.4.05.24.19	Program Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan	20,00 %	60.750.000	20,00%	60.150.000		-		-	-	20,00%	60.150.000	100,00%	99,01		Kecamatan Batununggal		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembangunan Daerah	pembangunan yang disusun tepat waktu																	
20	4.01.4.05.25.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada LKIP	25%	35.208.000	100,00%	34.721.750	-	-	-	-	-	-	25%	34.721.750	100%	98,62	Kecamatan Ujungberung		
21	4.01.4.05.27.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	13.475.000	94,92 %	12.790.000	-	-	-	-	-	-	94	-	376	-	Kecamatan Arcamanik		
22	4.01.4.05.28.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	-	100%	31.639.763	0	-	-	-	-	-	100	31.639.763	100	1,00	Kecamatan Cibiru		
23	4.01.4.05.29.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	51.583.000	25,00 %	3.932.810.328	25%	48.967.750	25%	41.196.000	100%	84,13	100%	3.974.006.328	100%	7.704,10	Kecamatan Antapani		
24	4.01.4.05.30.31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	32.195.000	-	-	-	28.374.000	-	-	-	-	0	-	0	-	Kecamatan Rancasari		
25	4.01.4.05.34.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	-	-	100%	19.027.500	-	-	0	-	-	-	100	19.027.500	-	-	Kecamatan Panyileukan		
26	4.01.4.05.35.19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100,00%	48.038.000	100,00%	45.053.750	0,00%	-	0,00	-	0,00%	0	100,00%	45.053.750	100,00%	93,79	Kecamatan Cinambo		
			Persentase dokumen Perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100,00%		100,00%		0,00%		0		-		100		100				
Urusan Keuangan																				
1		Program Penunjang Urusan	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	88.50	110.534.025.102	-	-	88.40	91.350.433.969	94.09	14.856.429.356	94.09	25.732.229.794	94.09	25.732.229.794	106.32 %	23.28 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Pemerintahan Daerah																		
2		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		17.360.236.993	0	-	2.700.00 0.000.00 0	14.347.303.300	362.1 23.40 7.253	524.647.750	631.10 4.786. 701	524.647. 750	631.104.7 86.701	524.647.750	30.73%	3.02 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset		
Usuran Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																				
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	13.072.010.143		4.908.416.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38%	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan	Tercapai	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik	100%	3.543.774.655		1.626.655.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46%	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase pemuhan sarana	100%	294.173.093		61.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21%	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
4		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat pelaksanaan Pindah/Purna	100%	885.472.975		196.278.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22%	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur memilik kompetensi sesuai bidangnya	100%	804.095.414		561.011.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.309.714.851		3.073.417.254	-	216.343.326.449	41.27%	11.638.191.21 4	65.48 %	24.901.5 11.291		27.974.928.54 5	-	383%	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
7		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	826.355.850	41%	-	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
8		Program Pengembangan Assesment Center	Persentase Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment			-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.837.732	35%	-	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
9		Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai ASN yang datanya akurat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	922.868.500	38%	-	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
10		Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.488.424.352	112%	-	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
11		Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja			-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.864.171.262	50%	-	Badan Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan		
12		Program Kepegawaian Daerah	-			-	-	-	-	52.46%	1.156.001.766	91.57%	1.233.93 6.766	-	1.233.936.766	-	-			
13		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Presentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	74.06 %	307.805.099.645		14.070.336.160	-	-	-	-	-	14.070.3 36.160-	-	-	5%				
14		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-					-	11.562.541.886	36.37%	910.581.548	36.37%	910.581. 548	39.62%	2.051.656.548	-				
	4.04	Urusan Penelitian dan Pengembangan																		
1	4.04.4.01. 01.16	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasika n sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	11.384.003.727	100%	237.592.151	100%	1.994.717.120	0%	-	0	-	100%	237.592.151	100%	2,09	Badan Perencanaan Pembangun an, Penelitian dan Pengembang an		
	4.05	Fungsi Penunjang Lainnya																		
		Sekretariat Daerah																		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Cakupan Pelayanan Adminisrasi Perkantoran	100%	119.837.726.644		-	100%	-	25%	25.229.644.13 6	50%	38.836.9 21.669	50%	38.836.921.66 9	17%	12.94 5,640 .556	Sekretariat Daerah		
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%			-	100%												
2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada	95%	57.814.514.204		-	87%	-	87%	2.401.452.885	87%	2.401.45 2.885	87%	0	87%	-	Sekretariat Daerah		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD																	
3		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	95%	18.310.668.368	-	-	87%	-	87%	4.294.757.500	87%	4.294.75 7.500	87%	0	87%	-	Sekretariat Daerah		
	4.05.04	Sekretariat Dewan																		
1	4.05.4.05. 04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	87.693.729.315	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD		
2	4.05.4.05. 04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	67.626.000.776	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD		
3	4.05.4.05. 04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemuahan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	4.812.841.291	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD		
4	4.05.4.05. 04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	13.322.101.321	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	Sekretariat DPRD		
5	4.05.4.05. 04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	85%	168.917.984.772	86%	35.810.793.724	-	-	-	-	-	-	86	-	101,18	-	Sekretariat DPRD		
		Urusan Pengawasan																		
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	127.838.161.955	0%	-	100%	42.346.053.985	26%	11.029.359.23 0	38.11 %	16.139.9 92.827	25%	16.139.992.82 7	25	12.70	Inspektorat Daerah		
2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Perangkat Daerah yang Tidak Mendapat Temuan Berindikasi Tipikor yang Material	90%	4.241.817.450	0%	-	90%	1.413.939.150	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	Inspektorat Daerah		
3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Sistem Pengawasan Pengendalian Internal	100%	2.067.504.000	0%	-	100%	689.168.000	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	Inspektorat Daerah		
		Urusan Pemerintahan																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	presentase potensi konflik tidak menjadi konflik	-	-	-	-	-	-	-	1.953.317.500	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	presentase potensi konflik tidak menjadi konflik	-	-	-	-	-	-	-	319.200.000	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi ,sosial dan budaya	presentase potensi konflik tidak menjadi konflik	-	-	-	-	-	-	-	33.500.000	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5		program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik	presentase potensi konflik tidak menjadi konflik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kecamatan Sukasari																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Sukasari	85	46,280,047,971	85	46,280,047,971	86.4	11,212,741,581	43%	4,805,026,841	49.77%	42.85	85.61%	12,170,580,853	101%	26.30 %	Kecamatan Sukasari		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	90%	574.223,538,685	0%	918,753,900	50%	2,169,173,749	20%	431,629,450	40.00	19.90	63%	2,290,000,700	70%	0.40%	Kecamatan Sukasari		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	85.00%	26,836,625,623	5%	1,244,096,642	79.30%	4,414,819,500	6%	265,576,100	50%	6.02	54%	3,430,999,432	64%	12.78 %	Kecamatan Sukasari		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	85%	1,005,893,600	26%	261,402,100	50%	512,692,685	27%	137,016,500	84%	26.72	110%	692,654,800	130%	68.86 %	Kecamatan Sukasari		
Kecamatan Cidadap																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPd s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Cidadap	83	2,333,500,904			81.21	1,944,584,087	29.09	565,734,894	35.82	29.09	82.46	386,307,057	87.81	16.55 %	Kecamatan Cidadap		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	75%	2,707,587,936			50%	2,256,323,280	38.72	873,754,400	7,74	38.72	34.06	768,522,400	0	28.38 %	Kecamatan Cidadap		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	86.21%	4,678,002,408			79.3%	3,898,335,340	33.32	1,298,758,740	4,20	33.32	16.73%	1,104,438,115	16.73%	23.61 %	Kecamatan Cidadap		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamlng RW Aktif	65.22%	869,255,192			50%	724,379,327	44.39	321,544,130	8,878	44.39	50%	274,044,130	50%	31.53 %	Kecamatan Cidadap		
Kecamatan Sukajadi																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan Sukajadi	100%	9.248.396.609		1.269.577.888	100%	1.455.840.989		100.356.470	0	6,89	0	1.269.577.888	100%	13,73	Kecamatan Sukajadi		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	5.145.197.761		513.063.650	100%	838.116.490		108.671.050	0	12,97	0	513.063.650	100%	9,97	Kecamatan Sukajadi		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	100%	205.342.006		25.850.000	100%	41.250.000	100%	-	-	-	100	25.850.000	100%	12,59	Kecamatan Sukajadi		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamlng RW Aktif	100%	106.020.000		-	-	-	104,95 0.000	-	-	-	104,95	-	100%	-	Kecamatan Sukajadi		
Kecamatan Cicendo																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	85,87 (Nilai)	44,787,523,851.00		86,53 (Nilai)	-	85,85 (Nilai)	14,929,174,617	85,85 (Nilai)	1,148,555,877	100.00	7.69	85,85 (Nilai)	1,148,555,877	99.98%	2.56%	Kecamatan Cicendo	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100	14,984,401,446.00		83.33%	100%	4,994,800,482	100%	1,830,858,700	100.00	36.66	100%	1,830,858,700	0%	12.22 %	Kecamatan Cicendo		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	81.70%	21,863,158,140.00		80.07%	81.60%	7,287,719,380	35.87%	2,438,136,715	43.96	33.46	35.87%	2,438,136,715	43.90%	11.15 %	Kecamatan Cicendo		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamlng RW Aktif	100%	1,830,858,700		100%	1,830,858,700	0%	1,830,858,700	37.50%	534,011,750	-	29.17	37.50%	534,011,750	52%	15.09 %	Kecamatan Cicendo	
Kecamatan Andir																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Andir	1	8.462.005.977		1.819.826.359	100%	1.430.425.350		-	0	-	0	1.819.826.359	0	21,51	Kecamatan Andir		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	1	3.505.345.971		702.595.450	100%	717.501.720		-	0	-	0	702.595.450	0	20,04	Kecamatan Andir		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	1	248.207.754		51.282.000	100%	33.330.000		-	0	-	0	51.282.000	0	20,66	Kecamatan Andir		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	1	529.039.618		89.364.000	100%	96.665.800		-	0	-	0	89.364.000	0	16,89	Kecamatan Andir		
Kecamatan Cobleng																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cobleng	87%	14,898,726,941			84,95%	13,544,297,219		3,912,576,834	-	28,89	27,78	2,333,330,602	31,93%	15,66 %	Kecamatan Cobleng		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	72,37%	11,002,285,327			69,57	10,002,077,570	32,52	2,668,326,150	46,74	26,68	27,78%	625,273,500	38,39%	5,68%	Kecamatan Cobleng		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	95,46%	7,500,482,449			91,97%	6,818,620,408	42,31	1,407,995,534	4,600,4 1	20,65	19,00%	201,052,100	19,90%	2,68%	Kecamatan Cobleng		
	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100%	451,770,000			100%	410,700,000	100%	149,452,750	100,00	36,39	100%	32,250,000	100%	7,14%	Kecamatan Cobleng		
Kecamatan Bandung Wetan																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bandung Wetan	100%	14.408.701.686	100%	2.093.218.036	100%	1.265.205.752	-	140.973.572	-	11,14	100%	2.234.191.608	100,00%	15,51	Kecamatan Bandung Wetan		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	5.479.852.214	100%	700.806.646	100%	467.890.373	-	71.810.000	-	15,35	100%	772.616.646	100,00%	14,10	Kecamatan Bandung Wetan		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	100%	411.637.907	100%	52.635.000	100%	25.932.500	-	-	-	-	100%	52.635.000	100,00%	12,79	Kecamatan Bandung Wetan		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100%	289.967.988	100%	41.655.900	78	-	-	-	-	-	100%	41.655.900	100,00%	14,37	Kecamatan Bandung Wetan		
Kecamatan Sumur Bandung																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sumur Bandung	84	35,765,399,065			83	10,805,256,515	83,96	937,165,269		101,16	8,67	4,438,912,220		12,41 %	Kecamatan Sumur Bandung		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	75%	9,351,808,005			75%	3,117,269,335		811,576,200		-	26,03	25%	1,061,894,200		11,35 %	Kecamatan Sumur Bandung	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	80%	15,072,787,800			75%	5,024,262,600		1,591,750,104		-	31,68	25%	1,659,192,104		11,01 %	Kecamatan Sumur Bandung	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	62,16	3,077,079,180			51,35%	1,025,693,060	51,35%	135,402,200		100,00	13,20	25%	182,285,380		5,92%	Kecamatan Sumur Bandung	
Kecamatan Cibeunying Kidul																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kidul	84,37	45,608,363,843	-	-	84,35	13,902,982,886,00	84,49	3,304,298,612,00	100,17	23,77	84,46	5,510,570,383,00	100,11	12,08	Kecamatan Cibeunying Kidul		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	66,67	20,452,272,920	-	-	50,00	6,178,934,417,00	0	1,220,973,050,00	-	19,76	0	1,589,748,050,00	-	7,77	Kecamatan Cibeunying Kidul		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	83.81	35,470,622,000	-	-	80.95	10,716,200,000.00	3.32	710,011,350.00	4.10	6.63	6.64	768,440,350.00	7.92	2.17	Kecamatan Cibeunying Kidul		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	50.57	6,388,884,579	-	-	45.98	1,930,176,610.00	3.45	440,754,950.00	7.50	22.83	6.9	568,754,950.00	13.64	8.90	Kecamatan Cibeunying Kidul		
Kecamatan Cibeunying Kaler																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler	86.4	34,540,962,225			86.4	11,513,654,075	86.66	1,077,843,007	100.30	9.36	87.81	4,849,190,373	87.81	14.04 %	Kecamatan Cibeunying Kaler		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	75%	18,291,654,348			50%	6,097,218,116		1,582,688,890	-	25.96	0.00	2,052,845,840	0	11.22 %	Kecamatan Cibeunying Kaler		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	86.21%	16,623,971,880			79.3%	5,541,323,960	16.73%	684,820,354	21.10	12.36	16.73%	780,413,114	16.73%	4.69%	Kecamatan Cibeunying Kaler		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	65.22%	3,090,589,050			50%	1,030,196,350	50%	202,359,700	100.00	19.64	50%	418,189,350	50%	50%	Kecamatan Cibeunying Kaler		
Kecamatan Astana Anyar																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Astana Anyar	100%	30,958,185,820			100%	12,441,182,791	100%	3,135,177,693	100.00	25.20	2	5,347,314,741	200.00%	17.27 %	Kecamatan Astanaanyar		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	71%	7,471,374,559				3,927,220,591		377,594,500	-	9.61	0	1,070,413,800	0.00%	14.33 %	Kecamatan Astanaanyar		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	78%	9,922,498,974			71%	6,759,858,000		88,062,000	-	1.30	0	528,763,800	0.00%	0	Kecamatan Astanaanyar		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	77%	2,258,958,177			51%	1,389,944,000		96,385,000	-	6.93	0	408,242,000	0.00%	18.07 %	Kecamatan Astanaanyar		
Kecamatan Bojongloa Kaler																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kaler	84	36,400,029,090			83.8	12,133,343,030	84.06	4,993,125,178	100.31	41.15	84.06	4,993,125,178	16.812	13.72 %	Kecamatan Bojongloa Kaler		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	11,480,311,893			100%	3,826,770,631	25%	1,371,061,950	25.00	35.83	50%	1,371,061,950	0.1	11.94 %	Kecamatan Bojongloa Kaler		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	100%	19,890,353,418			80%	6,630,117,806	36.22%	2,945,038,420	45.28	44.42	36.22%	2,945,038,420	0.07244	14.81 %	Kecamatan Bojongloa Kaler		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100%	3,954,870,000			100%	1,318,290,000	100%	416,954,000	100.00	31.63	100%	416,954,000	0.2	10.54 %	Kecamatan Bojongloa Kaler		
Kecamatan Bojongloa Kidul																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul	100%	9.248.396.609	1.734.254.784		100%	1.832.164.633	32.56%	-	32.56 %	-	0	1.734.254.784	0	18,75	Kecamatan Bojongloa Kidul		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Daerah Kabupaten/Kota																		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	5.145.197.761		816.970.825	100%	1.176.540.000	27,12%	-	27,12 %	-	0	816.970.825	0	15,88	Kecamatan Bojongloa Kidul		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	100%	205.342.006	80.20 %	-	100%	42.100.000	50%	1	-	-	81,2	-	81,2	-	Kecamatan Bojongloa Kidul		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100%	106.020.000		101.354.000	100%	104.950.000	0%	-	-	-	-	101.354.000	104950 000	95,60	Kecamatan Bojongloa Kidul		
Kecamatan Babakan Ciparay																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Babakan Ciparay	82	17,893,496,161			81.5	14,788,013,356		7,702,156,341.00			0.19	2,820,191,782	87.81	15.76%	Kecamatan Babakan Ciparay		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	5,663,157,043			50%	4,680,295,077		2,266,382,900.00			0.40	704,090,000	0	12.43%	Kecamatan Babakan Ciparay		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	82.50%	9,206,724,107			82%	7,608,862,898		4,038,866,404.00			1.60%	122,093,750	16.73%	1.33%	Kecamatan Babakan Ciparay		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	61.40%	1,443,510,519			50.80%	1,192,983,900		611,662,900.00			50%	182,451,000	50%	12.64%	Kecamatan Babakan Ciparay		
Kecamatan Bandung Kulon																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bandung Kulon	83.75	58,426,067,325			83.75	19,475,355,775	23.59%	4,594,863,719	0.28	23.59	39.51%	7,694,733,608	0.47%	13.17%	Kecamatan Bandung Kulon		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	75%	15,806,037,015	-	-	75%	5,268,679,005	-	1,467,087,700	-	27.85		1,872,727,400	0.00%	11.85%	Kecamatan Bandung Kulon		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	80.50%	28,665,184,278	-	-	80.50%	9,555,061,426	-	3,148,353,530	-	32.95		3,789,252,890	0.00%	13.22%	Kecamatan Bandung Kulon	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	75%	5,328,611,880	-	-	75%	1,776,203,960	-	571,223,680	-	32.16		752,526,160	0.00%	14.12%	Kecamatan Bandung Kulon	
Kecamatan Regol																			
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Regol	84.62	46,376,544,128	-	-	84.56	14,011,040,522	84.86	3,632,584,251.00	100.35	25.93	84.64	6,182,668,754	84.64	13.33%	Kecamatan Regol	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	71.42	19,497,841,000	-	-	42.85	5,792,103,646	42.85	1,656,547,950.00	100.00	28.60	42.85	1,951,536,950	42.85	10.01%	Kecamatan Regol	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	69.14	27,159,125,940	-	-	66.67	8,205,174,000	17.11%	2,317,043,900.00	0.26	28.24	7.47%	2,341,133,900	7.47%	8.62%	Kecamatan Regol	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	91.67%	6,209,903,578	-	-	76.67%	1,876,103,800	35%	449,366,650.00	45.65	23.95	35%	605,147,400	35%	9.74%	Kecamatan Regol	
Kecamatan Lengkong																			
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lengkong	84,6	27,719,037,466	-	-	83,05	16,557,732,971	83,06	1,643,061,230.00	100.01	9.92	83,06	7,020,794,858	82,11	25.33%	Kecamatan Lengkong	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	70%	15,134,045,403	-	-	65%	5,044,681,801.00		259,136,815	-	5.14	0.00	1,334,940,715	0	8.82%	Kecamatan Lengkong	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	70.58%	25,821,174,981	-	-	67.78%	8,607,058,327.00	16.73%	638,798,895.00	24.68	7.42	16.73%	1,305,726,779	16.73%	5.06%	Kecamatan Lengkong	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase Siskamling RW Aktif	64.03	6,371,989,776	-	-	55,92%	2,123,996,592	55,92%	115,540,500	100.00	5.44	55,92%	672,267,370	50%	10.55%	Kecamatan Lengkong	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		dan Ketertiban Umum																		
Kecamatan Batununggal																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Batununggal		21,946,714,933	-	-	18,137,780,936		4,086,907,741	-	22.53		7,641,031,674		42.13		Kecamatan Batununggal		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul		7,858,009,517	-	-	6,494,222,741		1,014,685,200	-	15.62		2,935,875,600		45.21		Kecamatan Batununggal		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan		13,257,783,792	-	-	10,956,846,109		1,891,960,633	-	17.27		3,450,982,666		31.50		Kecamatan Batununggal		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif		1,822,103,124	-	-	1,505,870,350		226,720,000	-	15.06		476,832,250		31.66		Kecamatan Batununggal		
Kecamatan Ujungberung																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungberung	83.5 Nilai	16,662,186,522	-	-	83.3 nilai	13,885,155,435	85.05 Nilai	3,181,801,930	102.10	22.92	85.05 Nilai	5,589,392,208	101.86	33.55	Kecamatan Ujungberung		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	5,916,528,344	-	-	60%	4,930,440,287	0%	841,745,600	-	17.07	0%	1,533,426,200	0%	25.92	Kecamatan Ujungberung		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	80%	8,977,598,160	-	-	60.12%	7,481,331,800	47.05%	2,173,757,680	78.26	29.06	47.05%	2,324,739,930	22.75%	25.89	Kecamatan Ujungberung		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100%	1,177,668,300	-	-	91.53%	981,390,250	50.84%	214,876,250	55.54	21.90	50.84%	386,091,250	50.84%	50.84%	Kecamatan Ujungberung		
Kecamatan Kiaracondong																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kiaracondong	83,5 Nilai	16.337.829.907	-	-	82,5 Nilai	13.597.338.766	83,66	3.165.754.846	101.41	23.28	83,66 Nilai	5.436.876.462	100,19	33,28	Kecamatan Kiaracondong		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	7.737.559.036	-	-	66,67%	6.394.676.889	0	1.445.904.950	-	22,61	0	1.715.904.950	-	22,18	Kecamatan Kiaracandong	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	76%	12.607.477.710	-	-	50%	10.419.403.066	12,51 %	2.973.195.990	25,02	28,54	25,01%	3.021.677.590	32,91	23,97	Kecamatan Kiaracandong	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	98,82 %	2.324.772.057	-	-	95,29%	1.921.299.221	23,53 %	280.486.500	24,69	14,60	47,06%	497.986.500	47,62	21,42	Kecamatan Kiaracandong	
Kecamatan Arcamanik																			
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Arcamanik	84,00	39.058.066.836	-	-	83,75	11.669.153.207	84,28	2.716.756.434	100,63	23,28	84,28	5.119.098.685	84,43	13,11 %	Kecamatan Arcamanik	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	10.900.920.296	-	-	75%	3.293.329.395	0,00%	851.422.600	-	25,85	0,00	1.898.991.000	0	17,42 %	Kecamatan Arcamanik	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	81,40 %	21.839.155.385	-	-	69,46%	6.589.781.612		2.277.056.110	-	34,55	0,00%	4.433.562.920	0,00%	20,30 %	Kecamatan Arcamanik	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	54 RW	3.972.734.825	-	-	54 RW	1.200.552.500	13 RW	294.244.300	24,07	24,51	13 RW	461.444.300	13 RW	11,62 %	Kecamatan Arcamanik	
Kecamatan Cibiru																			
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cibiru	85	14.318.009.017	-	-	83,5	11.931.674.181	84,34	4.871.355.254	101,01	40,83	84,34	4.871.355.254	99,22	34,02	Kecamatan Cibiru	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100	3.566.351.758	-	-	50	2.971.959.798	50	1.262.659.650	100,00	42,49	50	1.262.659.650	50,00	35,40	Kecamatan Cibiru	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	83,5	8.060.752.200	-	-	80,5	6.717.293.500	53,61	2.353.281.991	66,60	35,03	53,61	2.353.281.991	64,20	29,19	Kecamatan Cibiru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Desa dan Kelurahan	Unggul Kecamatan																	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	66,04	1.290.253.260	-	-	50,94	1.075.211.050	50,94	474.541.750	100,00	44,13	50,94	474.541.750	77,14	36,78	Kecamatan Cibiru		
Kecamatan Antapani																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Antapani	100%	8.610.463.152	100,00%	63.199.461.132	100%	1.387.377.600	82,38	193.444.065	82,38	13,94	100%	63.392.905.197	100%	736,23	Kecamatan Antapani		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	2.583.255.086	100,00%	1.419.674.030	100%	719.701.850	82,38	33.518.120	82,38	4,66	100%	1.453.192.150	100%	56,25	Kecamatan Antapani		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	100%	417.911.914	100,00%	5.060.000	100%	39.380.000	81,03	-	81,03	-	100%	5.060.000	100%	1,21	Kecamatan Antapani		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100%	417.911.914	100,00%	5.060.000	100%	39.380.000	81,03	-	81,03	-	100%	5.060.000	100%	1,21	Kecamatan Antapani		
Kecamatan Rancasari																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rancasari	100%	14.113.700.577,00	89,59 Nilai	0,00	82 Nilai	11.790.115.352,00	88,29 Nilai	2.823.587.372,00	107,67	23,95	88,29 Nilai	4.903.308.676,00	88,29 Nilai	35,25 %	Kecamatan Rancasari		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	75%	4.769.801.242,00	100%	-	75%	3.941.980.498,00	75%	772.064.000,00	100,00	19,59	75%	1.184.291.220,00	75%	30,04 %	Kecamatan Rancasari		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	82%	7.846.566.100,00	85,03 %	-	77%	6.484.810.000,00	77%	396.582.250,00	100,00	6,12	75%	524.216.550,00	75%	8,08%	Kecamatan Rancasari		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	80%	1.528.788.380,00	100%	-	75%	1.263.461.471,00	75%	263.979.850,00	100,00	20,89	75%	457.170.250,00	75%	29,90 %	Kecamatan Rancasari		
Kecamatan Buahbatu																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buahbatu	84	13,883,892,044	-	-	84	11,474,290,946	83,5	2,632,363,010	99.40	22.94		4,582,723,317	0	33,01	Kecamatan Buahbatu	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	5,338,953,387	-	-	75%	4,412,358,172	32%	908,013,000	42.67	20.58		1,539,404,300	0	28,83	Kecamatan Buahbatu	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	80%	8,199,806,806	-	-	78%	6,776,699,840	31.60 %	2,075,722,620	40.51	30.63		2,249,102,620	0	27,43	Kecamatan Buahbatu	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	80%	1,590,904,370	-	-	60%	1,314,797,000	49.09 %	217,250,000	81.82	16.52		402,494,000	0	25,3	Kecamatan Buahbatu	
Kecamatan Bandung Kidul																			
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bandung Kidul	100%	33.383.435.136			100%	11.127.811.712	100	3.664.433.268	100.00	32.93		1.581.134.963		0,047 363	Kecamatan Bandung Kidul	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	7.813.029.834			100%	2.604.343.278	100%	974.996.000	100.00	37.44	1	186.920.000	1	0,023 924	Kecamatan Bandung Kidul	
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	86%	8.894.198.126			86%	4.447.099.063	86%	124.303.000	100.00	2.80	86%	34.020.000	86%	0,003 825	Kecamatan Bandung Kidul	
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	75%	2.508.240.000			75%	836.080.000	75%	270.000.000	100.00	32.29	75%	67.500.000	75%	0,026 911	Kecamatan Bandung Kidul	
Kecamatan Gedebage																			
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gedebage	100,00%	14.082.263.797	100,00%	2.074.799.714	100,00%	1.333.668.578		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage	
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kelurahan Unggul	100,00%	4.542.788.411	100,00%	798.935.151	100,00%	442.049.000		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		dan Pelayanan Publik																		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	100,00%	110.000.000	100,00%	33.385.800	100,00%	-		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100,00%	140.000.000	100,00%	-	100,00%	65.000.000		-	0	-	100	1	100	-	Kecamatan Gedebage		
Kecamatan Panyileukan																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panyileukan	86.4	35,682,382,710	-	-	101.64	24.07	84.97	2,862,748,527.0 0	84.87	4,871,255 ,313.00	84.87	4,871,255,313. 00	98.23	13.65	Kecamatan Panyileukan		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	75	7,706,484,180	-	-	-	27.05	0	694,928,600.00	0	885,678,6 00.00	0	885,678,600.00	-	11.49	Kecamatan Panyileukan		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	86.21	14,914,812,000	-	-	5.53	21.02	3.32	1,044,789,340.0 0	6.64	1,079,404 ,840.00	6.64	1,079,404,840. 00	7.70	7.24	Kecamatan Panyileukan		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	65.22	3,090,589,050	-	-	31.91	11.10	3.45	114,347,350.00	6.9	330,177,0 00.00	6.9	330,177,000.00	10.58	10.68	Kecamatan Panyileukan		
Kecamatan Cinambo																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cinambo	84	12,956,384,156	-	-	16.26	13.53	13.53	1,526,572,477	51.27	5,783,055 ,445	51.27	5,783,055,445	61.04%	44.63 %	Kecamatan Cinambo		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	84.00	2,334,474,240	-	-	0.10	8.46	8.46%	183,913,220	40.72%	885,385,9 20	40.72%	885,385,920	40.72%	37.93 %	Kecamatan Cinambo		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	80.00%	4,625,000,000	-	-	16.10	12.56	12.56 %	485,914,842	15.79%	1,096,754 ,892	15.79%	1,096,754,892	15.79%	23.71 %	Kecamatan Cinambo		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	80.00%	1,126,731,304	-	-	13.75	10.45	10.45 %	100,360,510	32%	406,534,5 10	10%	406,534,510	13%	36.08 %	Kecamatan Cinambo		
Kecamatan Mandalajati																				
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Mandalajati	100%	823,870,960	-	-	26.86	26.86	26.86 %	190,088,400	35.41%	250,606,9 00	-	250,606,900	-	0.30	Kecamatan Mandalajati		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian kinerja RKPD s/d Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2021 yang dievaluasi s.d. Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2021 s.d. Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s.d. Triwulan II (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2021 Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggu Jawab	Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
		Daerah Kabupaten/Kota																		
2	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	100%	7,329,512,515	-	-	5.90	5.90	5.90%	391,815,300	7.42%	492,482,600	-	492,482,600	-	0.07	Kecamatan Mandalajati		
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	100%	3,210,893,594	-	-	23.22	104.27	23.22 %	2,852,818,131	32.02%	876,202,200	-	876,202,200	-	0.27	Kecamatan Mandalajati		
4	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	100%	12,571,852,598	-	-	23.22	23.22	23.22 %	2,852,818,131	38.38%	4,715,716,372	-	4,715,716,372	-	0.38	Kecamatan Mandalajati		

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan melalui telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 sampai dengan triwulan kedua. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan anggaran Belanja yang meliputi Belanja Non-Urusan, Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan yang tersebar pada 60 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp6.889.107.492.066,00. Sedangkan, rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp1.946.862.568.123,00 atau baru terserap sebesar 28,26%. Secara rinci, realisasi anggaran belanja per Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja Per Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan II Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2021	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1		3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	1.817.287.942.329,00	481.646.621.691,00	26,50	1.335.641.320.638,00
2	Dinas Kesehatan	1.401.712.651.003,00	385.790.084.989,00	27,52	1.015.922.566.014,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	297.769.054.528,00	49.464.439.822,00	16,61	248.304.614.706,00
4	Dinas Penataan Ruang	69.494.775.567,00	23.611.010.031,00	33,98	45.883.765.536,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan	340.502.995.225,00	112.954.461.737,00	33,17	227.548.533.488,00
6	Satuan Polisi Pamomg Praja	80.686.665.907,00	32.340.523.443,00	40,08	48.346.142.464,00
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	50.618.791.883,00	19.775.644.232,00	39,07	30.843.147.651,00
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	44.009.135.557,00	10.716.171.395,00	24,35	33.292.964.162,00
9	Dinas Tenaga Kerja	33.633.604.408,00	7.690.779.644,00	22,87	25.942.824.764,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	27.137.066.242,00	5.792.818.932,00	21,35	21.344.247.310,00
11	Dinas Pangan dan Pertanian	53.191.184.141,00	12.187.005.236,00	22,91	41.004.178.905,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	293.112.297.755,00	76.369.495.324,00	26,05	216.742.802.431,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.427.246.532,00	9.071.616.389,00	27,14	24.355.630.143,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	25.820.158.294,00	5.877.702.040,00	22,76	19.942.456.254,00
15	Dinas Perhubungan	187.642.842.382,00	43.579.163.482,00	23,22	144.063.678.900,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.090.314.337,00	13.433.298.781,00	27,93	34.657.015.556,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	30.434.858.485,00	7.067.879.585,00	23,22	23.366.978.900,00

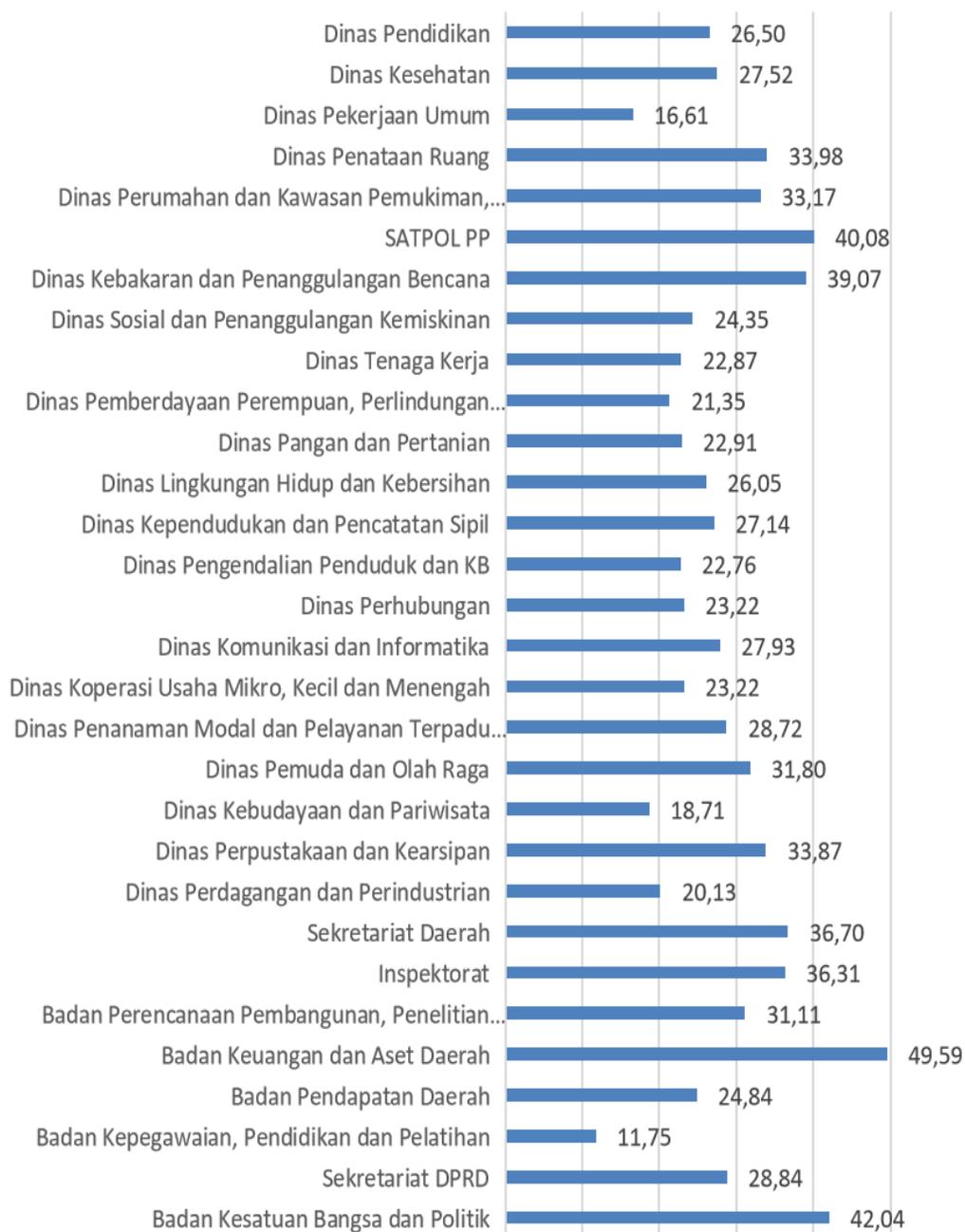
No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2021	Realisasi	%	Sisa Anggaran
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.330.202.715,00	10.722.472.194,00	28,72	26.607.730.521,00
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	122.874.248.795,00	39.071.366.230,00	31,80	83.802.882.565,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	59.278.061.398,00	11.091.168.777,00	18,71	48.186.892.621,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.337.126.283,00	7.903.544.198,00	33,87	15.433.582.085,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	40.507.479.638,00	8.155.847.957,00	20,13	32.351.631.681,00
23	Sekretariat Daerah	279.458.426.350,00	102.572.591.771,00	36,70	176.885.834.579,00
24	Inspektorat	44.449.161.135,00	16.139.992.827,00	36,31	28.309.168.308,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	32.760.993.078,00	10.192.264.364,00	31,11	22.568.728.714,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	114.066.175.437,00	56.567.237.999,00	49,59	57.498.937.438,00
27	Badan Pendapatan Daerah	105.697.737.269,00	26.256.877.544,00	24,84	79.440.859.725,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	239.815.635.519,00	28.187.104.605,00	11,75	211.628.530.914,00
29	Sekretariat DPRD	157.894.190.686,00	45.532.932.054,00	28,84	112.361.258.632,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.622.644.507,00	15.396.782.049,00	42,04	21.225.862.458,00
31	Kec. Sukasari	19.225.804.493,00	7.570.606.670,00	39,38	11.655.197.823,00
32	Kec. Cidadap	16.706.118.780,00	6.690.276.800,00	40,05	10.015.841.980,00
33	Kec. Sukajadi	24.290.525.808,00	9.658.515.698,00	39,76	14.632.010.110,00
34	Kec. Cicendo	28.391.634.029,00	11.572.488.864,00	40,76	16.819.145.165,00
35	Kec. Andir	27.258.307.551,00	11.042.395.112,00	40,51	16.215.912.439,00
36	Kec. Coblong	31.580.695.197,00	11.330.257.470,00	35,88	20.250.437.727,00
37	Kec. Bandung Wetan	17.919.700.798,00	6.430.240.091,00	35,88	11.489.460.707,00
38	Kec. Sumur Bandung	20.022.481.510,00	7.342.283.904,00	36,67	12.680.197.606,00
39	Kec. Cibeunying Kidul	32.728.293.913,00	8.437.513.733,00	25,78	24.290.780.180,00
40	Kec. Cibeunying Kaler	24.182.392.501,00	8.074.238.677,00	33,39	16.108.153.824,00
41	Kec. Astanaanyar	24.778.205.382,00	7.354.734.341,00	29,68	17.423.471.041,00
42	Kec. Bojongloa Kaler	23.908.521.467,00	9.729.194.058,00	40,69	14.179.327.409,00
43	Kec. Bojongloa Kidul	27.092.281.307,00	11.267.719.562,00	41,59	15.824.561.745,00
44	Kec. Babakan Ciparay	28.270.155.231,00	11.947.739.502,00	42,26	16.322.415.729,00
45	Kec. Bandung Kulon	36.075.300.166,00	14.109.240.058,00	39,11	21.966.060.108,00
46	Kec. Regol	30.544.421.968,00	11.080.487.004,00	36,28	19.463.934.964,00
47	Kec. Lengkong	32.333.469.691,00	10.023.566.095,00	31,00	22.309.903.596,00
48	Kec. Batununggal	37.094.720.136,00	11.463.150.786,00	30,90	25.631.569.350,00
49	Kec. Ujungberung	27.278.317.772,00	9.833.649.588,00	36,05	17.444.668.184,00
50	Kec. Kiaracondong	32.332.717.942,00	10.672.446.502,00	33,01	21.660.271.440,00
51	Kec. Arcamanik	22.755.316.710,00	9.158.887.753,00	40,25	13.596.428.957,00
52	Kec. Cibiru	22.696.138.529,00	8.961.838.645,00	39,49	13.734.299.884,00
53	Kec. Antapani	24.411.856.613,00	8.160.196.888,00	33,43	16.251.659.725,00
54	Kec. Rancasari	23.480.467.321,00	7.068.986.696,00	30,11	16.411.480.625,00

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD 2021	Realisasi	%	Sisa Anggaran
55	Kec. Buahbatu	23.978.145.958,00	8.773.674.237,00	36,59	15.204.471.721,00
56	Kec. Bandung Kidul	19.219.944.053,00	6.490.482.914,00	33,77	12.729.461.139,00
57	Kec. Gedebage	20.777.726.324,00	7.073.327.099,00	34,04	13.704.399.225,00
58	Kec. Panyileukan	20.377.681.223,00	7.166.515.753,00	35,17	13.211.165.470,00
59	Kec. Cinambo	18.359.342.593,00	6.884.006.229,00	37,50	11.475.336.364,00
60	Kec. Mandalajati	22.373.139.715,00	6.335.008.072,00	28,32	16.038.131.643,00
	TOTAL	6.889.107.492.066,00	1.946.862.568.123,00	28,26	4.942.244.923.943,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung 2021, diolah

Berikut persentase realisasi belanja perangkat daerah non kecamatan sampai dengan triwulan II tahun 2021.

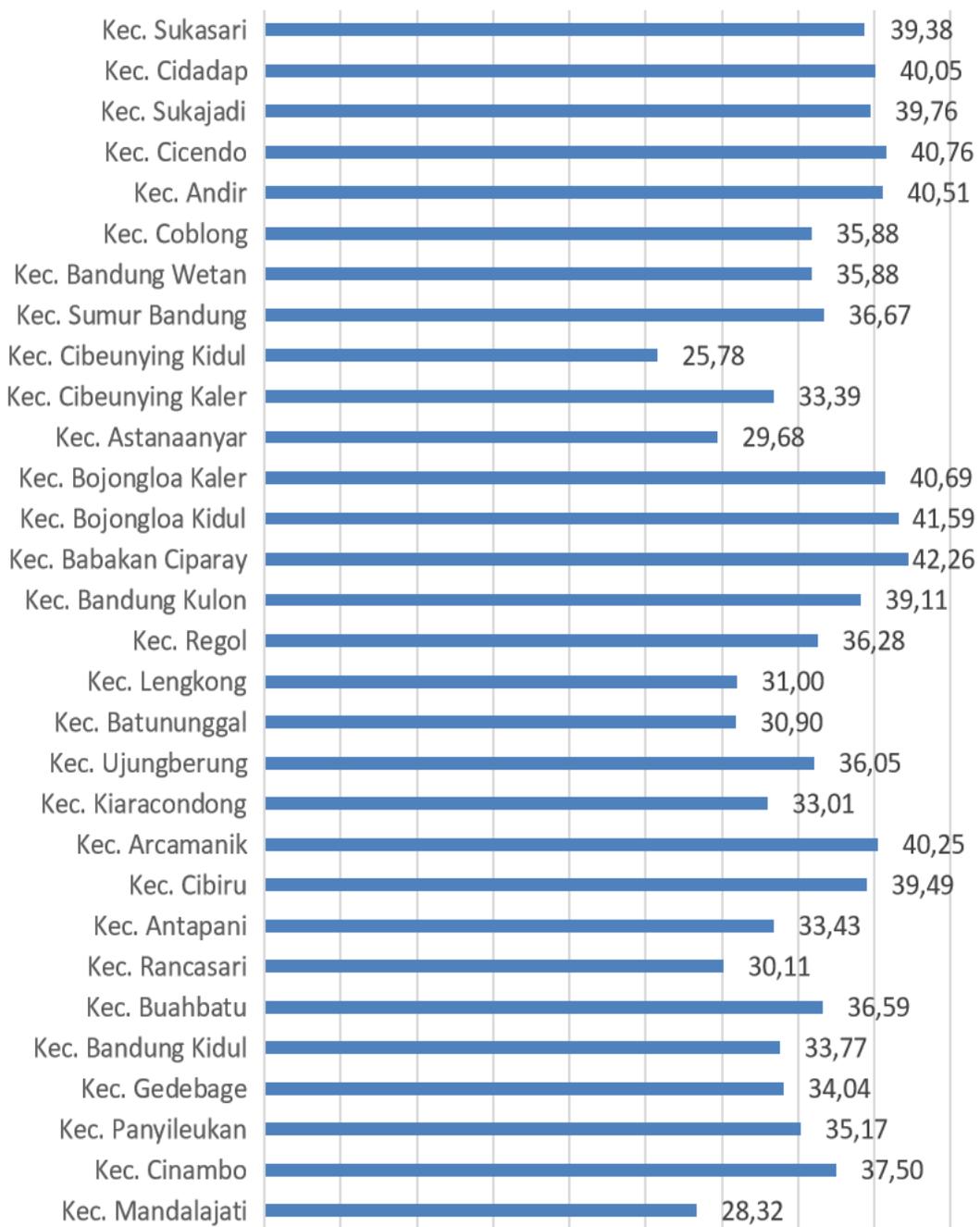
Grafik 2.1
Persentase Realisasi Belanja pada Perangkat Daerah Non Kecamatan



Sumber: Data Monev 2021, diolah

Rata-rata penyerapan realisasi anggaran belanja langsung PD Non-Kecamatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 28,44% dengan 13 Perangkat Daerah Non-Kecamatan dengan penyerapan realisasi anggaran belanjanya berada di atas rata-rata sedangkan yang berada di bawah rata-rata sebanyak 17 PD. Grafik 2.1 menunjukkan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah Non-Kecamatan dengan presentasi penyerapan anggaran tertinggi sebesar 49,59%, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan penyerapan anggaran paling rendah yaitu sebesar 11,75%. Adapun grafik berikut merupakan persentase realisasi belanja pada kecamatan sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Grafik 2.2
Persentase Realisasi Belanja pada Kecamatan



Sumber: Data Monev 2021, diolah

Rata-rata penyerapan realisasi anggaran belanja Perangkat Daerah Kecamatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 24,75%. Seluruh Perangkat Daerah Kecamatan yang penyerapan realisasi anggaran belanjanya berada di atas rata-rata seluruhnya yaitu 30 kecamatan. Grafik 2.2 menunjukkan Kecamatan Bojongloa Kidul sebagai kecamatan dengan penyerapan anggaran paling tinggi sebesar 41,59% sedangkan Kecamatan Mandalajati sebagai kecamatan dengan penyerapan anggaran paling rendah yaitu sebesar 28,32%.

2.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

A. FAKTOR PENDUKUNG

1. Ketepatan waktu penetapan APBD Kota Bandung.
2. Akuntabilitas di Kota Bandung sudah baik, dimana di setiap kegiatan sudah ada pelaporannya secara terperinci, terlebih sekarang menggunakan sistem lelang yang disetiap kegiatannya tercatat data keuangan dan juga laporannya.
3. Proses penganggaran menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. Seluruh realisasi keuangan sudah menggunakan standar, dimana yang menentukan satuan harga barang menurut harga pasar.
4. Penggunaan anggaran yang direalisasikan sudah cukup efisien dan tepat sasaran untuk kepentingan publik, tetapi belum semua sasaran pelayanan publik dapat terpenuhi dan direalisasikan.
5. Adanya pengawasan pelaksanaan pembangunan oleh DPRD Kota Bandung.

B. FAKTOR PENGHAMBAT

1. Adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya pada berbagai sektor;
2. Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagian besar Perangkat Daerah tidak mengisi capaian kinerja triwulanan melalui e-Monev;
3. Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga mempengaruhi program/kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. Belum jelasnya persyaratan pencairan anggaran DAU menyebabkan pencairan menjadi lama dikarenakan persyaratan yang belum lengkap;
5. Faktor penghambat Program Pemberdayaan Kewilayahan, diantaranya para Ketua RW dan LKK belum sepenuhnya mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk pengajuan kepada kelurahan dalam melaksanakan kegiatannya.

C. TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN TRIWULAN/RKPD BERIKUTNYA

Dari kendala yang dihadapi di atas, Bappelitbang memberikan beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut triwulan berikutnya di laporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II, sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen, intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal dan vertikal, untuk mengatasi permasalahan dalam rangka memperlancar capaian kinerja. Peningkatan pencapaian kinerja perlu dilakukan perangkat daerah secara terus menerus, supaya permasalahan bisa diantisipasi sejak awal dan tidak terjadi penumpukan penyelesaian kegiatan di akhir tahun anggaran.
2. Peningkatan sinergitas dan kerjasama yang baik dalam lingkup Pemerintah Kota Bandung baik intra perangkat daerah maupun antar perangkat daerah yang dilaksanakan secara formal maupun informal, untuk menciptakan kondusivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Pengembangan secara berkelanjutan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Bandung, diantaranya pengembangan kemampuan *soft skill* seperti pembangunan komitmen, kemampuan koordinasi dan konsultasi serta kemampuan teknis seperti penguasaan proses PBJ sesuai aturan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Perihal pengadaan barang dan jasa:
 - a. Merealisasikan pengadaan barang dan jasa di masing-masing Perangkat Daerah sesuai jadwal waktu dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.
 - b. Mengidentifikasi pengadaan barang dan jasa yang belum terealisasi agar segera direalisasikan.
 - c. Segera menyelesaikan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya.
 - d. Penyelesaian tagihan dipergunakan sebagai salah satu indikator mengingat ketepatan penyelesaian tagihan mencerminkan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan serta menunjukkan komitmen dan berpengaruh langsung pada penyerapan Anggaran Kota Bandung.
5. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi/sistem informasi harus dioptimalkan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu aplikasi sistem informasi tersebut dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah ada.
6. Sistem pelaporan pengendalian dan evaluasi triwulanan harus dioptimalkan agar setiap permasalahan dapat segera diantisipasi.
7. Peningkatan kapasitas ketua RW dan LKK dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan teknis, serta pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PIPPK agar sesuai dengan dokumen anggaran yang ditetapkan.
8. Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kota Bandung atas LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2020.

9. Melakukan perubahan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah untuk difokuskan kembali terhadap penanganan *Covid-19*. Baik dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi atau dunia usaha daerah, penanganan dampak sosial masyarakat, sesuai dengan fungsi masing-masing.
10. Melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran yang tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan bencana pandemi *Covid-19*.

BAB III

GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PERUBAHAN ASUMSI KEUANGAN DAERAH

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kota Bandung dipengaruhi oleh kondisi Pandemi Covid-19, dimana terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Disamping itu juga perekonomian Kota Bandung dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional, serta regional Jawa Barat dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Harapan pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dan diatasi sampai pertengahan tahun 2021 belum dapat diwujudkan. Pada awal tahun 2021, seiring dengan dimulainya kegiatan vaksinasi di berbagai negara menumbuhkan optimisme adanya akselerasi pemulihan ekonomi global. Refleksi optimisme tersebut terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dengan proyeksi sebesar 5,5%, World Bank dengan proyeksi sebesar 4,0% dan OECD dengan proyeksi sebesar 4,5%.

Optimisme pemulihan ekonomi global semakin menguat, didukung oleh data perkembangan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Asia, Eropa dan Amerika menunjukkan adanya perbaikan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kuartal IV tahun 2020 semakin mengecil. Walaupun di beberapa negara pertumbuhan ekonomi ekonominya masih negatif, tapi kecenderungan pertumbuhannya menuju positif. Sehingga diproyeksikan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dunia akan mulai tumbuh positif pada kuartal I tahun 2021. Tren pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia, Uni Eropa dan Amerika
Pada tahun 2020

Negara	Pertumbuhan per Kuartal		
	Q2	Q3	Q4
Vietnam	0,4	2,9	4,5
Cina	-6,8	2,3	6,5
Korea Selatan	-1,0	-2,7	-1,2
Indonesia	-5,3	-2,1	-2,07
Amerika Serikat	-9,0	-5,0	-2,4
Singapura	-13,4	-5,8	-2,4
Uni Eropa	-15,1	-6,8	-4,6

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2021

Namun optimisme pemulihan ekonomi global pada tahun 2021 masih dibayangi kekhawatiran munculnya gelombang kedua penularan virus Covid 19. Pada tahun 2020 telah terdeteksi adanya mutasi virus Covid 19 dengan berbagai varian. Virus Covid 19 varian Alpha terdeteksi pada bulan September di Inggris, varian Delta terdeteksi pada bulan Oktober di India, varian Beta terdeteksi pada bulan Mei di Afrika Selatan dan Varian Gamma terdeteksi pada bulan November di Brasil. Hasil analisis para ahli kesehatan, covid 19 varian delta mempunyai sifat yang mudah menular. Hal ini terbukti dengan peningkatan kasus penularan dan kematian akibat Covid 19 varian delta (B.1.617.2) yang terjadi di India pada bulan Mei 2021, dengan jumlah penularan sebesar 29,8 juta kasus dan 385 ribu kematian. Walaupun kecenderungan tingkat kasus penularan Covid 19 varian delta di India sudah menurun, tapi diperkirakan oleh WHO virus Covid 19 varian delta saat ini sudah tersebar di 80 negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data WHO per 29 Juli 2021 secara global tingkat penularan sebanyak 195.886.929 kasus Covid 19 yang dikonfirmasi, 4.189.148 kematian dan total dosis yang sudah diberikan sebanyak 3.830.124.730 dosis.

Kesenjangan distribusi vaksin Covid 19 antara negara maju di Amerika, Eropa, Asia dengan negara-negara berkembang dan negara miskin, menjadi kendala utama menurunkan tingkat penularan Covid 19 secara simultan di berbagai negara. Dari dosis vaksin 3,8 milyar yang telah disuntikan, 75% berada di 10 negara maju, 0,4% persen vaksin disuntikan di negara-negara berpenghasilan rendah. Cakupan vaksinasi di Kawasan Eropa telah mencapai 52,85% dari total populasi. Sedangkan cakupan vaksinasi di Kawasan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) baru mencapai 8,91% dari total populasi. Sementara di kawasan Afrika cakupan vaksinasi baru mencapai 2,86% dari total populasi. Terbatasnya ketersediaan vaksin Covid 19 diberbagai negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah tersebut menyebabkan penularan Covid 19 rentan meningkat, termasuk di Indonesia.

Walaupun ketidakpastian pemulihan ekonomi global masih relatif tinggi, lembaga-lembaga keuangan dunia tetap optimis perekonomian global pada tahun 2021 dapat tumbuh positif. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan Asian tumbuh 7,7%, pertumbuhan didukung oleh pemulihan ekonomi Cina. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,6%. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 6,0%, besarnya anggaran negara-negara maju untuk mengatasi keterpurukan ekonomi dunia dan cakupan vaksinasi yang terus meningkat menguatkan optimisme pemulihan ekonomi dunia pada tahun 2021 lebih baik. Sementara OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 5,6%

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 mengalami tekanan yang sangat berat akibat pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi nasional per kuartal pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi cukup drastis. Pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi nasional masih tumbuh positif sebesar 2,97%, kemudian seiring dengan semakin meningkatnya penularan covid 19 pada kuartal dua pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi -5,32%. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah peningkatan penularan covid 19 diantaranya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan penerapan prosedur kesehatan. PSBB diterapkan secara proporsional bagi setiap daerah dan prosedur kesehatan yang diterapkan yaitu mencegah kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker cukup berhasil memperbaiki pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga menjadi -3,49%. Konsistensi pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemic Covid 19 dan menjaga agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk terlalu dalam pada tahun 2020 membawa hasil yang cukup baik pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal empat menjadi -2,19%. Walaupun belum bisa keluar dari kondisi krisis ekonomi tapi secara tren perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional mengarah pada adanya pemulihan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin mengecil menuju ke arah pemulihan kondisi ekonomi yang lebih positif. Jika dihitung dari perkembangan ekonomi tahun ke tahun maka pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,07%. Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN yang mengalami kontraksi ekonomi lebih buruk seperti Malaysia dan Singapura.

Dari sisi belanja negara, kebijakan pelebaran defisit dilakukan berbagai negara untuk mendukung penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi pada tahun 2020. Berdasarkan data IMF yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan, Indonesia mengalami defisit sebesar 6,1% terhadap Produk Domestik Bruto nasionalnya. Masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami oleh Malaysia sebesar 6,5%, Philipina sebesar 8,1% dan Singapura sebesar 10,8%.

Dari sisi ratio hutang negara terhadap PDB ada peningkatan tapi ratio hutang Indonesia termasuk yang paling rendah. Ratio hutang pada Indonesia terhadap PDB pada tahun 2020 meningkat sebesar 8% masih relatif kecil jika dibandingkan dengan peningkatan hutang Malaysia sebesar 10,4%, Philipina sebesar 11,9% dan Thailand sebesar 9,3%.

Dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, berdasarkan data BPS konsumsi Rumah Tangga merupakan pendorong utama yang memberi kontribusi sebesar 57,7% untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi pandemi covid 19 mempunyai dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi termasuk pada penurunan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat menurun karena banyak lapangan usaha formal dan non formal yang terdampak mengalami kerugian sehingga terjadi penutupan usaha, akibatnya banyak terjadi PHK dan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan. Data menunjukkan pada kuartal dua konsumsi Rumah Tangga mengalami penurunan atau terkontraksi sebesar -5,5% dan pada kuartal 4 mengalami perbaikan hanya sebesar -3,6 persen. Konsumsi pemerintah sebelum terjadi pandemic covid 19 memberi kontribusi sebesar 9,3% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, setelah terjadi pandemic covid 19 pada kuartal dua konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar -6,9%, mengalami peningkatan sebesar 9,8% pada kuartal tiga, dan pada kuartal empat sebesar 1,8%. Sementara untuk investasi sebelum terjadi pandemi covid 19 memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 31,7%, tapi setelah terjadi pandemi pada kuartal dua mengalami penurunan sebesar -8,6% dan pada kuartal empat sebesar -6,2%. Kontribusi ekspor sebelum terjadi pandemi covid 19 memberi kontribusi sebesar 17,2% terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi setelah terjadi pandemi mengalami penurunan sebesar -11,7% pada kuartal dua dan pada kuartal empat sebesar -7,2%. Kontribusi impor sebelum terjadi pandemi covid 19 memberikan kontribusi sebesar 16,0%, setelah terjadi pandemi menurun menjadi -17,0% pada kuartal dua dan pada kuartal empat sebesar -13,5%.

Berdasar data di atas menunjukkan bahwa saat terjadi pandemi covid 19 belanja pemerintah menjadi penggerak utama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Walaupun belum bisa keluar sepenuhnya dari kondisi krisis ekonomi, tapi dari perkembangan data per kuartal menunjukkan adanya perbaikan berupa penurunan angka kontraksi dari sektor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor. Perkembangan indikator makro ekonomi yang menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan telah berjalannya kegiatan vaksinasi memberikan harapan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik pada tahun 2021. Berdasarkan prediksi pemerintah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dapat tumbuh sebesar 4,5% – 5,3%.

Berdasarkan data BPS, perekonomian global pada Triwulan 1-2021 menunjukkan perbaikan yang terlihat pada pergerakan indeks PMI global yang terus mengalami peningkatan dari bulan Januari ke bulan Maret. Hal ini sejalan dengan proses vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan maupun sedang berlangsung di

beberapa negara. Beberapa mitra dagang Indonesia pada triwulan I tahun 2021 telah menunjukkan pertumbuhan positif. Diantaranya adalah Amerika Serikat tumbuh sebesar 0,4%, Singapura tumbuh sebesar 0,2%, Korea Selatan tumbuh sebesar 1,8%, Vietnam tumbuh sebesar 4,5%, Hongkong tumbuh sebesar 7,8% dan Uni Eropa tumbuh sebesar 1,7%.

Pada bulan Maret tahun 2021 terjadi inflasi tahun ke tahun sebesar 1,37%. Realisasi belanja APBN mencapai Rp 523,04 Trilyun naik dibandingkan realisasi triwulan 1 tahun 2020 sebesar Rp 452,41 Trilyun. Realisasi penanaman modal triwulan 1 2021 sebesar Rp 219,7 Trilyun, atau naik sebesar 2,4% naik 4,3% tahun ke tahun dari tahun 2020. Sementara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 mencapai 385,59 ribu kunjungan atau turun 85,45% tahun ke tahun.

Perekonomian Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 mencapai Rp 3.969,1 Trilyun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.683,1 Trilyun. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 mengalami kontraksi sebesar 0,74% tahun ke tahun. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,04 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35 persen.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,70 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,83 persen (y-on-y). Kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,97 persen (y-on-y) dengan peranan sebesar 2,44 persen.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Jawa Barat

Gambaran kondisi ekonomi makro Jawa Barat meliputi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, ekspor dan impor, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 mencapai Rp 2.088,04 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2020 mencapai Rp 1.455,24 triliun. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,44 persen atau melambat dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,07 persen (tahun ke tahun).

Berdasarkan sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 34,64 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -0,48 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah adalah Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar -18,38 persen. Adapun dari sisi pengeluaran komponen Perubahan Inventori mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar -62,35 persen.

Sumber laju pertumbuhan (*Source of Growth*, SOG) secara (tahun ke tahun) dari sisi lapangan usaha, dengan andil negatif terbesar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar -1,81 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, andil negatif terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar -1,79 persen.

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat triwulan IV tahun 2020 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 41,56 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,47 persen; dan Konstruksi sebesar 8,27 persen.

Perekonomian Jawa Barat tahun 2021 masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terhadap triwulan I-2020 (*tahun ke tahun*) terkontraksi 0,83 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2021 disebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -10,64 persen; diikuti lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar -7,40; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar -5,45 persen. Kinerja positif di saat pandemi Covid-19 terjadi pada beberapa lapangan usaha, yaitu Informasi dan Komunikasi sebesar 17,87 persen; diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 17,62 persen; Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,54 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,42 persen; Real Estat sebesar 4,89 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,95 persen; dan Konstruksi sebesar 0,33 persen (Gambar 1).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I-2021 (*tahun ke tahun*), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,94 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,92 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,07 persen; Real Estat sebesar 0,07 persen; dan Konstruksi sebesar 0,03 persen

Struktur perekonomian Jawa Barat triwulan I-2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 41,36 persen; diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,41 persen; Konstruksi sebesar 8,66 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,55 persen.

2. Ekspor dan Impor

Nilai impor Jawa Barat secara kumulatif sepanjang tahun 2020 mencapai USD 8,69 miliar atau turun sebesar 21,29 persen dibanding tahun 2019. Penyumbang penurunan nilai impor non migas terbesar pada tahun 2020 adalah golongan Filamen Buatan sebesar USD 227,48 juta (-40,27 persen), Serat Stafel Buatan sebesar USD 103,31 miliar (-39,65 persen), serta Kapas sebesar USD 200,64 juta (-35,63 persen).

Neraca perdagangan Jawa Barat secara kumulatif pada tahun 2020 mengalami surplus dari sisi nilai mencapai USD 17,90 miliar, yang ditunjang oleh surplus komoditi Non Migas sebesar USD 18,42 miliar sedangkan komoditi Migas defisit sebesar USD 526,59 juta. Defisit neraca perdagangan terbesar secara kumulatif pada tahun 2020 didapatkan dari Tiongkok sebesar USD 92,85 juta dan Korea Selatan senilai USD 29,43 juta, menurun dibanding tahun 2019 yang defisitnya juga didapatkan dari Tiongkok sebesar USD 116,84 juta dan Korea Selatan sebesar 48,82 juta. Sementara itu, surplus neraca perdagangan terbesar adalah dengan Amerika Serikat yang mencapai USD 440,01 juta. Untuk nilai impor Jawa Barat Desember 2020 mencapai USD 0,94 miliar atau naik 13,37 persen dibanding November 2020 dan dibandingkan Desember 2019 turun 1,20 persen.

Penyumbang peningkatan nilai impor non migas terbesar Desember 2020 terhadap November 2020 adalah golongan Mesin dan Peralatan Mekanis (USD 38,94 juta), Mesin dan Perlengkapan Elektrik (USD 18,55 juta), serta Perabot, Penerangan Rumah (USD 12,56 juta). Neraca perdagangan Jawa Barat Desember 2020 mengalami surplus dari sisi nilai sebesar USD 1,73 miliar yang ditunjang oleh surplus komoditi Non Migas sebesar USD 1,83 miliar sedangkan komoditi

Migas defisit sebesar USD 94,32 juta. Defisit neraca perdagangan terbesar pada periode Desember 2020 didapatkan dari Tiongkok dan Korea Selatan senilai USD 122,29 juta, meningkat dibanding bulan November yang defisitnya sebesar USD 59,95 juta. Surplus neraca perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat yang mencapai USD 440,01 juta. Kondisi diatas digambarkan dengan grafik sebagai berikut.

3. Inflasi

Laju inflasi tahun kalender “*year to date*” (Januari-Desember 2020) sebesar 2,18 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun “*year on year*” (Desember 2020 terhadap Desember 2019) tercatat sebesar 2,18 persen. Faktor pendorong inflasi pada triwulan ini antara lain berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

Berdasarkan hasil pendataan harga yang meliputi 7 (tujuh) kota pantauan indeks harga konsumen (IHK) gabungan di Jawa Barat tercatat bahwa pada Desember 2020 seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,44 persen; Kota Sukabumi sebesar 0,58 persen; Kota Bandung sebesar 0,39 persen; Kota Cirebon sebesar 0,49 persen; Kota Bekasi sebesar 0,73 persen; Kota Depok sebesar 0,36 persen; dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,26 persen.

Andil inflasi pada tahun 2020 diberikan oleh: Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,90 persen; Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,35 persen; Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,28 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah sebesar 0,15 persen; Kelompok Pendidikan 0,14 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,12 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,11 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,06 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,04 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya sebesar 0,03 persen; sedangkan Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan memberikan andil deflasi sebesar -0,01 persen.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Jawa Barat. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 yaitu sebanyak 24,21 juta orang, naik 0,22 juta orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020, sebanyak 21,68 juta orang adalah penduduk bekerja sedangkan sebanyak 2,53 juta orang menganggur. Dibanding tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja turun sebanyak 0,38 juta orang dan

jumlah penduduk yang menganggur naik sebanyak 0,60 juta orang.

Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan penurunan dari bulan Agustus 2019. Penurunan sebanyak 0,46% pada bulan Agustus 2020 membuat TPAK hanya mencapai angka 64,53% secara keseluruhan. Sedangkan jika berdasarkan jenis kelamin, terjadi penurunan TPAK laki-laki sebanyak 1,35% dan peningkatan TPAK perempuan sebanyak 0,46% pada periode Agustus 2019-2020.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 8,04 persen naik menjadi 10,46 persen pada Agustus 2020. Ditinjau dari tingkat pendidikan pada Agustus 2019, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 18,75 persen. TPT tertinggi berikutnya adalah pada tingkat SMA sebanyak 13,73 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, baik TPT Perkotaan maupun TPT Perdesaan mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 2,98% poin untuk TPT Perkotaan dan Perdesaan sebanyak 0,57% poin pada Agustus 2020.

5. Indeks Gini

Di Provinsi Jawa Barat, Gini Ratio mengalami fluktuasi pada periode Maret 2015 – September 2020. Pada Maret 2015, Gini Ratio sebesar 0,415 kemudian meningkat menjadi 0,426 pada September 2015. Pada Maret – September 2016, nilai Gini Ratio mengalami penurunan. Kemudian pada Maret 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,403 dan pada September 2017 menurun menjadi 0,393. Kemudian pada Maret 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,407 dan pada September 2018 menurun menjadi 0,405. Pada Maret 2019 ini mengalami penurunan menjadi 0,402 dan menurun lagi pada September 2019 menjadi 0,398. Namun pada Maret 2020, Gini Ratio naik kembali menjadi 0,403. Pada September 2020 Gini Ratio turun menjadi 0,398.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,409. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,326. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,001 poin dibandingkan pada kondisi Maret 2020 yang mencapai 0,325.

Indeks gini mengalami fluktuasi pada periode Maret 2018 – September 2020. Pada Maret 2018 indeks gini menunjukkan angka 0,407 poin yang kemudian turun sebanyak 0,002 poin menjadi 0,405 poin pada bulan September 2018. Pada Maret 2019, angka ini mengalami penurunan menjadi 0,402 poin dan menurun lagi

pada September 2019 menjadi 0,398 poin, namun mengalami kenaikan sebesar 0,005 poin di bulan Maret 2020 dan mengalami penurunan kembali sebesar 0,005 pada September 2020, sehingga gini rasio September 2019 sama dengan September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,408 poin. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019. Sedangkan pada bulan Maret 2020, angka ini mengalami kenaikan menjadi 0,412 poin. Untuk daerah perdesaan, gini ratio September 2019 tercatat sebesar 0,318 poin. Angka ini mengalami penurunan 0,001 poin dibandingkan pada kondisi Maret 2019 yang mencapai 0,319 poin. Namun pada bulan Maret 2020, angka ini mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 0,007 poin menjadi 0,325 poin dan mengalami penurunan pada bulan September 2020 sebesar 0,003 poin menjadi 0,409 poin .

6. Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2015 – September 2019 tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun, pada periode Maret-September 2020, terjadi kenaikan kemiskinan di Jawa Barat. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2015 sampai dengan September 2020.

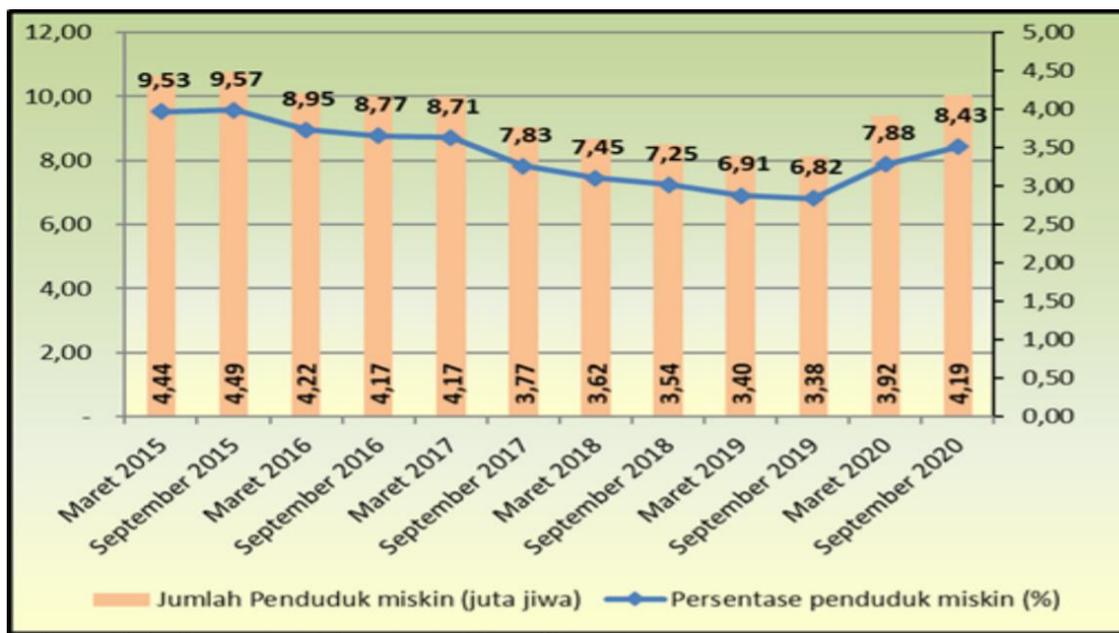
Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat September 2020 mencapai 4,19 juta jiwa (8,43 persen). Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 268,29 ribu jiwa dibandingkan keadaan Maret 2020. Jika dibandingkan dengan keadaan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 812,63 ribu jiwa. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret dan September 2020 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 20,65 poin persen dari 7,14 persen menjadi 7,79 persen. Sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,37 poin persen dari 10,27 persen menjadi 10,64 persen.

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada periode Maret 2015 – September 2020 tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun pada bulan September 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 1,06% menjadi 7,88%. Fluktuasi tingkat kemiskinan di Jawa Barat bulan Maret tahun 2018 sampai dengan Maret 2020 ditunjukkan oleh gambar 3.6.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2019 mencapai 3,38 juta jiwa (6,82 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 23,27 ribu jiwa dibandingkan Maret 2019. Jika dibandingkan dengan September tahun

sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 163,51 ribu jiwa. Namun pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebanyak 3,92 juta jiwa. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020.

Gambar 3.1.
Fluktuasi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat
Maret 2015 – September 2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Dalam rangka perencanaan tahun 2022 perlu memproyeksikan indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan. Proyeksi indikator makro tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan RPJMD disandingkan dengan target nasional disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Disandingkan dengan Nasional Tahun 2022-2023

No.	Indikator Makro & Pembangunan	Nasional	Jawa Barat	
		2022	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	N/A	72,57	73,05
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,70	3,92	4,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,40	10,16	9,69
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	N/A	7,67	7,54
5	Indek Gini (Poin)	N/A	0,400	0,396
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	N/A	1,16	1,12
7	Pendapatan Per Kapita* (Juta Rupiah)	N/A	46,48	49,29

Sumber: Hasil proyeksi, diolah oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor kesehatan dan memerlukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pergerakan ekonomi diasumsikan sejalan dengan pergerakan manusia sehingga pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya capaian PDRB Jawa Barat di sepanjang tahun 2020 dan pada Triwulan I 2020 juga masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga pada tahun 2021 perekonomian diperkirakan belum dapat pulih. Dampak COVID-19 juga mempengaruhi beberapa sektor ekonomi di Jawa Barat, diantaranya sektor pariwisata, UMKM, dan Ketenagakerjaan.

a. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan ekonomi yang inklusif, hal inilah yang membuat sektor pariwisata menjadi *leading sector* perekonomian di Indonesia. Akan tetapi pandemi yang dimulai sejak tahun 2020 silam membuat sektor pariwisata tidak bisa berjalan dengan normal hingga mengalami keterpurukan.

Pada bulan Mei 2020, tercatat destinasi wisata yang mengalami penutupan berjumlah 411 destinasi dan membuat 5.179 orang tenaga kerja terkena dampaknya. Baik karena diberlakukan PHK maupun terpaksa dirumahkan sementara.

Hotel pun tak luput dari dampak pandemi ini. Berkurangnya wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara membuat sejumlah hotel terpaksa melakukan penutupan. Sebanyak 1.076 hotel terpaksa ditutup dan membuat 12.143 tenaga kerjanya ikut terdampak.

Sebanyak 626 unit usaha ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat pun berhenti berproduksi dengan jumlah tenaga kerja terdampak mencapai 14.991 orang. Tak luput pula tenaga seni dan budaya yang mencapai 15.034 orang ikut terkena dampak pandemi COVID-19.

Berkurangnya wisatawan membuat hotel berbintang maupun hotel non bintang mengalami penurunan tingkat Penghunian Kamar walaupun sempat pula mengalami perkembangan positif. Tingkat Penghunian kamar (TPK) berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2021:

- 1) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada Triwulan III 2020 menunjukkan nilai 32,68 persen dan mengalami sedikit kenaikan pada Triwulan IV menjadi 38,80 persen.
- 2) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada Desember

2020 mencapai 38,8 persen, turun 16 poin dibandingkan TPK Desember 2019 yang mencapai 54,8 persen.

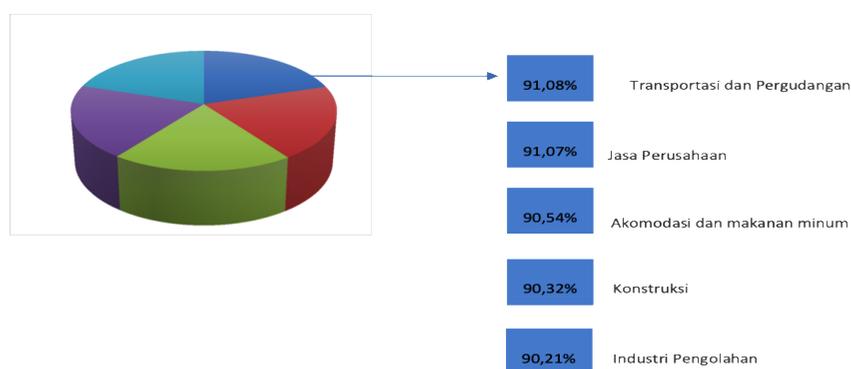
Adapun perkembangan pariwisata di Jawa Barat tidak terlepas dari banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Untuk mengetahui seberapa minat wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Barat adalah dengan melihat banyaknya wisatawan mancanegara yang datang langsung melalui pintu masuk ke Jawa Barat hingga April 2020. Kedatangan wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Barat melalui pintu masuk Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka dan Pelabuhan Muarajati di Kota Cirebon

b. Sektor UMKM

Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus meningkat setiap tahunnya, namun Pandemi COVID-19 yang muncul pada tahun 2020 membuat sektor UMKM mengalami penurunan hanya UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital yang dapat bertahan.

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh BPS dalam kurun waktu 10-26 Juli 2020, sebanyak 5 (lima) dari 10 (sepuluh) perusahaan di Jawa Barat masih beroperasi seperti biasa. Namun sebanyak 28,1 persen UMKM di Jawa Barat berhenti beroperasi, 52,4 persen beroperasi normal, 11,6 persen melebihi kapasitas dan 7,6 persen mengurangi kapasitas. Adapun 3 (tiga) sektor tertinggi perusahaan yang masih beroperasi, yaitu air dan pengelolaan sampah (77,88 persen), real estate (77,87 persen) serta komunikasi dan informasi (66,86 persen). Kemudian, Sebanyak 86 persen di sektor UMKM mengalami penurunan pendapatan, 11 persen pendapatan tetap dan 2 persen pendapatannya meningkat. (BPS, 2020). Adapun sektor usaha yang paling terdampak covid sebagai berikut:

Gambar 3.2
Sektor UMKM Terdampak COVID-19



Sumber: BPS Jawa Barat 2020

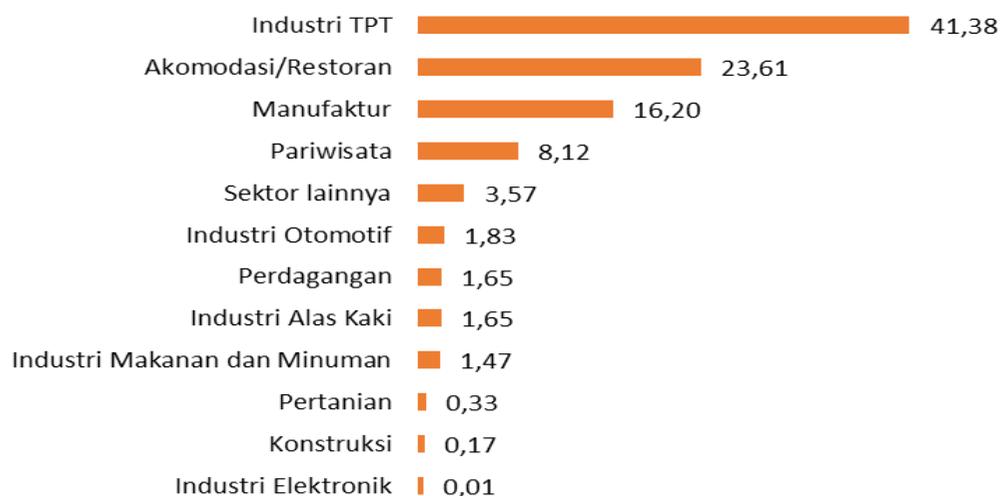
Jika dilihat dari diagram diatas, sektor usaha yang paling terdampak COVID

adalah transportasi dan pergudangan (91,08 persen), jasa perusahaan (91,07 persen), akomodasi dan makan minum (90,54 persen), konstruksi (90,32 persen), dan industri pengolahan (90,21 persen). (BPS, 2020).

c. Sektor Ketenagakerjaan

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (para pekerja/buruh). Salah satu alasan yang melandasi tidak naiknya upah karena banyak perusahaan di Jawa Barat yang pendapatannya jauh dari target dampak pandemi COVID-19. Pandemi juga membuat perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji, hingga merumahkan sementara sebagian pekerjanya. (Jabar.idntimes.com). Berdasarkan data November 2020, 2.001 perusahaan dan total pekerja/buruh 112.293 orang yang terdampak dari COVID-19.

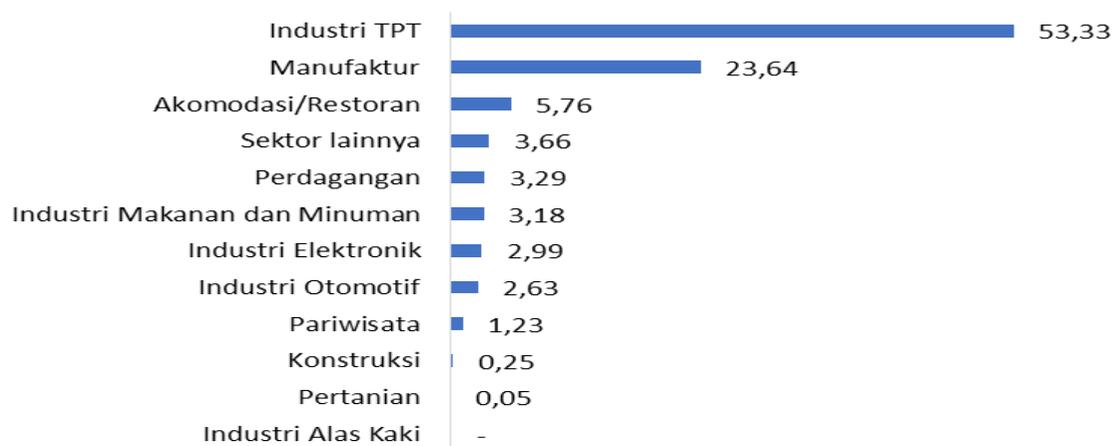
Gambar 3.3
Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan Dampak COVID-19
Per Sektor Usaha (%)



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi COVID-19 adalah sektor industri TPT dengan persentase sebesar 41,38 persen, kemudian sektor akomodasi/restoran sebesar 23,61 persen dan sektor usaha manufaktur sebesar 16,20 persen. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah sektor industri elektronik dan sebesar kontruksi dengan persentase masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,17 persen. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang terdampak COVID-19 dan mengadaptasi kebijakan merumahkan pekerja/buruh adalah sebanyak 987 perusahaan dengan total 80.151 pekerja buruh yang terdampak.

Gambar 3.4
Persentase Pekerja/Buruh yang Di_PHK Dampak COVID-19
Per Sektor Usaha (%)



Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Barat 2020

Kebijakan lain selain merumahkan pekerja/buruh sebagai akibat dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh. Dari total sebanyak 2.001 perusahaan terdampak, sebanyak 474 perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerja/buruh dengan total 19.384 pekerja/buruh mengalami PHK. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui informasi mengenai persentase pekerja/buruh yang terkena PHK per sektor usaha. Industri TPT memiliki persentase paling besar dalam jumlah pekerja/buruh yang di-PHK akibat dampak COVID-19 sebanyak 53,33 persen disusul dengan sektor manufaktur dengan persentase sebesar 23,64 persen dan sektor akomodasi/restoran sebesar 5,76 persen. Sektor konstruksi, pertanian, dan industri alas kaki memiliki persentase yang sangat kecil dalam pemberlakuan PHK terhadap pekerja/buruh dengan persentase kurang dari 1 persen.

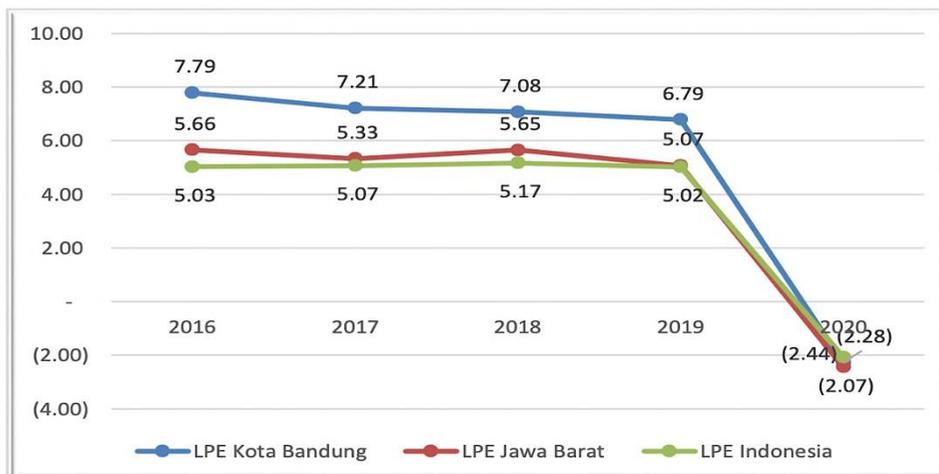
3.1.4. Kondisi Ekonomi Kota Bandung

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,28 persen. Sejak tahun 2016 kecenderungan perekonomian Kota Bandung mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung menurun drastis. Hal ini diakibatkan oleh adanya kontraksi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2020, khususnya sektor jasa yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

Grafik 3.2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung,
Jawa Barat, dan Indonesia Tahun 2016- 2020



Sumber: BPS Kota Bandung 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2020 sebesar Rp. 193.144.954,00 juta rupiah yang menurun jika dibandingkan dengan agregat PDRB ADHK tahun 2019 sebesar Rp. 197.642.705,13 juta rupiah, atau jumlahnya menurun sebesar Rp. 4.497.751,13 juta rupiah atau 2,28%. Pada tahun 2020, 10 (sepuluh) lapangan usaha lapangan usaha di Kota Bandung mengalami kontraksi, 6 (enam) lapangan usaha lapangan usaha mengalami pertumbuhan.

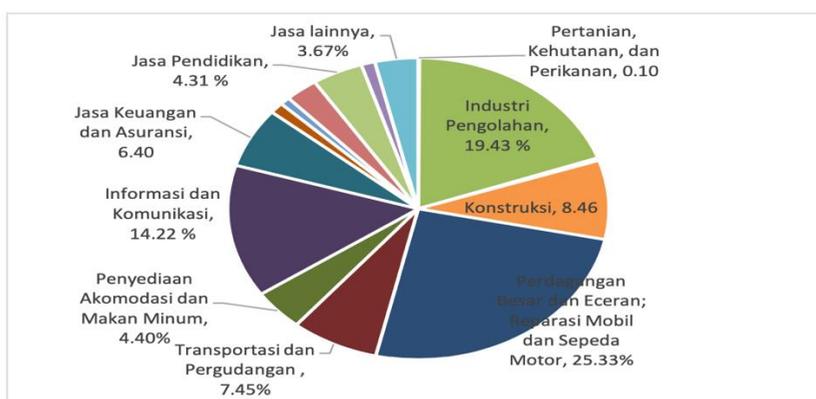
Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan kinerja ekonomi terbesar. Pada tahun 2020 lapangan usaha ini menurun 23,61% dibandingkan tahun 2019. Tiga lapangan usaha lainnya juga mengalami penurunan lebih dari 10,00% adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,25%, Jasa Lainnya sebesar 14,18%, dan Jasa Perusahaan 10,72%. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan lapangan usaha terbesar dalam PDRB Kota Bandung menurun sebesar 9,93 %. Sedangkan lapangan usaha industri yang merupakan lapangan usaha terbesar kedua di Kota Bandung tumbuh melambat sebesar 0,21 %.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Lapangan usaha ini tumbuh 32,26 % pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan masyarakat dilakukan secara *daring* untuk mencegah penyebaran covid-19. Lapangan usaha Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang meningkat 7,71 %. Lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan meski melambat pada tahun 2020 adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,46 %, Jasa Keuangan sebesar 2,27 %, dan *Real Estate* sebesar 1,22 %.

2) Struktur Ekonomi

Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan katagori dengan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebesar 25,33 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,43 persen. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan lapangan usaha Konstruksi merupakan lapangan usaha ketiga dalam struktur perekonomian Kota Bandung tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 14,22 persen. Secara bersamaan ketiga ketegori tersebut memberikan kontribusi sebesar 58,98 persen pada perekonomian Kota Bandung tahun 2020.

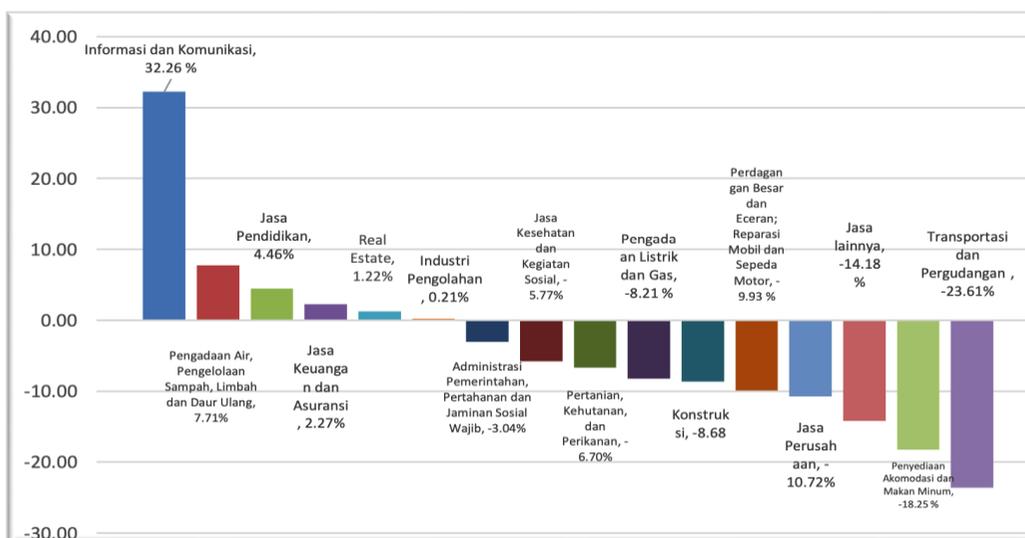
Grafik 3.3
Struktur Ekonomi Kota Bandung Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Bandung 202

Struktur ekonomi Kota Bandung Tahun 2020 mengalami pergeseran dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, dimana lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dan lapangan usaha Jasa Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha dengan terbesar ketiga dan keempat pada pembentukan PDRB tahun 2019.

Grafik 3.4
LPE Kota Bandung Tahun 2020 menurut Lapangan Usaha



Sumber : BPS Kota Bandung 2021

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berakibat pada terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran sektor ekonomi yang menopang pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Sektor jasa yang berkaitan dengan industri komunikasi dan informasi, pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, perumahan dan industri pengolahan yang berkaitan dengan alat-alat kesehatan menjadi sektor penyangga yang mencegah kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tidak terlalu dalam.

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan tekanan yang berat pada perekonomian Kota Bandung. Adanya pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan aktivitas ekonomi yang meliputi proses produksi, konsumsi dan distribusi menjadi terganggu. Sektor ekonomi riil yang menjadi roda penggerak perekonomian dan andalan penerimaan PAD Kota Bandung dari sektor pariwisata, UMKM, perdagangan, industri kreatif dan jasa pun nyaris terhenti total.

Pada awal tahun 2020 terjadinya pandemi Covid 19, tingkat hunian hotel-hotel di Kota Bandung menurun drastis pada titik terendah berkisar 5%-10%. Banyak para pelaku usaha perhotelan menutup usahanya karena tidak mampu menanggung beban biaya operasional. Berdasarkan data PHRI Provinsi Jawa Barat pada bulan April 2020 sebanyak 175 hotel dan restoran di Kota Bandung telah ditutup dan diprediksikan akan terus bertambah jika PSBB diterapkan secara berkepanjangan. Pada pertengahan sampai dengan akhir tahun 2020 tingkat hunian hotel di Jawa Barat khususnya Kota Bandung agak membaik berkisar 50%-80% tapi belum sepenuhnya pulih karena kegiatan kepariwisataan masih dibatasi disesuaikan dengan turun naiknya tingkat penularan Covid 19 di Kota Bandung.

Sementara pelaku usaha UMKM kesulitan untuk memasarkan produknya karena permintaan menurun tajam. Banyak para pelaku usaha UMKM mengalami penurunan omset dan pendapatan. Akibatnya beberapa usaha UMKM ada yang tutup total, berhenti sementara, mengubah cara penjualan secara daring atau melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi barang atau alat kesehatan seperti masker, APD, *faceshield* dan cairan desinfektan untuk bertahan agar usahanya tetap jalan. Berdasarkan data Dinas KUKM Kota Bandung ada 996 pelaku usaha UKM Kota Bandung yang terdampak pandemi Covid-19 dengan permasalahan penurunan omset, kekurangan modal dan kesulitan pemasaran.

Sektor tenaga kerja tidak luput dari pandemi covid 19, kasus Pemutusan Hubungan Kerja banyak terjadi. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ada 2.313 perusahaan dan 9.712 pekerja yang terdampak pandemi

Covid-19 pada tahun 2020. Jumlah ini kemungkinan akan semakin bertambah seiring banyak perusahaan-perusahaan jasa pariwisata, perdagangan dan hiburan di Kota Bandung yang menutup usahanya.

Menurunnya kemampuan daya beli masyarakat menyebabkan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mengalami kontraksi, sehingga kontribusinya menurun. Investasi dan ekspor impor Kota Bandung turut terdampak mengalami penurunan, sehingga menambah semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2020.

3) Inflasi

Bulan Desember 2020 Kota Bandung terjadi inflasi sebesar 0,39 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69. IHK bulan Desember naik jika dibandingkan dengan IHK bulan November 2020 yaitu sebesar 105,28. Laju inflasi tahun kalender 2020 “year to date” Kota Bandung sebesar 1,75 persen dan laju inflasi tahun ke tahun “year on year” (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,75 persen.

Inflasi Desember 2020 ini terjadi karena adanya kenaikan indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,45 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen; kelompok transportasi sebesar 0,11 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,17 persen.

Adapun kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,40 persen. Sedangkan kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman / restoran tidak mengalami perubahan indeks harga.

4) Kesejahteraan Penduduk

a. Pemerataan Pendapatan

Tingkat pemerataan dapat diukur menggunakan indeks Gini Rasio. Nilai Gini Rasio yang meningkat, mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Suatu wilayah yang memiliki nilai Gini rasio di atas 0,5 maka menunjukkan tingkat ketimpangan yang besar dan bila nilainya kurang dari 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah. Nilai diantara keduanya menunjukkan ketimpangan sedang. Umumnya kawasan metropolitan yang menjadi pusat ekonomi cenderung memiliki nilai Gini Rasio yang tinggi, berbanding terbalik dengan kawasan non urban yang lebih merata.

Pandemi covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada banyaknya kerugian pada dunia usaha di Kota Bandung. Khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa usaha pariwisata, perdagangan dan hiburan banyak yang menutup usahanya, akibatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat. Namun secara umum kondisi sulit berupa berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid 19 dialami oleh seluruh strata masyarakat dan level kelas pekerja atas, menengah dan bawah secara merata. Sehingga berdasarkan data Gini Ratio BPS Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020, Kota Bandung mengalami sedikit penurunan kesenjangan pendapatan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2019 walaupun relatif kecil.

Gini Ratio Kota Bandung pada tahun 2019 sebesar 0,430 sementara Gini Ratio tahun 2020 sebesar 0,402 atau turun 0,028 poin. Penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis pada tahun 2020, berakibat terjadinya multiplier efek dampak secara estafet dan massif. Banyak terjadi PHK mengakibatkan orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, berakibat pada angka pengangguran dan angka kemiskinan bertambah. Dampak pandemi Covid 19 yang massif tersebut diprediksikan agak mengurangi kesenjangan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Bandung walaupun kecil. Diharapkan pada tahun 2021 nilai Gini Ratio Kota Bandung minimal tetap angka atau sedikit menurun, mengingat pandemi Covid 19 sampai dengan saat ini belum bisa dikendalikan sepenuhnya, tingkat penularan Covid 19 masih turun naik dan tingkat kematian masih relatif tinggi.

b. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data BPS Kota Bandung, tingkat Jumlah angkatan kerja Kota Bandung pada Agustus 2020 sebanyak 1.314.930 orang, turun 11.440 orang dibanding Agustus 2019. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 1,19 persen poin dari 65,90 persen menjadi 64,71 persen pada Agustus 2020. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 38.573 orang sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 11,19 persen pada Agustus 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 15,88 persen.

Penduduk yang bekerja sebanyak 1.167.849 orang, berkurang 50.013 orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada bidang Jasa (0,17 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada bidang manufaktur (0,18 persen poin). Sebanyak 487.485 orang (41,74 persen) bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal naik sebesar 8,85 persen poin dibandingkan Agustus 2019.

c. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bandung pada bulan Maret 2020 mencapai 100,02 ribu orang (3,99 persen), bertambah sebanyak 15,35 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang sebesar 84,67 ribu orang (3,38 persen). Garis Kemiskinan Kota Bandung pada Maret 2020 sebesar Rp 500.452,- per kapita per bulan, sedangkan pada Maret 2019 Rp 474.448,-. Selama Periode Maret 2019 hingga Maret 2020 terjadi kenaikan sebesar Rp 26.004,-. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bandung terjadi kenaikan dari 0,53 pada Maret 2019 menjadi 0,61 pada Maret 2020. Hal ini menandakan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Bandung terjadi penurunan dari 0,14 pada Maret 2019 menjadi 0,13 pada Maret 2020. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung Tahun 2019 adalah sebesar 81,62. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebesar 81,51. Angka ini berkurang 0,11 poin dibanding dengan IPM Kota Bandung Tahun 2019 yang mencapai 81,62. IPM Kota Bandung merupakan IPM tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Umur Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2020 mencapai 74,28 tahun, naik 0,14 tahun dari tahun 2019. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah naik 0,01 tahun dibandingkan tahun 2019. Pengeluaran per kapita Kota Bandung tahun 2020 adalah sebesar Rp 16.887.000 turun dari tahun lalu yang sebesar Rp 17.254.000.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 telah mempengaruhi besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020. Pandemi ini telah mempengaruhi pola kehidupan di masyarakat yang ternyata berpengaruh pula pada komponen pembangunan manusia. Angka IPM Kota Bandung tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang merupakan penurunan pertama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung namun terjadi pula di beberapa kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.

5) Indikator Makro

Indikator Makro merupakan parameter yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja hasil pembangunan dari adanya penyelenggaraan Pemerintah Kota

Bandung. Indikator makro memberi gambaran pencapaian hasil pembangunan sosial ekonomi di Kota Bandung. Ketercapaian tujuan pembangunan dapat dilihat dari perbandingan target yang telah di tentukan dalam dokumen rencana pembangunan selama lima tahun dengan angka realisasi Indikator Makro setiap tahun. Realiasi Indikator Makro pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2016 – 2020

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	IPM	Poin	80,13	80,31	81,06	81,62	81,51
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,58	10,59	10,63	10,74	10,75
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,89	13,90	14,18	14,19	14,20
4.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,84	73,86	74,00	74,14	74,28
5.	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	15,80	16,03	16,63	17,25	16.887
6.	LPE	%	7,79	7,21	7,08	6,79	-2,28
7.	PDRB (Berlaku)	Trilyun Rp	217,04	240,11	264,55	289,31	283,62
8.	PDRB per Kapita (Berlaku)	Juta Rp	87,14	96,12	105,66	115,36	112,99
9.	PDRB (Konstan)	Trilyun Rp	161,23	172,85	185,08	197,64	193,14
10.	PDRB per Kapita (Konstan)	Juta Rp	64,73	69,2	73,92	78,81	76,95
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,02	8,44	8,01	8,16	11,19
12.	Inflasi	%	2,93	3,46	3,76	2,78	1,75
13.	Tingkat Kemiskinan	%	4,32	4,17	3,57	3,38	3,99
14.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	107,57	103,98	89,38	84,67	100,02
15.	Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini)	Rasio	0,44	0,43	0,42	0,430	0,402

Sumber : BPS Kota Bandung dan Jawa Barat 2021

3.2. ASUMSI DASAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bandung tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 serta situasi dinamika tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021, merupakan rencana pada tahun ketiga Kepala Daerah periode 2018-2023 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung tahap IV. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat tergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan yang disepakati.

Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021, berfokus pada target kinerja periode RPJMD Tahun 2018-2023 yang masih belum tercapai serta permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Tahun 2021, serta berpedoman pada tahap ke 4 RPJPD Kota

Bandung Tahun 2005-2025. Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidakterseidannya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah); Pendapatan Transfer (meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat, dan transfer antar daerah); Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan).

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

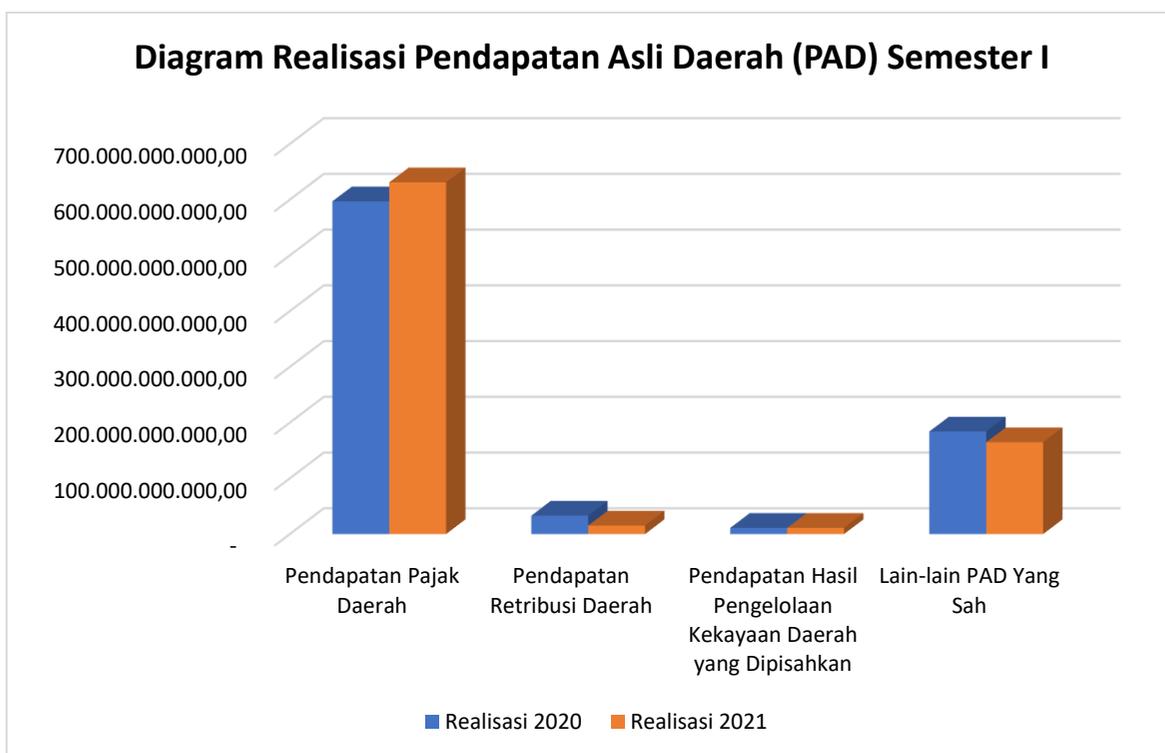
Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumberdaya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah. Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2021, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka

pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah; dan arah kebijakan pembiayaan daerah memerlukan penyesuaian untuk merespon kondisi tersebut.

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung pada tahun 2021 masing-masing mencapai Rp 5.875.504.322.920,00 untuk pendapatan daerah dan Rp 6.302.234.816.430,95 untuk belanja daerah. Hal ini dipengaruhi oleh Peningkatan Kasus Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PPKM Darurat Wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan Imendagri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kemudian dilanjutkan dengan PPKM Mikro Level 4 sesuai dengan Imendagri 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Penurunan pendapatan tersebut dapat dilihat dalam Diagram sebagai berikut :

Grafik 3.5
Diagram Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester 1



Dari diagram terlihat bahwa Realisasi PAD Kota Bandung sangat terpengaruh oleh Kebijakan Penanganan Covid, baik PSBB pada tahun 2020 maupun PPKM Darurat pada tahun 2021. Walaupun kejadiannya pada waktu yang berbeda. Pada Tahun 2020 PSBB diberlakukan pada bulan Maret – Juni, sedangkan pada Tahun 2022 pemberlakuan PPKM Darurat diberlakukan pada Bulan Juli s.d. Agustus. Realisasi PAD sampai dengan Semester I baru mencapai 35,92 %, dengan rincian

Pajak Daerah 23,37%; Retribusi Daerah 22,09%; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 58,81%; dan Lain-Lain PAD yang Sah 32,13%.

3.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan kondisi ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dasar atau pertimbangan yang digunakan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 adalah adanya kondisi sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan juga hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada awal tahun 2021, meliputi:

1. Perubahan asumsi ekonomi makro;
2. Perubahan kebijakan pusat dan provinsi; serta
3. Permasalahan aktual yang berkembang.

Berdasarkan perubahan asumsi serta kebijakan ekonomi makro maupun mikro, dilakukan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah kota sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 mengalami penurunan karena perlambatan ekonomi sebagai dampak global dari pandemik Covid-19. Kebijakan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan, dengan cara menciptakan kemudahan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak daerah;
3. Relaksasi dibidang perekonomian, secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.

Proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Bandung Tahun 2021, diperkirakan berada pada nilai Rp 6,4 triliun, turun sebesar Rp 107,1 M dari pendapatan daerah pada APBD Murni tahun anggaran 2021 sebesar Rp 6,5 triliun. Penurunan tersebut berasal dari penurunan pendapatan pajak daerah, dan dana alokasi umum serta kurang salur dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Rincian belanja pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Rincian Kebijakan Pendapatan pada APBD Tahun 2021, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)			SELISIH
		APBD 2021*	APBD 2021 (Pergeseran)**	Proyeksi Perubahan RKPD 2021***	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
1	PENDAPATAN	6.580.614.037.980,00	6.885.376.058.091,00	6.473.511.687.331,00	(107.102.350.649,00)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.300.827.453.188,00	3.300.827.453.188,00	2.679.054.328.188,00	(621.773.125.000,00)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.700.000.000.000,00	2.700.000.000.000,00	2.078.000.000.000,00	(622.000.000.000,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	69.286.809.600,00	69.286.809.600,00	69.506.809.600,00	220.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.885.582.468,00	18.885.582.468,00	18.885.582.468,00	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	512.655.061.120,00	512.655.061.120,00	512.661.936.120,00	6.875.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.255.786.584.792,00	3.560.548.604.903,00	3.550.676.869.732,00	294.890.284.940,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.418.235.485.000,00	2.435.259.580.000,00	2.383.444.035.000,00	(34.791.450.000,00)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	837.551.099.792,00	1.125.289.024.903,00	1.167.232.834.732,00	329.681.734.940,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	243.780.489.411,00	219.780.489.411,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	-
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00	0,00	219.749.489.411,00	0,00

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2021

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 Ke V

*** Proyeksi Perubahan RKPD 2021

3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021, disesuaikan berdasarkan :

1. Adanya koreksi Alokasi Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 51,8 Milyar, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni (semester satu);
3. Sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan hal tersebut, maka perlu melakukan efisiensi belanja dengan melakukan penyesuaian realokasi/refocusing Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 :

1. Penundaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak prioritas dan atau dari sisi pencapaian kinerja dan estimasi waktu tidak dapat dilaksanakan.
2. Efisiensi pada rekening belanja tertentu secara selektif sebagai berikut :
 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
 - Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
 - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
 - Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
 - Belanja Sosialisasi
 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
 - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
 - Belanja Modal Komputer Jaringan
 - Belanja Modal Personal Computer
 - Belanja Modal Peralatan Personal Computer
 - Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
 - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
3. Efisiensi / sisa lelang tidak diperkenankan untuk digunakan kembali, karena peruntukannya untuk menutup defisit belanja tahun berjalan.

Proyeksi total belanja daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021, diperkirakan sebesar Rp 6,9 triliun, naik sebesar Rp 344,4 miliar dari belanja daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6,9 triliun. Rincian belanja pada Perubahan APBD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rincian Kebijakan Belanja pada APBD Tahun 2021, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)			SELISIH
		APBD 2021*	APBD 2021 (Pergeseran)**	Proyeksi Perubahan RKPD 2021**	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
2	BELANJA	6.555.755.475.956,00	7.019.893.369.712,00	6.900.242.180.842,00	344.486.704.886,00
2.1	BELANJA OPERASI	5.677.081.544.918,00	5.845.386.096.551,00	5.812.551.838.414,00	135.470.293.496,00
2.1.1	Belanja Pegawai	2.724.824.499.901,00	2.684.463.467.632,00	2.755.507.298.657,00	30.682.798.756,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.552.332.072.172,00	2.716.922.651.619,00	2.689.722.602.457,00	137.390.530.285,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	79.943.159.300,00	79.943.159.300,00	79.943.159.300,00	-
2.1.5	Belanja Hibah	186.619.678.545,00	230.669.683.000,00	229.241.528.000,00	42.621.849.455,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	133.362.135.000,00	133.387.135.000,00	58.137.250.000,00	(75.224.885.000,00)
2.2	BELANJA MODAL	823.450.911.365,00	1.044.694.257.488,00	957.877.326.755,00	134.426.415.390,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.473.019.673,00	96.063.015.673,00	96.063.015.673,00	74.589.996.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00	33.750.000.000,00	-

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2021

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 ke V

*** Proyeksi Perubahan RKPD 2021

3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengertian pembiayaan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Penerimaan pembiayaan daerah mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan penerimaan piutang daerah.
- Pengeluaran pembiayaan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dengan memperhatikan realisasi APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 dan evaluasi terhadap pembiayaan sampai dengan bulan Juni 2021, maka kebijakan pembiayaan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 diarahkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 disesuaikan dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Pembayaran pokok utang sebagai konsekuensi terhadap penerimaan pinjaman daerah.
- Penyertaan modal kepada BUMD sebagai konsekuensi terhadap penerimaan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Terkait dengan pinjaman daerah dan pembayaran pokok utang merupakan bentuk antisipasi apabila diperlukan untuk penanggulangan bencana. Rincian pembiayaan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Rincian Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Bandung pada APBD Tahun 2021, Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)			SELISIH
		APBD 2021*	APBD 2021 (Pergeseran V)**	Proyeksi Perubahan RKPD 2021**	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(24.858.562.024,00)	186.225.059.458,00	478.438.241.347,95	503.296.803.371,95
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.849.185.812,00	186.225.059.458,00	478.438.241.347,95	451.589.055.535,95
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.849.185.812,00	186.225.059.458,00	478.438.241.347,95	451.589.055.535,95
3.1.2	Penerimaan Pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	51.707.747.836,00	51.707.747.836,00	51.707.747.836,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	27.707.747.836,00	27.707.747.836,00	27.707.747.836,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(24.858.562.024,00)	134.517.311.621,00	426.730.493.510,95	451.589.055.534,95
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: *Perda APBD Tahun Anggaran 2021

** Perwal Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 Ke V

*** Proyeksi Perubahan RKPD 2021

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas merupakan fokus pembangunan yang harus didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, didasarkan pada tingkat urgensi aspek pembangunan. Upaya untuk memprioritaskan salah satu aspek pembangunan disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah yang pada gilirannya dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2021 mengacu dan memperhatikan:

- (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023;
- (2) Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2020 dan RKPD Tahun 2021;
- (3) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
- (4) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2021; dan
- (6) RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti terhadap NAWACITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.

- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan Kota Bandung tahun 2021 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dengan penjabaran sebagai berikut.

Misi 1 “Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing”: Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata. dengan sasaran:

1. Meningkatnya pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
3. Meningkatnya masyarakat kota yang humanis.

Misi 2 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih”: Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Misi 3 “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan”: Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat

yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota.

Misi 4 "Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan" : Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas

Misi 5 "Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi": Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta, dengan sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi pembangunan;

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka panjang, jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2020, maka tema pembangunan yang diusung pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

"Memantapkan Kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien".

Seiring dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia, telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Implikasi pandemi

Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Khususnya di Kota Bandung, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antarprogram.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Bandung melakukan *refocusing* untuk penanganan Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 gelombang kedua khususnya pada penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Covid-19, sehingga berdampak pada perubahan prioritas pembangunan pada tahun 2021 yang dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat

prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode ke IV. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1. TELAAHAN AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Visi pembangunan 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Misi 7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatua

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mewujudkan 7 agenda pembangunan nasional, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional

No	Agenda	Sasaran
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Pembangunan kewilayahan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan 2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk 3. Terpenuhinya layanan dasar 4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda 5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya 2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat 5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa 6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar 2. Meningkatnya konektivitas wilayah 3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan 4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien

No	Agenda	Sasaran
		5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 3. Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: RKP Tahun 2021

Agenda pembangunan nasional tahun 2021 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2021 mengambil tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

4.1.2. TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dirumuskan secara komprehensif sebagai bagian dari pengejawantahan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. **Misi Pertama**, Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. **Misi Kedua**, Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;

3. **Misi Ketiga**, Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. **Misi Keempat**, Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. **Misi Kelima**, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kelima misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional;
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; dan (2) terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan.

5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Indikator kinerja tujuan, sasaran, kondisi capaian tahun lalu dan target tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2021
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban				
1.1	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial		Indeks Demokrasi (Poin)	70,79
1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,60
		b.	Indeks Demokrasi (Poin)	70,79
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif				
2.1	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,19
2.1.1	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,77
		b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	10,45

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2021
2.1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a.	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,06
2.1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	69,60
		b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	89,30
2.1.4	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,58
		b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,52
2.1.5	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	50,00
2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni budaya daerah		Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	19,56
2.2.1	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	19,56
2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	72,00
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah				
3.1.	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Williamson	0,659
3.1.1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.050
3.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	41,00
3.1.3	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,70
3.1.4	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	0
3.2.	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	60,78
3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	60,78

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2021
	perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	4,29
		c.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen)	51,70
3.2.2	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (Poin)	1,1922
3.2.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	149,00
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.				
4.1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	3,15
4.1.1	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	84,00
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	102,25
4.1.2	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,91
4.1.3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	2,78
		b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	3,23
4.1.4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	501,52
		b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	19,90
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota				
5.1.	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>		Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB (78,01)
5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB (78,01)
5.1.2.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerja sama Daerah (%)	56,00

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

4.1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

Berdasarkan hasil reviu terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat serta berpedoman terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan dalam perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021.

Tabel 4.3
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021			
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing										
1	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			poin	81,51	81,00		
				1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	14,20	14,21
				2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,28	73,94
				3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	4	Indeks Liveable City aspek Sosial budaya	poin	6,5	6,6
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih										
2	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	2	Indeks Reformasi Birokrasi			nilai	71,75	70		
				3	Level Kematangan Smart City			predikat	B	B
		4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	5	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	persen	96,67	80		
				6	Nilai AKIP	predikat	BB	BB		
				7	Opini BPK	predikat	WTP	WTP		
				8	Indeks Sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE)	poin	3,20	3,25		
				9	Nilai LPPD	Skor	3,4013	3,4023		
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan										
3	Terciptanya Pertumbuhan	4	Laju Pertumbuhan			persen	-2,28	3,92		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021			
	Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan		Ekonomi (LPE)							
		5	Gini Ratio			poin	0,402	0,401		
		6	PDRB Per Kapita			juta rupiah/orang	76,95	76,03		
		7	Pengeluaran Per Kapita				ribu rupiah/orang	16.887	16.798	
				5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	10	Indeks Daya Saing Pariwisata	poin	3,29	3,29
						11	Angka Kemiskinan	poin	3,99	3,49
				12	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	11,19	11,08		
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan										
4	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	8	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur			poin	N/A	7,775		
				6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	43,90	44,00
						14	Persentase Luasan RTH	persen	12,25	12,80
						15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	persen	98,32	98,50
				7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	16	Persentase Penurunan Kemacetan	persen	24,35	20,87
						17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	persen	2,94	2,80
						18	Cakupan Pelayanan Air Minum	persen	79,38	81
						19	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	67,65	58,82
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi										
5	Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	9	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan			persen	7,13	5,98		
				8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	persen	7,13	5,98

Sumber: Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023, diolah

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 disusun dengan memperhatikan:

Prioritas I:

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bandung Tahap ke IV, kinerja RPJMD periode 2018-2023 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan Tahun 2020, permasalahan pembangunan Kota Bandung yang belum tertangani, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi.

Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan, kemudian dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Pencapaian SDGs;
8. Pencapaian SPM.

Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, ditentukan prioritas dengan melihat sasaran daerah yang memiliki skor tertinggi, untuk kinerja yang sejenis dikelompokkan dalam satu pernyataan prioritas, proses pembobotan disajikan dalam bentuk tabel (terlampir).

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas layanan air bersih;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan perekonomian kota.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan, maka berdasarkan kajian para akademisi, prioritas pembangunan Kota Bandung pada tahun 2021 mengalami perubahan, yaitu:

1. Peningkatan perekonomian kota;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas;
4. Peningkatan kualitas layanan air bersih;
5. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Dampak Ekonomi akibat Covid-19
2. Penanggulangan Dampak Sosial akibat Covid-19
3. Peningkatan Sistem Kesehatan Daerah

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program/kegiatan tersebut menjadi bagian dari Pembangunan Jangka Menengah pada periode 2018-2023 pada tahun ketiga.

4.2.1 SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI

4.2.01.01 Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional

Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020.

Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan fokus pembangunan pada:

1. pemulihan industri, pariwisata, dan investasi;
2. reformasi sistem kesehatan nasional;
3. reformasi sistem perlindungan sosial; dan
4. reformasi sistem ketahanan bencana.

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2021 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan

dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas

wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta mempedomani RPJMN 2020-2024. Sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2021 dengan Prioritas Nasional Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021
dengan Prioritas Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan perekonomian kota
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 diolah

Selain memperhatikan prioritas nasional, pembangunan Kota Bandung juga harus mempertimbangkan kebijakan global yang akan berpengaruh terhadap pembangunan kota, Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	Peningkatan perekonomian kota
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
5	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;	-
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;	Peningkatan kualitas layanan air bersih

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	Peningkatan perekonomian kota
9	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
10	Mengurangi kesenjangan;	Peningkatan perekonomian kota
11	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	Peningkatan perekonomian kota
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
14	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	-
15	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan;	Peningkatan kualitas layanan air bersih; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (<i>means of implementation</i>) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	-

SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DENGAN PRIORITAS PROVINSI

Selain berpedoman terhadap prioritas nasional, pembangunan Kota Bandung juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Jawa Barat. Sama halnya dengan pembangunan nasional, tema pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan daerah yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan**

Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemenuhan Pelayanan Dasar
2. Peningkatan Konektivitas Wilayah
3. Pemulihan Ekonomi Masyarakat
4. Penguatan Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, berikut merupakan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Tabel 4.6
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2021
1.	Akses pendidikan untuk semua	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
2.	Desentralisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3.	Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi	Peningkatan perekonomian kota
4.	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Peningkatan perekonomian kota
5.	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	-
6.	Infrastruktur konektivitas wilayah	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
7.	Gerakan bangun desa (Gerbang desa)	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas
8.	Subsidi gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah)	Peningkatan perekonomian kota
9.	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (reformasi birokrasi)	-

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diolah

4.2.2 PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2021

Prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2021 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD Tahun 2021, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung atau *supporting*. Berikut merupakan sasaran pembangunan dan program prioritas pembangunan serta strategi dan arah

kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

1. Peningkatan perekonomian kota;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas;
4. Peningkatan kualitas layanan air bersih;
5. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tabel 4.7
Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2021

No	Prioritas	Sasaran	Program Prioritas
1	Peningkatan Perekonomian Kota	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program pemasaran pariwisata
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan intelektual
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pengembangan UMKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			

No	Prioritas	Sasaran	Program Prioritas
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengembangan UMKM
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengawasan Keamanan Pangan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Infrastruktur kota yang terpadu dan berkualitas;	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Program Pengelolaan Perkeretaapian
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Penanggulangan Kemiskinan dan PPKS	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Program pemasaran pariwisata
			Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Promosi Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Program Pengembangan Ekspor
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

No	Prioritas	Sasaran	Program Prioritas
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program pelatihan kerja dan produktivitas Tenaga Kerja Program penempatan tenaga kerja Program Hubungan Industrial Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengembangan UMKM
5	Peningkatan Kualitas Layanan Air Bersih	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengelolaan Persampahan

No	Prioritas	Sasaran	Program Prioritas
6	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Program Pembinaan Perpustakaan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Sumber: Rancangan Awal Perubahan Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

Program Prioritas Kota Bandung merupakan program yang telah sesuai dengan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran daerah berikut indikator kinerja dan targetnya. Sinkronisasi terhadap indikator kinerja dan target program dilakukan untuk memastikan sasaran daerah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan indikator dan target kinerja yang sesuai, dengan cara mencapai sasaran disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing				
1.1	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan
			Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Terimplementasi Kurikulum Pendidikan
				Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya Budaya Baca	Meningkatnya Akses dan Kualitas Perpustakaan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat, Budaya Sehat, dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan
				Meningkatnya Kualitas Sarana Kesehatan Lingkungan
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan (YAN)
				Meningkatnya Upaya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (YAN)
				Meningkatnya Kualitas Pangan dan Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatnya Kebugaran Fisik Masyarakat
		Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Meningkatnya Budaya Masyarakat Kota yang Rukun dan Tertib	Terwujudnya Kerukunan
				Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
			Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat dan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Meningkatnya gotong royong
				Meningkatnya Peran Pemuda dalam pembangunan
			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya
				Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Seni Tradisi
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Ketahanan Keluarga, Perlindungan Perempuan, dan Anak	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
				Meningkatnya Ketahanan Keluarga
				Meningkatnya fungsi sosial masyarakat dan perlindungan disabilitas
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih				
2.1	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pengawasan dan Keuangan
				Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah serta kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
				Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan
			Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN
				Meningkatnya Ketatalaksanaan yang Efektif dan Efisien (PD berbasis elektronik)
			Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan				
3.1	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata	Meningkatnya Kualitas Objek Daya Tarik Wisata
				Meningkatnya Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Meningkatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Investasi	Meningkatnya Investasi
			Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya daya saing produk unggulan serta iklim perdagangan dan industri yang kondusif
				Terwujudnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok
				Meningkatnya pelaku usaha Kecil dan Menengah berdaya saing
				Meningkatkan daya saing produk unggulan serta iklim perdagangan dan industri yang kondusif
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Koperasi
			Terwujudnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin
				Meningkatnya Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin
				Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin
				Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
				Terwujudnya Bantuan Sosial
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi/kualitas dan produktivitas Tenaga kerja
Meningkatnya Kesempatan Kerja				
Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
Meningkatnya Kemampuan Pelaku Usaha Mikro	Meningkatnya Kemampuan pelaku Usaha Mikro			
Pemberdayaan Masyarakat Pangan	Meningkatnya Pelaku Usaha Pangan			
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pangan			
Meningkatnya Kemitraan Usaha	Meningkatnya Kemitraan usaha mikro			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan				
4.1	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Menurunnya Sumber Pencemaran Air
				Menurunnya Sumber Pencemaran Udara
			Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Kuantitas RTH Publik
				Meningkatnya Kuantitas RTH Privat
			Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Sampah	Menurunnya timbulan sampah yang ditangani
				Meningkatnya capaian pengurangan sampah
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Menurunnya Titik Kemacetan	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
				Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan
				Meningkatnya kemandapan jalan
			Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh	Meningkatnya kualitas hunian permukiman
				Meningkatnya akses pelayanan limbah domestik
			Meningkatnya Pelayanan Air Minum	Meningkatnya akses air minum
			Menurunnya Genangan	Meningkatnya fungsi sarana prasarana penurunan genangan bidang sumber daya air
				Meningkatnya fungsi saluran drainase jalan
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi				
5.1	Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
			Meningkatnya Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan	Meningkatnya Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga
				Meningkatnya Skema Pembiayaan Lainnya

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. PAGU INDIKATIF PENDANAAN DAERAH

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan standar akuntabilitas publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Selain pertimbangan tersebut, perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 juga dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dampaknya, untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, diantaranya perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19, yang digunakan untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19.
2. Penurunan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi yang diakibatkan penutupan kegiatan wajib pajak pada saat AKB dan PPKM, sehingga perlu ada rasionalisasi anggaran secara signifikan.

Alokasi pagu indikatif pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 memperhatikan hal-hal berikut:

- Prioritas I untuk pencapaian kinerja pembangunan daerah dan berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar serta memiliki kepentingan tinggi, memberikan dampak luas kepada masyarakat.
- Prioritas II untuk pencapaian program pokok pencapaian urusan daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
- Program dan kegiatan pada perangkat daerah, dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris

Daerah Nomor: 900/SE.103-Bappelitbang Tanggal 2 Agustus 2021 yang menetapkan bahwa Kepala Perangkat Daerah agar menyesuaikan realokasi/*refocusing* Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Berikut rekapitulasi belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah
pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021

Perangkat Daerah		PAGU BELANJA APBD 2021 (Pergeseran 5)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH	
1		2	3	4=3-2	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Dinas Pendidikan	1,817,287,942,329.00	1,992,925,301,602	175,637,359,273.00
2		Dinas Kesehatan	1,486,498,528,649.00	1,584,588,031,389	98,089,502,740.00
3		Dinas Pekerjaan Umum	297,769,054,528.00	220,507,418,485	(77,261,636,043.00)
4		Dinas Penataan Ruang	69,494,775,567.00	64,477,808,118	(5,016,967,449.00)
5		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	340,502,995,225.00	301,666,129,642	(38,836,865,583.00)
6		Satuan Polisi Pamong Praja	80,686,665,907.00	71,726,622,624	(8,960,043,283.00)
7		Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	50,618,791,883.00	43,569,064,708	(7,049,727,175.00)
8		Dinas Sosial	44,009,135,557.00	33,986,148,912	(10,022,986,645.00)
9	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	Dinas Ketenagakerjaan	33,633,604,408.00	27,399,242,051	(6,234,362,357.00)
10		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	27,137,066,242.00	21,522,363,690	(5,614,702,552.00)
11		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	53,191,184,141.00	45,125,922,067	(8,065,262,074.00)
12		Dinas Lingkungan Hidup	293,112,297,755.00	282,040,774,197	(11,071,523,558.00)
13		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	33,427,246,532.00	33,227,121,682	(200,124,850.00)
14		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25,820,158,294.00	22,953,176,600	(2,866,981,694.00)
15		Dinas Perhubungan	187,642,842,382.00	182,013,192,300	(5,629,650,082.00)
16		Dinas Komunikasi dan Informatika	48,090,314,337.00	46,421,128,524	(1,669,185,813.00)
17		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	30,434,858,485.00	25,634,153,021	(4,800,705,464.00)
18		Dinas Penanaman Modal dan	37,330,202,715.00	35,531,300,988	(1,798,901,727.00)

Perangkat Daerah		PAGU BELANJA APBD 2021 (Pergeseran 5)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH	
1		2	3	4=3-2	
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
19		Dinas Pemuda dan Olahraga	122,874,248,795.00	111,888,626,262	(10,985,622,533.00)
20		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	59,278,061,398.00	50,680,393,251	(8,597,668,147.00)
21		Dinas Arsip dan Perpustakaan	23,337,126,283.00	20,142,284,021	(3,194,842,262.00)
22	URUSAN PILIHAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	40,507,479,638.00	35,581,506,861	(4,925,972,777.00)
23		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	32,760,993,078.00	32,825,066,030	64,072,952.00
24		Badan Keuangan dan Aset Daerah	160,066,175,437.00	157,941,067,400	(2,125,108,037.00)
25		Badan Pendapatan Daerah	105,697,737,269.00	95,428,161,865	(10,269,575,404.00)
26		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	239,815,635,519.00	230,702,141,677	(9,113,493,842.00)
27	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	SEKRETARIAT DPRD	157,894,190,686.00	148,418,723,922	(9,475,466,764.00)
28		INSPEKTORAT	44,449,161,135.00	42,475,558,315	(1,973,602,820.00)
29		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36,622,644,507.00	33,017,133,440	(3,605,511,067.00)
30		SEKRETARIAT DAERAH	279,458,426,350.00	263,922,809,919	(15,535,616,431.00)
31		Kecamatan Andir	27,258,307,551.00	24,103,106,326	(3,155,201,225.00)
32		Kecamatan Antapani	24,411,856,613.00	20,011,324,658	(4,400,531,955.00)
33		Kecamatan Arcamanik	22,755,316,710.00	19,093,931,206	(3,661,385,504.00)
34		Kecamatan Astana Anyar	24,778,205,382.00	20,763,652,767	(4,014,552,615.00)
35		Kecamatan Babakan Ciparay	28,270,155,231.00	23,696,001,851	(4,574,153,380.00)
36		Kecamatan Bandung Kidul	19,219,944,053.00	16,475,718,113	(2,744,225,940.00)
37		Kecamatan Bandung Kulon	36,075,300,166.00	30,258,043,677	(5,817,256,489.00)
38		Kecamatan Bandung Wetan	17,919,700,798.00	17,194,686,501	(725,014,297.00)
39		Kecamatan Batununggal	37,094,720,136.00	30,666,344,750	(6,428,375,386.00)
40		Kecamatan Bojongloa Kaler	23,908,521,467.00	19,976,684,454	(3,931,837,013.00)
41		Kecamatan Bojongloa Kidul	27,092,281,307.00	23,079,205,824	(4,013,075,483.00)
42		Kecamatan Buahbatu	23,978,145,958.00	19,798,547,383	(4,179,598,575.00)

Perangkat Daerah		PAGU BELANJA APBD 2021 (Pergeseran 5)	PAGU PERUBAHAN RKPD 2021	SELISIH
1		2	3	4=3-2
43	Kecamatan Cibeunying Kaler	24,182,392,501.00	19,909,087,008	(4,273,305,493.00)
44	Kecamatan Cibeunying Kidul	32,728,293,913.00	26,645,959,435	(6,082,334,478.00)
45	Kecamatan Cibiru	22,696,138,529.00	19,013,423,435	(3,682,715,094.00)
46	Kecamatan Cicendo	28,391,634,029.00	23,731,977,963	(4,659,656,066.00)
47	Kecamatan Cidadap	16,706,118,780.00	14,469,613,910	(2,236,504,870.00)
48	Kecamatan Cinambo	18,359,342,593.00	16,008,995,501	(2,350,347,092.00)
49	Kecamatan Coblong	31,580,695,197.00	25,812,247,615	(5,768,447,582.00)
50	Kecamatan Gedebage	20,777,726,324.00	17,634,622,319	(3,143,104,005.00)
51	Kecamatan Kiaracandong	32,332,717,942.00	26,199,105,020	(6,133,612,922.00)
52	Kecamatan Lengkong	32,333,469,691.00	27,095,973,814	(5,237,495,877.00)
53	Kecamatan Mandalajati	22,373,139,715.00	18,570,479,926	(3,802,659,789.00)
54	Kecamatan Panyileukan	20,377,681,223.00	17,505,024,038	(2,872,657,185.00)
55	Kecamatan Rancasari	23,480,467,321.00	19,733,981,054	(3,746,486,267.00)
56	Kecamatan Regol	30,544,421,968.00	25,382,907,798	(5,161,514,170.00)
57	Kecamatan Sukajadi	24,290,525,808.00	22,677,610,864	(1,612,914,944.00)
58	Kecamatan Sukasari	19,225,804,493.00	16,535,238,100	(2,690,566,393.00)
59	Kecamatan Sumur Bandung	20,022,481,510.00	16,951,059,775	(3,071,421,735.00)
60	Kecamatan Ujungberung	27,278,317,772.00	22,909,252,194	(4,369,065,578.00)
	Jumlah	7,019,893,369,712.00	6,900,242,180,842	(119,651,188,870.00)

5.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021

Program dan kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

POSISI SEMULA

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator Kinerja;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan;
- Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
- Sumber Dana.

POSISI MENJADI

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator Kinerja;
- Kelompok Sasaran;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan;
- Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
- Sumber Dana.

Penjelasan lebih rinci terkait rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung pada Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021, dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2021 merupakan dokumen perubahan rencana kerja pembangunan daerah tahun ketiga dari penjabaran RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. Oleh karena itu, menjadi pondasi bagi pencapaian kinerja selama periode kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih tahun 2018-2023. Dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021, telah dilaksanakan proses pembahasan dan musyawarah antar pelaku pembangunan khususnya dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 dan melaksanakan amanat Perda RPJMD Tahun 2028-2023, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Bandung Tahun 2021, Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) Tahun 2021.
3. Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari Perubahan APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang

sah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun dan membuat Perubahan Renja PD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2021.

4. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021.
5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbang.
6. Kepala Bappelitbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bandung, Agustus 2021

WALI KOTA BANDUNG

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001